



PENGADILAN TINGGI PADANG

**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN**

LPK

**TH
2023**



PIMPINAN

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
NIP . 195705051984031008



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.
Nip . 196301011992121001

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Padang

<i>NIP</i>	:	195705051984031000
<i>Golongan</i>	:	Pembina Utama IV / e
<i>Pendidikan</i>	:	S-3 Ilmu Hukum
<i>Tempat/Tgl Lahir</i>	:	Padang, 05 Mei 1957

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

<i>NIP</i>	:	196301011992121000
<i>Golongan</i>	:	Pembina Utama (IV/e)
<i>Pendidikan</i>	:	S2 – Humaniora
<i>Tempat/Tgl Lahir</i>	:	Jombang, 01 Januari 1963

HAKIM TINGGI



Nama Hakim Tinggi

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.
SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.
SUKMAYANTI, S.H., M.H.
INRAWALDI, S.H., M.H.
H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.
CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.
MASRIMAL, S.H.
WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.
ASMAR, S.H., M.H.
H IRWAN EFENDI, S.H., M.H.
MASRIZAL, S.H., M.H.
ASMUDDIN, S.H., M.H.
RITA ELSY, S.H., M.H.
RETNO PURWANDARI YULISTYOWATI, S.H., M.H.
SURACHMAT, S.H., M.H.

NAMA HAKIM ADHOC

LENDRAWATI, S.H., M.Hum.
FIRDAUS, S.H., M.Hum.
AHMAD DENDY SYAIFULLAH, S.H., M.H.

PANITERA & SEKRETARIS



Endri Novian, S.E.
Nip . 19751109 200312 1 001

SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI PADANG



PANITERA
PENGADILAN TINGGI PADANG

Rina Pertiwi, S.H., M.H.
NIP . 19641 203199103 2 003

Endri Novian, S.E., M.M.
Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang

NIP	: 197511092003121001
Golongan	: Pembina Utama IV / c
Pendidikan	: S-2 Manajemen Umum
Tempat/Tgl Lahir	: Bogor , 09 November 1975

Rina Pertiwi, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Tinggi Padang

NIP	: 196412031991032003
Golongan	: Pembina Utama Madya IV /d
Pendidikan	: S-2 Ilmu Hukum
Tempat/Tgl Lahir	: Bandung, 03 Desember 1964

PEJABAT STRUKTURAL



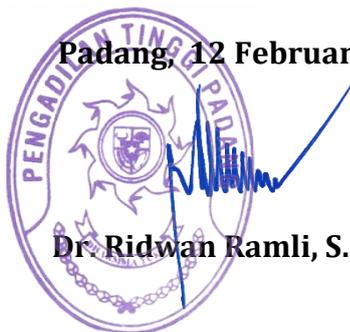
No.	Nama	Jabatan	NIP
1	Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Padang	195705051984031000
2	Suwono, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang	196301011992121000
3	Endri Novian, S.E., M.M.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang	197511092003121000
4	Rina Pertiwi, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Tinggi Padang	196412031991032000
5	Budiman, S.H.	Kabag. Umum & Keuangan	197403271993031000
6	Ade Candra, S.H.	Kabag. Perencanaan & Kepegawaian	198107222001121000
7	Nurmaidaris, S.H.,	Panitera Muda Pidana	196405251985032000
8	Syalferri, S.H.	Panitera Muda Perdata	196603051992031000
9	Neldawati, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	196207031991032000
10	Zulkifli, S.H.	Panitera Muda Perdata	196408121986031000
11	Aznel Mahendra, S.Si., M.H.	Kasubbag Rencana Program & Anggaran	198307042009121000
12	Ayu Davmayanti, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian & TI	198401232007042000
13	Novita Sari, S.Kom.	Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	198611222009122000
14	Suyono, S.H.	Kasubbag. Tata Usaha & Rumah Tangga	198007022009121000

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban terhadap hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari seluruh Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Laporan ini dibuat berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Laporan ini sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja. Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam tahun 2023. Dalam laporan ini telah tertuang kinerja utama dengan didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan sekaligus merupakan evaluasi bagi Pengadilan Tinggi Padang. Evaluasi dimaksud untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Semoga laporan ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan kami sajikan dan kami juga berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Mahkamah Agung RI.

Padang, 12 Februari 2024



Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Pimpinan	i
Hakim Tinggi	ii
Panitera dan Sekretaris	iii
Pejabat Struktural	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Keadaan Perkara	12
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang	13
B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Padang	17
• Jumlah sisa perkara yang diputus	17
• Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	20
• Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi, PK.....	22
• Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi	31
• Jumlah perkara perdata yang berhasil diversifikasi	32
C. Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu	32
• Posbakum	33
• Sidang keliling/Pelayanan Terpadu	34
• Perkara Prodeo	34
BAB III Sumber Daya Manusia	35
A. Mutasi	38
B. Promosi.....	39
C. Pensiun.....	40
D. Diklat (SDM teknis dan Non teknis)	41

BAB IV Pengelolaan Keuangan, sarana Prasarana dan Teknologi Informasi....	60
A. Pengelolaan Keuangan	60
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	62
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	106
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....	112
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	112
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	114
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	116
BAB VI Pengawasan.....	158
A. Internal.....	159
B. Evaluasi	177
BAB VII Penutup	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	181

A. Profil Pengadilan Tinggi Padang



Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi Bertipe A di Indonesia. Terletak pada Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Padang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Padang memiliki tugas pokok dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, dan juga mempunyai fungsi yudikatif (penyelesaian perkara), pengawasan, pengaturan, dan fungsi administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang Yang Agung"

MISI

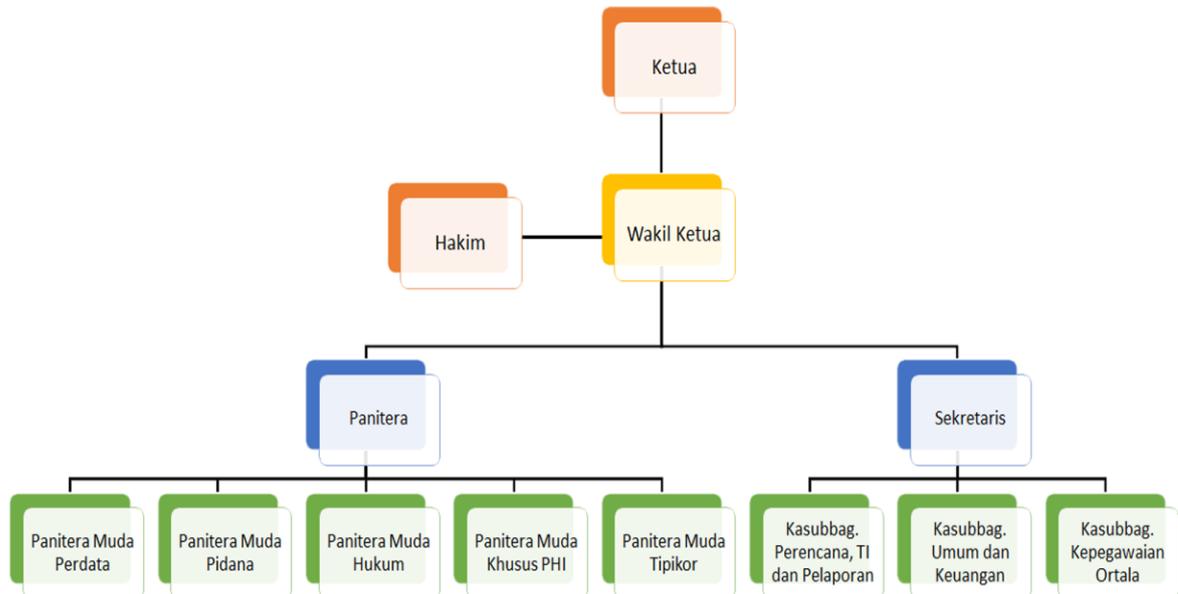
- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang;*
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;*
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang;*
- 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang;*

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang

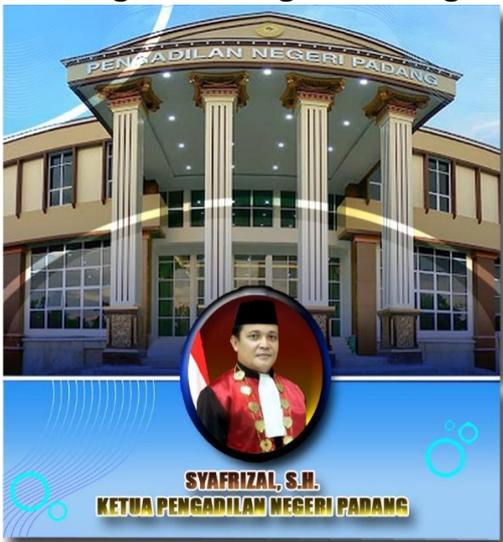


Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri



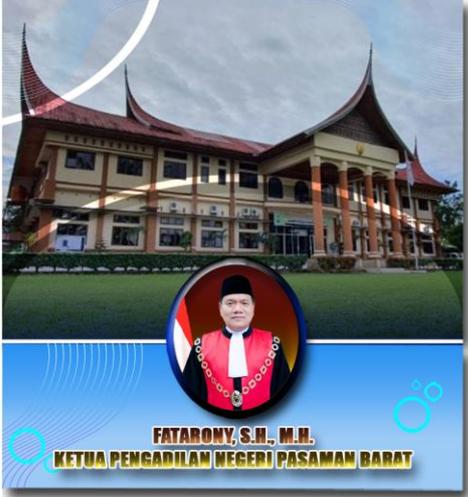
D. YURISDIKSI/WILAYAH HUKUM

PENGADILAN TINGGI PADANG

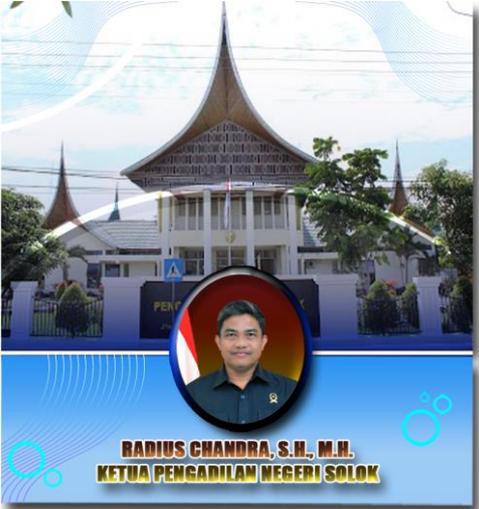
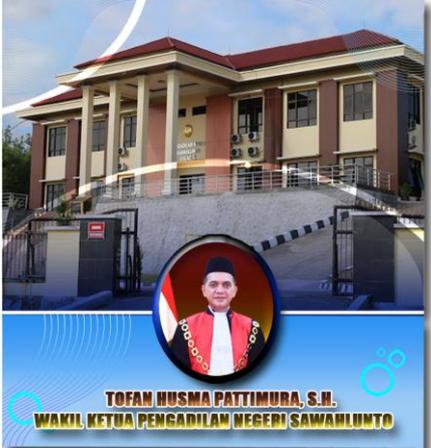
No.	Satuan Kerja	Wilayah Yurisdiksi	
		Kabupaten/ Kota	Keterangan
1	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Padang</p> 	<p>Wilayah Kota Padang dengan luas 1.414,96 Km² meliputi 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan yaitu</p>	<p>Kecamatan Padang Utara Kecamatan Padang Timur ; Kecamatan Padang Selatan; Kecamatan Padang Barat ; Kecamatan Nanggalo; Kecamatan Lubuk Begalung; Kecamatan Kuranji; Kecamatan Koto Tengah ; Kecamatan Bungus Teluk Kabung; Kecamatan Pauh ; Kecamatan Patamuan;</p>
		<p>Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 6.011,35 km² meliputi 10 Kecamatan, 43 desa dan 202 dusun, yaitu:</p>	<p>Kecamatan Siberut Utara Kecamatan Siberut Selatan; Kecamatan Siberut Tengah; Kecamatan Siberut Barat ; Kecamatan Siberut Barat Daya; Kecamatan Sipora Selatan; Kecamatan Sipora Utara; Kecamatan Pagai Selatan ; Kecamatan Pagai Utara; Kecamatan Sikakap.</p>

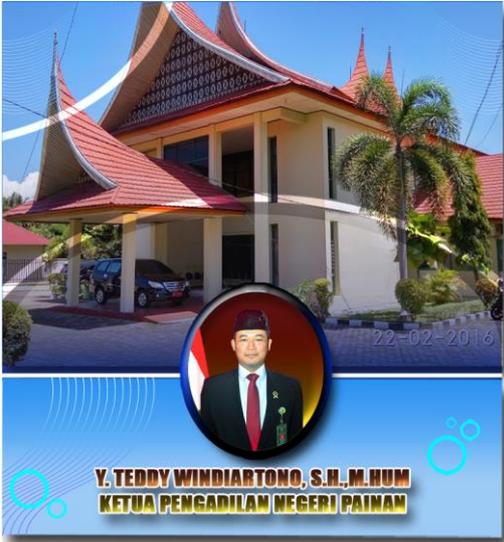
2	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Pariman</p> 	<p>Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pariman Kelas I.B meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.</p> <p>17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu;</p>	<p>Kecamatan Lubuk Alung; Kecamatan Batang Anai; Kecamatan Batang Gasan; Kecamatan 2x11 Enam Lingkung; Kecamatan 2x11 Kayu Tanam; Kecamatan Sungai Limau; Kecamatan Sungai Geringging; Kecamatan Enam Lingkung; Kecamatan IV Koto Aur Malintang; Kecamatan Padang Sago; Kecamatan Patamuan; Kecamatan Sintuk Toboh Gadang; Kecamatan Ulakan Tapakis; Kecamatan V Koto Kampung Dalam; Kecamatan V Koto Timur; Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.</p>
		Kota Pariaman	<p>Kecamatan Pariaman Selatan; Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah Kecamatan Pariaman Timur</p>
3	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Bukittinggi</p>	Kota Bukittinggi	<p>Kecamatan Guguk Panjang; Kecamatan Aur Birugoo Tigo Baleh; Kecamatan Mandiangin Koto Selayan</p>

	 <p>Pengadilan Negeri Bukittinggi</p>	Kabupaten Agam	Kecamatan Ampek Angkek; Kecamatan Baso; Kecamatan Canduang; Kecamatan Kamang Magek Kecamatan Palupuh Kecamatan Tilatang Kamang
4	<p>Pengadilan Negeri Lubuk Basung</p> 	Seluruh wilayah Kabupaten Agam kecuali Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Candung, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Tilatang Kamang.	Kecamatan Banuhampu Kecamatan Ampek Nagari Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Malalak Kecamatan Matur Kecamatan Palembayan Kecamatan Sungai Pua Kecamatan Tanjung Mutiara Kecamatan Tanjung Raya
5	<p>Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping</p> 	Wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 12 Kecamatan yang dibagi lagi atas 211 kelurahan.	Kecamatan Bonjol Kecamatan Duo Bonjol Kecamatan Lubuk Sikaping Kecamatan Panti Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kecamatan Padang Gelugur Kecamatan Rao Kecamatan Rao Selatan Kecamatan Rao Utara Kecamatan Alahan Mati Kecamatan Tigo Nagari

6	<p>Pengadilan Negeri Pasaman Barat</p> 	Kabupaten Pasaman Barat	Kecamatan Pasaman ; Kecamatan Luhak Nan Duo ; Kecamatan Kinali ; Kecamatan Sasak Ranah Pesisir; Kecamatan Talamau; Kecamatan Gunung Tuleh; Kecamatan Sungai Aur; Kecamatan Lembah Melintang ; Kecamatan Koto Balingka; Kecamatan Sungai Beremas ; Kecamatan Ranah Batahan;
7	<p>Pengadilan Negeri Padang Panjang</p> 	Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah ±23,00 km persegi yang mencakup dua kecamatan	Kecamatan Padang Panjang Barat; Kecamatan Padang Panjang Timur
8	<p>Pengadilan Negeri Payakumbuh</p> 	Kota Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh Barat; Kecamatan Payakumbuh Utara; Kecamatan Payakumbuh Timur; Kecamatan Payakumbuh Selatan ; Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.
		Kabupaten Limapuluh Kota	Kecamatan Payakumbuh; Kecamatan Akabiluru; Kecamatan Luak; Kecamatan Situjuh; Kecamatan Lareh Sago Halaban.

9	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Tanjung Pati</p> 	Kabupaten Limam Puluh Kota	Kecamatan Harau ; Kecamatan Pangkalan Koto Baru ; Kecamatan Kapur IX; Kecamatan Guguak ; Kecamatan Mungka; Kecamatan Suliki; Kecamatan Bukit Barisan; Kecamatan Gunung Omeh ;
10	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Koto Baru</p> 	Kabupaten Solok 10 Kecamatan	Kecamatan Kubang ; Kecamatan Bukit Sundi ; Kecamatan Gunung Talang; Kecamatan Lembah Gumanti; Kecamatan Hiliran Gumanti; Kecamatan Danau Kembar; Kecamatan Bukit Barisan; Kecamatan Lembang Jaya; Kecamatan Payung Sekaki Kecamatan Pantai Cermin Kecamatan Tigo Lurah
		Kabupaten Solok Selatan 7 Kecamatan	Kecamatan Sungai Pagu; Kecamatan Pauh Duo ; Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; Kecamatan Sangir; Kecamatan Sangir Jujan; Kecamatan Sangir Balai Janggo; Kecamatan Sangir Batang Hari.

11	<p>Pengadilan Negeri Solok</p> 	<p>Kota Solok 2 Kecamatan</p>	<p>Kecamatan Lubuk Sikarah ; Kecamatan Tanjung harapan.</p>
	<p>Kabupaten Solok 4 Kecamatan</p>	<p>Kecamatan X Koto Singkarak; Kecamatan IX Koto Sungai Lasi; Kecamatan Junjuang Sirih; Kecamatan X Koto Diatas.</p>	
12	<p>Pengadilan Negeri Muaro</p> 	<p>Kabupaten Sijunjung 8 Kecamatan</p>	<p>Kecamatan Kupitan ; Kecamatan Koto VII ; Kecamatan Sumpur Kudus; Kecamatan Sijunjung ; Kecamatan IV Nagari; Kecamatan Lubuk Tarok; Kecamatan Tanjung Gadang; Kecamatan Kamang Baru.</p>
13	<p>Pengadilan Negeri Sawahlunto</p> 	<p>Kabupaten Sawahlunto 4 Kecamatan</p>	<p>Kecamatan Berangin ; Kecamatan Lembah Segar; Kecamatan Talawi; Kecamatan Silungkang</p>

14	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Painan</p>  <p style="text-align: center;">Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.HUM KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN</p>	Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan	<p>Kecamatan Tarusan; Kecamatan Bayang; Kecamatan Bayang Utara; Kecamatan IV Jurai; Kecamatan Batang Kapas; Kecamatan Sutera; Kecamatan Lengayang; Kecamatan Ranah Pesisir; Kecamatan Linggo Sari Baganti; Kecamatan Pancung Soal; Kecamatan Air Pura; Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; Kecamatan Basa Ampek Hulu Tapan; Kecamatan Lunang; Kecamatan Silaut;</p>
15	<p style="text-align: center;">Pengadilan Negeri Batusangkar</p>  <p style="text-align: center;">LIENA, S.H., M.HUM KETUA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR</p>	Kabupaten Tanah Datar 11 Kecamatan	<p>Kecamatan Lima Kaum; Kecamatan Tanjung Emas; Kecamatan Padang Ganting; Kecamatan Rambatan; Kecamatan Pariangan; Kecamatan Sungai Tarab; Kecamatan Salimpaung; Kecamatan Sungayang; Kecamatan Tanjung Baru; Kecamatan Lintau Buo; Kecamatan Lintau Buo Utara.</p>

16	<p>Pengadilan Negeri Pulau Punjung</p> 	Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar Kecamatan Koto Salak Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Koto Baru Kecamatan Sitiung Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Timpeh Kecamatan Tiumang
----	---	--------------------------	--

BAB II

KEADAAN PERKARA PENGADILAN TINGGI PADANG

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, yang baik, maka perlunya evaluasi terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh *stakeholders* melalui evaluasi terhadap tugas pokok instansi penegak hukum, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang sesuai dengan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini memuat keadaan perkara, kondisi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik dan pengawasan semua satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Pada tahun 2023, jumlah perkara yang masuk adalah **6.831** perkara, sementara sisa pada awal tahun 2022 sejumlah **1.004** perkara. Kemudian perkara yang diterima dengan sisa tersebut menjadi beban kinerja selama tahun 2023 berjumlah **7.835** perkara. Namun diputus atau diselesaikan sejumlah **6.799** perkara, sehingga terdapat sisa pada akhir tahun adalah **1.036**. Khusus untuk perkara lau lintas pada tahun 2023 sejumlah **15.050** dan perkara PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) yang putus berjumlah **40** perkara dari jumlah beban **49** perkara. Sehingga bersisa **9** perkara. Dapat dilihat pada tabel keadaan perkara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut:

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang dan se-Wilayah Hukumnya.

A.1. Keadaan Perkara Gabungan Perdata dan Pidana

No	Nama Pengadilan	Sisa 2022	Perkara Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa
1	Pengadilan Tinggi Padang	58	830	888	805	83
2	Pengadilan Negeri Padang	384	2101	2485	1998	487
3	Pengadilan Negeri Pariaman	152	513	665	518	147
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	64	340	404	332	72
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	31	239	270	248	22
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	18	335	353	329	24
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	21	145	166	143	23
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	122	123	118	5
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	38	339	377	366	11
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	13	215	228	214	14
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	34	243	277	255	22
12	Pengadilan Negeri Painan	56	301	357	323	34
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	53	347	400	357	43
14	Pengadilan Negeri Solok	18	247	265	257	8
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	9	57	66	61	5
16	Pengadilan Negeri Muaro	22	156	178	164	14
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	32	301	333	311	22
	Total	1.004	6.831	7.835	6.799	1.036

A.2. Keadaan Perkara Perdata

No	Nama Pengadilan	Sisa 2022	Perkara Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa
1	Pengadilan Tinggi Padang	21	310	331	301	30
2	Pengadilan Negeri Padang	156	809	965	758	207
3	Pengadilan Negeri Pariaman	71	206	277	192	85
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	34	177	211	179	32
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	22	90	112	99	13
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	14	131	145	132	13
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	9	61	70	61	9
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	34	35	33	2
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	19	124	143	132	11
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	13	57	70	58	12
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	14	80	94	80	14
12	Pengadilan Negeri Painan	26	96	122	106	16
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	22	142	164	140	24
14	Pengadilan Negeri Solok	10	108	118	110	8
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	2	17	19	17	2
16	Pengadilan Negeri Muaro	5	44	49	43	6
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	7	52	59	52	7
	Total	446	2.538	2.984	2.493	491

A.3. Keadaan Perkara Pidana

No	Nama Pengadilan	Sisa 2022	Perkara Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa
1	Pengadilan Tinggi Padang	37	520	557	504	53
2	Pengadilan Negeri Padang	228	1292	1520	1240	280
3	Pengadilan Negeri Pariaman	81	307	388	326	62
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	30	163	193	153	40
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	9	149	158	149	9
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	204	208	197	11
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	12	84	96	82	14
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	0	88	88	85	3
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	19	215	234	234	0
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	0	158	158	156	2
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	20	163	183	175	8
12	Pengadilan Negeri Painan	30	205	235	217	18
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	31	205	236	217	19
14	Pengadilan Negeri Solok	8	139	147	147	0
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	7	40	47	44	3
16	Pengadilan Negeri Muaro	17	112	129	121	8
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	25	249	274	259	15
	Total	558	4293	4851	4306	545

A.4. Keadaan Perkara Lalu Lintas

No	Nama Pengadilan	Sisa 2022	Perkara Masuk 2023	Putus 2023
1	Pengadilan Negeri Padang	0	19.040	19.040
2	Pengadilan Negeri Pariaman	0	7.001	7.001
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	0	3482	3482
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	0	1.598	1.598
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	0	1.898	1.898
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	0	999	999
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	0	1.989	1.989
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	0	1.631	1.631
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	0	820	820
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	0	1.802	1.802
11	Pengadilan Negeri Painan	0	952	952
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	0	2.605	2.605
13	Pengadilan Negeri Solok	0	2.958	2.958
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	1.364	1.364
15	Pengadilan Negeri Muaro	0	1.281	1.281
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	0	695	695
	Total	0	50.115	50.115

B. PENYELESAIAN PERKARA

B.1. Jumlah Sisa Perkara Tahun 2022 Putus Tahun 2023

B.1.1. Jumlah Perkara Perdata Tahun 2022 Putus Tahun 2023

No	NAMA SATUAN KERJA	SISA PERKARA TAHUN 2022	DIPUTUS TAHUN 2023
1	Pengadilan Tinggi Padang	21	21
2	Pengadilan Negeri Padang	164	164
3	Pengadilan Negeri Pariaman	71	71
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	38	38
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	22	22
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	14	13
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	9	9
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	19	19
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	13	13
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	14	14
12	Pengadilan Negeri Painan	26	26
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	22	22
14	Pengadilan Negeri Solok	10	10
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	2	2
16	Pengadilan Negeri Muaro	5	5
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	7	7
	Total	458	457

B.1.2. Jumlah Perkara Pidana Tahun 2022 Putus Tahun 2023

No	NAMA SATUAN KERJA	SISA PERKARA TAHUN 2022	DIPUTUS TAHUN 2023
1	Pengadilan Tinggi Padang	37	37
2	Pengadilan Negeri Padang	228	228
3	Pengadilan Negeri Pariaman	81	81
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	30	30
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	9	9
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	4
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	12	12
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	0	0
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	19	19
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	0	0
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	20	20
12	Pengadilan Negeri Painan	30	30
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	31	31
14	Pengadilan Negeri Solok	8	8
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	7	7
16	Pengadilan Negeri Muaro	17	17
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	24	24
	Total	557	557

B.1.3. Jumlah Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2022 Putus Tahun 2023

No	NAMA SATUAN KERJA	SISA PERKARA TAHUN 2022	DIPUTUS TAHUN 2023
1	Pengadilan Tinggi Padang	58	58
2	Pengadilan Negeri Padang	392	392
3	Pengadilan Negeri Pariaman	152	152
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	68	68
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	31	31
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	18	17
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	21	21
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	38	38
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	13	13
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	34	34
12	Pengadilan Negeri Painan	56	56
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	53	53
14	Pengadilan Negeri Solok	18	18
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	9	9
16	Pengadilan Negeri Muaro	22	22
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	31	31
	Total	1.015	1.014

B.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

B.2.1. Perkara Perdata

No	Pengadilan	Beban 2023	Putus Tepat Waktu 2023	Putus Tidak Tepat Waktu 2023	Jumlah Putus 2023
1	Pengadilan Tinggi Padang	331	301	0	301
2	Pengadilan Negeri Padang	965	669	89	758
3	Pengadilan Negeri Pariaman	277	145	47	192
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	211	127	52	179
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	112	93	6	99
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	145	132	0	132
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	70	61	0	61
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	35	33	0	33
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	143	125	7	132
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	70	58	0	58
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	94	72	8	80
12	Pengadilan Negeri Painan	122	92	14	106
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	164	126	14	140
14	Pengadilan Negeri Solok	118	106	4	110
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	19	16	1	17
16	Pengadilan Negeri Muaro	49	43	0	43
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	59	15	1	16
	Total	2.984	2.214	243	2.457

B.2.2. Perkara Pidana

No	Pengadilan	Beban 2023	Putus Tepat Waktu 2023	Putus Tidak Tepat Waktu 2023	Jumlah Putus 2023
1	Pengadilan Tinggi Padang	557	504	0	504
2	Pengadilan Negeri Padang	1569	1225	15	1.240
3	Pengadilan Negeri Pariaman	388	326	0	326
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	193	153	0	153
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	158	149	0	149
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	208	197	0	197
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	96	82	0	82
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	88	85	0	85
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	234	221	13	234
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	158	156	0	156
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	183	175	0	175
12	Pengadilan Negeri Painan	235	217	0	217
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	236	217	0	217
14	Pengadilan Negeri Solok	147	147	0	147
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	47	44	0	44
16	Pengadilan Negeri Muaro	129	121	0	121
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	274	259	0	259
	Total	4.900	4.278	28	4.306

C. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

C.1. Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Banding

No	Pengadilan	Putus	Banding	Tidak Banding
1	Pengadilan Negeri Padang	758	75	683
2	Pengadilan Negeri Pariaman	192	37	155
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	179	32	144
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	99	17	82
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	132	21	111
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	61	4	57
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	33	0	33
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	132	21	111
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	58	15	43
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	80	15	55
11	Pengadilan Negeri Painan	106	16	90
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	140	18	122
13	Pengadilan Negeri Solok	110	14	96
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	17	2	15
15	Pengadilan Negeri Muaro	43	6	37
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	52	4	48
	TOTAL	2.192	297	1.882

C.2. Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Banding

No	Pengadilan	Putus	Banding	Tidak Banding
1	Pengadilan Negeri Padang	1240	127	1113
2	Pengadilan Negeri Pariaman	326	40	286
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	153	16	141
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	149	25	124
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	197	50	136
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	82	10	73
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	85	4	81
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	234	90	121
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	156	53	103
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	175	20	155
11	Pengadilan Negeri Painan	217	15	186
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	217	39	178
13	Pengadilan Negeri Solok	147	22	125
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	44	9	35
15	Pengadilan Negeri Muaro	121	11	96
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	259	37	126
	TOTAL	3.802	568	3079

C.3. Jumlah Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Banding Tahun 2023

No	Pengadilan	Putus 2023	Banding	Tidak Banding
1	Pengadilan Negeri Padang	1998	202	1796
2	Pengadilan Negeri Pariaman	518	77	441
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	332	48	285
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	248	42	206
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	329	71	247
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	143	14	130
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	118	4	114
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	366	111	232
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	214	68	146
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	255	35	210
11	Pengadilan Negeri Painan	323	31	276
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	357	57	300
13	Pengadilan Negeri Solok	257	36	221
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	61	11	50
15	Pengadilan Negeri Muaro	164	17	133
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	311	41	174
	TOTAL	5.994	865	4.961

C.3.1. Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi.

No	Pengadilan	Putus	Kasasi	Tidak Kasasi
1	Pengadilan Tinggi Padang	301	135	166
2	Pengadilan Negeri Padang	71	56	15
3	Pengadilan Negeri Pariaman	37	27	10
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	28	23	5
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	18	10	8
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	16	12	4
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4	3	1
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	3	0
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	22	19	3
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	16	11	4
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	15	10	5
12	Pengadilan Negeri Painan	14	8	6
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	19	14	5
14	Pengadilan Negeri Solok	14	9	5
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	0	0
16	Pengadilan Negeri Muaro	7	5	2
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	5	5	0
	TOTAL	289	215	73

C.3.1. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi.

No	Pengadilan	Putus	Kasasi	Tidak Kasasi
1	Pengadilan Tinggi Padang	504	231	273
2	Pengadilan Negeri Padang	114	90	28
3	Pengadilan Negeri Pariaman	35	13	22
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	22	3	19
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	28	14	20
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	33	11	22
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	12	6	6
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	5	3	3
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	87	34	53
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	40	25	15
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	19	10	9
12	Pengadilan Negeri Painan	11	9	2
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	36	20	16
14	Pengadilan Negeri Solok	18	15	3
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	10	4	6
16	Pengadilan Negeri Muaro	11	7	4
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	36	25	11
	TOTAL	517	289	239

**C.3.4. Jumlah Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi.**

No	Pengadilan	Putus	Kasasi	Tidak Kasasi
1	Pengadilan Tinggi Padang	805	366	439
2	Pengadilan Negeri Padang	185	146	43
3	Pengadilan Negeri Pariaman	72	40	32
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	50	26	24
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	46	24	28
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	49	23	26
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	16	9	7
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	8	6	3
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	109	53	56
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	56	36	19
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	34	20	14
12	Pengadilan Negeri Painan	25	17	8
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	55	34	21
14	Pengadilan Negeri Solok	32	24	8
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	10	4	6
16	Pengadilan Negeri Muaro	18	12	6
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	41	30	11
	TOTAL	806	504	312

C.4.1. Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

No	Pengadilan	Putus 2023	PK	Tidak PK
1	Pengadilan Negeri Padang	20	5	15
2	Pengadilan Negeri Pariaman	27	3	24
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	6	6	0
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	9	2	7
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	0	0	0
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	3	0	3
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	0	2
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	2	2	0
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	5	0	0
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	9	3	6
11	Pengadilan Negeri Painan	8	1	7
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	9	0	9
13	Pengadilan Negeri Solok	3	1	2
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	0	0
15	Pengadilan Negeri Muaro	1	0	0
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	0	0	0
	Total	104	23	75

C.4.2 Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

No	Pengadilan	Putus	PK	Tidak PK
1	Pengadilan Negeri Padang	60	4	56
2	Pengadilan Negeri Pariaman	4	0	4
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	2	0	2
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	9	2	7
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2	0	2
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4	1	3
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	0	2
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	2	2	0
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	18	0	18
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	5	0	5
11	Pengadilan Negeri Painan	4	0	4
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	16	0	16
13	Pengadilan Negeri Solok	12	0	12
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3	0	3
15	Pengadilan Negeri Muaro	6	0	6
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	17	1	16
	Total	166	10	156

C.4.3 Jumlah Perkara Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan

Peninjauan Kembali

No	Pengadilan	Putus 2023	PK	Tidak PK
1	Pengadilan Negeri Padang	80	9	71
2	Pengadilan Negeri Pariaman	31	3	28
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	8	6	2
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	18	4	14
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2	0	2
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	7	1	6
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	4	0	4
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	4	4	0
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	23	0	18
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	14	3	11
11	Pengadilan Negeri Painan	12	1	11
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	25	0	25
13	Pengadilan Negeri Solok	15	1	14
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3	0	3
15	Pengadilan Negeri Muaro	7	0	6
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	17	1	16
	Total	270	33	231

D. Keadaan Perkara PHI pada Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023

No	Klasifikasi	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Beban Perkara	PHI yang Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Sisa	Bandung	Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
1	PHI	7	42	49	40	16	24	9	0	24	26

E. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara perdata tahun 2023 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang yang melakukan mediasi dan berhasil melalui mediasi dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Perdata Yang Masuk	Jumlah Yang Di Mediasi	Jumlah Yang Tidak Di Mediasi
1	Pengadilan Negeri Padang	300	16	284
2	Pengadilan Negeri Pariaman	86	5	81
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	76	70	6
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	54	2	52
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	55	42	13
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	29	0	0
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	9	2	7
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	54	1	53
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	22	0	22
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	26	1	25
11	Pengadilan Negeri Painan	78	45	33
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	66	59	7
13	Pengadilan Negeri Solok	36	3	33
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	5	1

15	Pengadilan Negeri Muaro	17	11	6
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	59	0	0
TOTAL		973	262	623

F. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Diversi

Jumlah perkara anak tahun 2023 pada Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang yang melakukan diversi dan berhasil melalui diversi dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Anak Yang Masuk	Jumlah Yang Berhasil Diversi	Jumlah Yang Tidak Berhasil Diversi
1	Pengadilan Negeri Padang	63	6	57
2	Pengadilan Negeri Pariaman	6	6	0
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	5	0	5
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	4	1	3
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	6	1	5
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	3	0	3
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	4	0	4
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	9	0	9
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	14	3	11
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	7	2	5
11	Pengadilan Negeri Painan	3	0	3
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	9	6	3
13	Pengadilan Negeri Solok	7	3	4
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	0	0	0
15	Pengadilan Negeri Muaro	15	7	6
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	4	1	3
Total		159	36	121

B. LAYANAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

1. POSBAKUM

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	43.200.000	43.200.000	-	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	24.000.000	24.000.000	-	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	38.400.000	38.400.000	-	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	24.000.000	24.000.000	-	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	24.000.000	24.000.000	-	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	19.200.000	19.200.000	-	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	24.000.000	24.000.000	-	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	19.200.000	19.200.000	-	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	24.000.000	24.000.000	-	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	19.200.000	19.200.000	-	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	19.200.000	19.200.000	-	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	24.000.000	24.000.000	-	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	24.000.000	24.000.000	-	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	21.600.000	21.600.000	-	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	24.000.000	24.000.000	-	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	24.000.000	24.000.000	-	100%
	Total	396.000.000	396.000.000		100%

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang				
1	Pengadilan Negeri Padang	-	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	-	-	-
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-	-	-
8	Pengadilan Negeri Solok	-	-	-	-
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-	-	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	-	-	-
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	-	-	-	-
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	89.500.000	88.450.000	1.050.000	99%
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	100.000.000	100.000.000	-	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-
	Total	247.500.000	246.800.000	660.000	

3. PRODEO

Tidak ada anggaran untuk prodeo di dalam DIPA masing-masing satker.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pengadilan	Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Kepaniteraan						Kesekretariatan					
					Panitera	Panmud	PP	JS	JSP	Staff	Sekretaris	Kabag	Kasub	Fungsional	Staff	PPNP
	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	16	1	4	19	0	0	12	1	2	4	11	5	20
1	Pengadilan Negeri Padang	1	1	18	1	4	10	3	13	6	1	0	3	3	4	19
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	4	1	2	5	3	1	4	1	0	3	2	5	8
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	6	1	3	4	4	0	5	1	0	3	3	3	11
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	6	1	2	1	2	0	3	1	0	3	1	1	9
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	9	1	2	1	1	1	5	1	0	3	3	1	9
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	1	6	1	3	0	2	0	5	1	0	3	2	0	9
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	1	7	1	2	2	2	0	2	1	0	3	2	1	10
8	Pengadilan Negeri Solok	1	1	7	1	3	0	1	1	4	1	0	3	4	0	10
9	Pengadilan Negeri Painan	1	0	6	1	3	0	0	0	6	1	0	3	2	1	10

10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	4	1	3	3	1	0	5	1	0	3	3	2	8
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	5	1	3	2	1	1	3	1	0	3	1	1	10
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	5	1	3	2	1	4	5	1	0	3	2	0	9
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	0	7	1	3	1	2	0	0	1	0	3	2	7	10
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	1	5	1	3	2	0	1	3	1	0	3	1	0	9
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	8	1	3	2	1	0	5	1	0	3	3	0	9
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	1	6	1	3	2	1	1	4	1	0	3	0	2	8
Total																

A. MUTASI

NO	PENGADILAN	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Padang	4	5	
1	Pengadilan Negeri Padang	11	8	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	0	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	4	10	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	4	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	6	4	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	0	1	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2	2	
8	Pengadilan Negeri Solok	4	3	
9	Pengadilan Negeri Painan	2	1	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	2	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	4	6	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	2	0	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	
14	Pengadilan Negeri Muaro	3	5	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	6	2	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	3	1	
	Total			

B. PROMOSI				
NO	PENGADILAN	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Padang	9	1	
1	Pengadilan Negeri Padang	1	2	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	3	9	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	4	9	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	4	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	7	4	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4	4	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2	1	
8	Pengadilan Negeri Solok	3	2	
9	Pengadilan Negeri Painan	11	0	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	1	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	5	5	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	0	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	3	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	8	2	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	5	0	
	Total			

C. PENSUUN			
NO	PENGADILAN	JABATAN	JUMLAH
	Pengadilan Tinggi Padang	Ketua, Panmuda Hukum, Panitera Pengganti, Pengadministrasi Hukum, Panmud Perdata	8
1	Pengadilan Negeri Padang	Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Panitera Pengganti	3
2	Pengadilan Negeri Pariaman	Panitera Pengganti, Juru Sita	2
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Juru Sita dan Panitera Pengganti	3
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Panitera Pengganti	2
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Panitera Pengganti	1
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	Panitera dan Panitera Pengganti	2
8	Pengadilan Negeri Solok	Panitera Pengganti	1
9	Pengadilan Negeri Painan	Juru Sita	1
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Panitera Pengganti	1
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Panitera Pengganti	1
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	Panitera Muda Perdata dan Panitera Pengganti	2
14	Pengadilan Negeri Muaro	Bendahara Penerimaan	1
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	0
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Panitera Muda Perdata	1
	Total		

D. Diklat Teknis dan Non Teknis

1) Pengadilan Negeri Padang

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Perikanan	27 Feb-18 Mar 2023
2	SYAFRIZAL, S.H.	Hakim	Bimtek Hukum Adat	15-Mar-23
3	SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H.	Hakim	Bimtek Hukum Adat	15-Mar-23
4	EKO PRAMONO, S.H.	Hakim Adhoc	Bimtek Hukum Adat	15-Mar-23
5	ABDUL RAHMAN LUBIS, S.P.	Hakim Adhoc	Bimtek Hukum Adat	15-Mar-23
6	SAYED KHADIMSYAH, S.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Mediator	5-31 Mei 2023
7	EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH., M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Mediator	5-31 Mei 2023
8	SYAFRIZAL, S.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20-24 Mei 2023
9	IRWIN ZAILY, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20-24 Mei 2023
10	JUANDRA, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20-24 Mei 2023
11	SAID HAMRIZAL ZULFI, S.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20-24 Mei 2023

12	ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20-24 Mei 2023
13	FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20-24 Mei 2023
14	YUSNITA, S.H.	Jurusita	Pelatihan Teknis Yudisial JS dan JSP	25 Sept-7 Okt 2023
15	AFS DEWANTORO, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan	12 Okt-8 Nov 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	BARATHA JAYA WARDHANA, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Sosialisasi E- Kinerja	10 Januari 2023
2	DORES MENDRI, S.H.	Analisis TataLaksana	Sosialisasi E- Kinerja	10 Januari 2023
3	AULIA ZIKRI, S.E.	Analisis TataLaksana	Sosialisasi E- Kinerja	10 Januari 2023
4	SYAFRIZAL, S.H.	KPN	Pelatihan Aplikasi E-Court	13 Februari 2023
5	M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.	Panitera	Pelatihan Aplikasi E-Court	13 Februari 2023
6	KHAIRANI, S.H.	Panmud Perdata	Pelatihan Aplikasi E-Court	13 Februari 2023
7	EMILIA ARIEF, S.H.	JSP	Pelatihan Aplikasi E-Court	13 Februari 2023

8	ABDUL MUIS	JSP	Pelatihan Aplikasi E-Court	13 Februari 2023
9	ERWIN SANJAYA, S.H.	PPNPN	Pelatihan Aplikasi E-Court	13 Februari 2023
10	BARATHA JAYA WARDHANA, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pelatihan Manajemen ASN	13-20 Mar 2023
11	ZAHARA B, S.H., M.H.	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN	4-6 Apr 2023
12	DORES MENDRI, S.H.	Analisis TataLaksana	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	8-24 Agus 2023
13	AULIA ZIKRI, S.E.	Analisis TataLaksana	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	8-24 Agus 2023
14	YOLLA APRILLIA, S.Kom.	Pranata Komputer	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	8-24 Agus 2023
15	THERESIA YOESEPIN RITONGA, A.Md., Ak.	Pengelola BMN	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	8-24 Agus 2023
16	DELVI SARI, S.Sos.	Kasub PTIP	Pelatihan Calon PPK	6-10 Nov 2023
17	NISRINA IRBAH SATI, S.H.	APP	Pelatihan Kepemimpinan Dasar	6-20 Sept 2023
18	ENDRICKE ADITYA IRWAN, A.Md	Arsiparis Terampil (PPPK)	Pelatihan Orientasi PPPK	6-20 Sept 2023
19	JUANDRA, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Hukum Perpajakan	24 Okt-2 Nov 2023

20	ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Hukum Perpajakan	24 Okt-2 Nov 2023
----	-------------------------------------	-------	----------------------------------	----------------------

2) Pengadilan Negeri Pariaman

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	SAFWANUDDIN SIREGAR, S.H., M.H	Hakim	Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum seluruh Indonesia	5 sd 31 Mei 2023
2	SYOFIANITA, S.H. MH	Hakim	Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum seluruh Indonesia	5 sd 31 Mei 2023
3	FERI ANDA, S.H., M.H.	Hakim	Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Gelombang 1	05 Juni s.d 24 Juni 2023
4	SHERLY RISANTY, S.H., M.H.	Hakim	Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Gelombang 1	05 Juni s.d 24 Juni 2023
5	HELVY EKAWARNI, S.Kom, SH	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Peradilan Umum seluruh Indonesia	13 sd 16 Juni2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	FITRIADI YURSAL,SH	Sekretaris	Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator (PKA)	15 Mei s.d 9 Juni 2023
2	CHICI PARADILLA DEVITRI,A.Md	Pengelola Kepegawaian	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	8 Agustus s.d 24 Agustus 2023
3	ARFAN BUDI RAHMAD, S.IP	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	8 Agustus s.d 24 Agustus 2023
4	YUANITA FATRECIA DAMANIK, A.md.AK	Pengelola Barang Milik Negara	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	8 Agustus s.d 24 Agustus 2023

3) Pengadilan Negeri Bukittinggi
a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.	KETUA	Smart ASN pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	tanggal 20 s.d 24 Februari 2023
2	MELKY SALAHUDIN, S.H.	HAKIM	Asia Pacific Judicial Training on Environment and Climate Law Adjudication; Judges in a triple Planetary Crisis World.	Tanggal 17 Oktober 2023,

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	MIFTAHUSSALAM, S.H.	KASUBBAG KEPEG & ORTALA	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	08 Agustus 23 Agustus 2023
2	MIFTAHUSSALAM, S.H.	KASUBBAG KEPEG & ORTALA	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	23 November – 05 Desember 2023
3	RIFKA MADRIANTI, S.Psi	ANALIS TATA LAKSANA	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	08 – 23 Agustus 2023
4	WELLY OKTRISNI	JURUSITA	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	08 – 23 Agustus 2023
5	MUHAMMAD KARYADI, S.E.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	08 – 23 Agustus 2023
6	YOHANA BESTINA SITANGGANG, A.Md.Ak.	PEMGELOLA BARANG MILIK NEGARA	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	08 – 23 Agustus 2023
7	SONIA ROSALIN SIHITE, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	08 – 23 Agustus 2023
8	WELLY OKTRISNI	JURUSITA	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia	Desember 2023 Januari 2024

4) Pengadilan Negeri Sawahlunto
a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Diana Dewiani, S.H.,M.H..	Wakil Ketua	Peatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak [SPA) Terpadu Gelombang II bagi Aparat Penegak Hukum Seluruh Indonesia	20 hari
2	Nur Khayyu Koyumi SH., MH	Hakim	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	10 Hari
3	Diana Dewiani, SH., M.H	Wakil Ketua	Pelatihan Aplikasi e-Court	Pelatihan Aplikasi e-Court
4	Rimson Situmorang, S.H., M.H	Panitera		
5	Sisca Utama	Jurusita		
6	Azizah, A.Md., A.B	pengelola perkara		

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Shinta Viliasary, S.H	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Jakarta Tahun 2023	4 Hari
2	Rosyidah, S.E.	Kasub umum dan keuangan	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Periode 10 Juli s.d 14 Juli 2023 secara daring	5 Hari
3	Shinta Viliasary, S.H Rosyidah, S.E. Syafriko Hamid, S.E	Sekretaris Kasub umum dan keuangan Kasub PTIP	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan Wilayah Sumatera Barat Kelas Adan Kelas B Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Secara daring 8 Hari, dan Tatatp Muka 4 Hari

			RI dengan BPSDM Sumatera Barat Tahun 2023	
4	Shinta Viliasary, S.H	Sekretaris	Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Peradilan bagi Sekretaris Pengadilan Tahun Anggaran 2023	11 Hari
5	Shinta Viliasary, S.H	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Jakarta Tahun 2023	4 Hari

5) Pengadilan Negeri Payakumbuh

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.	Ketua	Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Peradilan	13 November 2023 s/d 27 November 2023
2	Wahyudianto	Jurusita	Pelatihan Teknis Yudisial Jusrita dan Jusrita Pengganti	1 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	-	-	-	-

6) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Forci Nilpa Darma, S.H, M.H	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	360 Jam

2	Doni Eka Putra, S.H.,M.H	Panitera	Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	90 Jam
---	--------------------------	----------	--	--------

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Misbahul Anwar, SH, MH	Hakim	Pelatihan Smart ASN "ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR THE INDONESIAN CIVIL SERVICE"	40 Jam
2	Sri Rahayu Dianti, S.T	Sekretaris	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	50 Jam
			Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1	61 Jam
3	Havit Biga, SH	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	905 Jam
			Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1	61 Jam
			Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Kompetensi PPK Tipe C	43 Jam
			Pelatihan Kompetensi PPK Kemenkeu	38 Jam
4	CHERIE DARMADI, S.E	Kasubbag Umum dan Keuangan	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1	61 Jam

7) Pengadilan Negeri Batusangkar
a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Kembang Ramadhani K.A, S.H., M.H.	Hakim	CJE 1	30 Januari - 11 Februari 2023
2	Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Hukum Adat	15 Maret 2023
3	Apriyeni Asni Bawamenwi, S.H.	Hakim	Bimtek Hukum Adat	15 Maret 2023
4	Yuni Putri Prawini, S.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	22-24 Mei 2023
5	Kembang Ramadhani K.A, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum	22-24 Mei 2023
4	Eliza Fitria, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum	26 Juli-5 Agustus 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Hari Rahmat, S.H.	Hakim	ECSCS	20 -24 Februari 2023
2	Afrizal Darnis, S.H.	Sekretaris	Manajemen Pengelolaan BMN	3-6 April 2023
3	Zakki Mubarak, S.Kom	Kasubbag PTIP	Pengadaan Barang Jasa	8-23 Agustus 2023
4	Lince, R. Sitohang, S.Kom	Pranata Komputer	Pengadaan Barang Jasa	8-23 Agustus 2023
5	Zakki Mubarak, S.Kom	Kasubbag PTIP	PPK Tipe C	25 Agustus - 11 Oktober 2023
6	Lince, R. Sitohang, S.Kom	Pranata Komputer	PPK Tipe C	25 Agustus - 11 Oktober 2023

8) Pengadilan Negeri Solok
a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Raden Danang Noor Kusumo, S.H.	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	5 s.d 31 Mei 2023
2	Ramlah Mutiah, S.H., M.H.	Hakim	Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Gelombang II bagi Aparat Penegak Hukum Seluruh Indonesia	24 Juli 2023 s.d 12 Agustus 2023
3	Ramlah Mutiah, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan IV Bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum	24 Oktober 2023 s.d 2 November 2023
4	Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.	Hakim	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I / Continuing Judicial Education (CJE I) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	30 Januari 2023 s.d 11 Februari 2023
5	Fabianca Cinthya S, S.H.	Hakim	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I / Continuing Judicial Education (CJE I) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	30 Januari 2023 s.d 11 Februari 2023
6	Herly Bastian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Program Pembelajaran Microlearning Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) PPSPM Secara Daring Melalui Kemenkeu Learning Center	9 s.d 11 Mei 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Ainur Rahayu, S.Psi	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan III Dan V Dari Tempat Tugas Tahun 2023	11 Agustus 2023 s.d 7 November 2023

9) Pengadilan Negeri Painan**a) Diklat Teknis**

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan	30 Hari

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	FADLIA. S, S.E	Kasubbag Umum & Keuangan	Diklat Ppspm	7 Hari
2	ARMEITA YANDA, S.E	Kasubbag Ptip	Diklat Bendahara Penerima	7 Hari
3	BENNY HAMDANI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Diklat Ppk	7 Hari
4	APRILIANA RIZKI NUR LESTARI, A.Md	Arsiparis	Diklat Bendahara	7 Hari
5	Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan	30 Hari
6	FITRAH MUSLIM, S.H	Sekretaris	Diklat Bmn	7 Hari

10) Pengadilan Negeri Padang Panjang**a) Diklat Teknis**

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	PRAMA WIDIANUGRAHA, S.H., M.H.	Hakim	Mengikuti Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	30 Januari s.d 11 Februari 2023
2	GUSTIA WULANDARI, S.H.	Hakim	Mengikuti Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	30 Januari s.d 11 Februari 2023

3	SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kn.	Hakim	Mengikuti Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	30 Januari s.d 11 Februari 2023
4	SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kn.	Hakim	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023	22 Mei s.d 24 Mei 2023
5	FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023	22 Mei s.d 24 Mei 2023
6	AGUNG WICAKSONO, S.H., M. Kn.	Wakil Ketua	Pelatihan Serifikasi Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	5 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023
7	AGUNG WICAKSONO, S.H., M. Kn.	Wakil Ketua	Bimbingan teknis hukum adat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang	15 Maret 2023
8	FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.	Hakim	Bimbingan teknis hukum adat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang	15 Maret 2023
9	LILI EVELIN, S.H., M. H	Ketua	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023	22 Mei s.d 24 Mei 2023
10	LILI EVELIN, S.H., M. H	Ketua	Asia Pacific Judicial Training on environment and Climate Law Adjudications Judges In a Triple Planetary Crisis World	30 Oktober s.d 4 Nopember 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.	Sekretaris	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan VI Wilayah Jawa tengah dan Kalimantan dari Tempat Tugas Tahun 2023	25 Mei s.d 31 Mei 2023

2	SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Jakarta Gelombang II Tahun 2023	15 Mei s.d 17 Mei 2023
3	AHMI FAJARSARI FEBRINA SYADZA, A.Md	Arsiparis	Bimbingan teknis pembekalan tentang tata cara penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan tata kerja bagi jabatan fungsional Arsiparis	22 Februari 2023
4	SURYA DHARMA, S.H.;	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintahan level-1	8 s.d 19 Agustus 2023
5	RAFIKO, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintahan level-1	8 s.d 19 Agustus 2023

11) Pengadilan Negeri Lubuk Basung

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	MOHAMMAD KAMIL ARDIANSYAH, S.H.,M.H	HAKIM	Pelatihan hakim berkelanjutan i (cje i) peradilan umum seluruh indonesia	30 januari 2023 s/d 11 februari 2023
2	SUL AHMAD, S.H.	PANITERA	Pelatihan panitera pengadilan angkatan i	13 november 2023 s/d 27 november 2023
3	WAHYU AGUNG MULIAWAN, S.H.	HAKIM	Pelatihan hakim berkelanjutan i (cje i) peradilan umum seluruh indonesia	30 januari 2023 s/d 11 februari 2023
4	YOSHITO SIBURIAN, S.H.	HAKIM	Pelatihan hakim berkelanjutan i (cje i) peradilan umum seluruh indonesia	30 januari 2023 s/d 11 februari 2023

		Pelatihan smart asn "english communication skills for the indonesia civil service (ecscs) tahun 2023	20 februari 2023 s/d 24 februari 2023
--	--	--	---------------------------------------

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	BAMBANG ARI FERNANDO, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Ppk) Tahun 2023	25 september 2023 s/d 25 oktober 2023
2	FIRSTIKA HERINSY MARTHA, S.Kom	Kasubag Ptip	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Sakip Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	12 april 2023
3	YETRI, S.H.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Sakip Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	12 april 2023
			Pelatihan pengelolaan barang milik negara batch ii	15 mei 2023 s/d 17 mei 2023

12) Pengadilan Negeri Tanjung Pati

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	INDRIANI, S.H.,M.Kn	Wakil Ketua	Pelatihan Aplikasi e-Court	13 Februari 2023
2	JAFRI ZEN, S.H	Panitera		
3	ANDIRA MARDHIAH, S.Kom	Jurusita Pengganti		
4	ANDIRA MARDHIAH, S.Kom	Jurusita Pengganti	Pelatihan jarak jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) secara Online	20 s.d 24 Februari 2023
5	DESKA RINA, S.Kom	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Diklat Manajemen ASN	7 s.d 17 Maret 2023
6	ADEK NURHADI, S.H.	Ketua		

7	ERICK ANDHIKA, S.H.,M.Kn	Hakim	Bimtek Hukum Adat di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	15 Maret 2023
8	HENKI SITANGGANG, S.H	Hakim		
9	LINGGA FEBRIYANTI, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelatihan jarak jauh Pejabat Pembuat Komitmen Periode III Tahun 2023 secara online	13 s.d 17 Maret 2023
10	SUPITUARMAN, S.E.	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	15 s.d 17 Mei 2023
11	ADEK NURHADI, S.H.	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia secara Blended Learning	5 s.d 31 Mei 2023
12	INDRIANI, S.H.,M.Kn	Wakil Ketua	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum	22 s.d 24 Mei 2023
13	ERICK ANDHIKA, SH.,M.KN	Hakim		
14	IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H.	Hakim		
15	M. HARIS	Jurusita Pengganti	Bimbingan Teknis SAKTI Modul Pelaksanaan	25 Mei 2023
16	LINGGA FEBRIYANTI, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	8 s.d 24 Agustus 2023
17	FIRMAN HAKIM, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan		
18	RAHMA YANI, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara		
19	ANDIRA MARDHIAH, S.Kom	Jurusita Pengganti	Diklat Jurusita/Jurusita Pengganti	25 September s.d 7 Oktober 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	AULIA ALFACRISY, S.H	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) secara Blended Learning	20 Maret s.d 7

				Agustus 2023
2	ANDIRA MARDHIAH, S.Kom	Jurusita Pengganti	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan VI dari Tempat Tugas	25 s.d 31 Mei 2023

13) Pengadilan Negeri Koto Baru

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Ade Rizky Fachreza, S.H.	Hakim	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE) Peradilan Umum	30 Januari 2023
2	Dharma Setiawan, S.H., C.N.	Ketua	Bimbingan Teknis Hukum adat Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	13 Maret 2023
3	Radius Chandra, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum	05 Mei 2023 – 31 Mei 2023
4	Timbul Jaya, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum	22 Mei 2023 – 24 Mei 2023
5	Melina Safitri, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum	22 Mei 2023 – 24 Mei 2023

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Desmina Simamora, S.H.	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	14 Mei 2023 – 17 Mei 2023
2	Rudolf Raja Sitorus, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara	28 Juni 2023 – 03 Juli 2023
3	Candra Widiyanto, S.Kom.	Pranata Komputer	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20 Agustus 2023 – 24 Agustus 2023
4	Ratna Nila Sari, S.H.	Kasubbag Kepegawaian	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20 Agustus 2023 – 24 Agustus 2023

14) Pengadilan Negeri Muaro
a) Diklat Teknis

No	Nama	Nama Diklat	Waktu
1	Ery Acoka Bharata, SH, SE, MH	Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum	10 s.d. 14 April 2023 dan 2 s.d 13 Mei 2023
2	Ery Acoka Bharata, SH, SE, MH	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum Lingkungan Peradilan Umum	22 s.d 24 Mei 2023
3	Parulian Scott Lumbantobing, SH	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum Lingkungan Peradilan Umum	22 s.d 24 Mei 2023
4	Fa'iz Dimas Arya Putra, SH	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum Lingkungan Peradilan Umum	22 s.d 24 Mei 2023
5	Ery Acoka Bharata, SH, SE, MH	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum	11 s.d. 24 Juni 2023
6	Silvi Nirmalasari, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Pertama Peradilan Umum	26 s.d. 28 Juli 2023 dan 31 Juli s.d 5 Agustus 2023.
7	Ery Acoka Bharata, SH, SE, MH	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	19 November 2023 s.d. 02 Desember 2023

b) Diklat Non Teknis

No	Nama	Nama Diklat	Waktu
1	Riko Oktria, SH	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	25 s.d 31 Mei 2023
2	Dini Oktorina, SE	Pelatihan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Wilayah Sumatera Barat	8 s.d 19 Agustus 2023 dan 20 s.d 24 Agustus 2023
3	Fifi Elsyia Fianti, SE	Pelatihan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Wilayah Sumatera Barat	8 s.d 19 Agustus 2023 dan 20 s.d 24 Agustus 2023

15) **Pengadilan Negeri Pasaman Barat**

a) Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Hilman Maulana Yusuf, S.H.	Hakim	Bimtek Hukum Adat	15 Maret 2023
2	Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan hukum lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023	22 s.d 24 Mei 2023
3	Arny Dewi Purnamasari, S.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan hukum lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023	22 s.d 24 Mei 2023

4	Nadia Sekar Wigati, S.H.	Hakim	Bimtek Perempuan Berhadapan dengan hukum lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023	22 s.d 24 Mei 2023
---	-----------------------------	-------	--	--------------------

b) Diklat Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Ani Marie, S.H.	Sekretaris	Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI Wilayah Jakarta I s.d IV Tahun 2023	15 s.d 17 Mei 2023
2	Neli Astri, S.H.	Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Diklat PBJ Wilayah Sumbar	8 s.d 24 Agustus 2023
			Pelatihan Jarak Jauh PPK Tahun 2023	24 s.d 30 November 2023
3	Zulhadi Saputra, S.E., M.M.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Diklat PBJ Wilayah Sumbar	8 s.d 24 Agustus 2023
4	Elsa Magdalena Sinurat, A.Md.A.B.	Fungsional Arsiparis Pelaksana	Diklat PBJ Wilayah Sumbar	8 s.d 24 Agustus 2023
5	Dini Hayati, S.Kom	Pranata Komputer	Diklat PBJ Wilayah Sumbar	8 s.d 24 Agustus 2023

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFROMASI

A. Pengelolaan Keuangan DIPA 01 dan 03

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat 3 (tiga) program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01 BUA)
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01 BUA)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03 BADILUM)

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel - tabel berikut:

NO	Satuan Kerja	Pagu 2023	Realisasi	Sisa	% Capaian
1	Pengadilan Negeri Padang	13.441.216.000	13.429.591.021	11.624.979	99,91
2	Pengadilan Negeri Pariaman	5.889.951.000	5.887.850.814	2.100.186	99,96
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	6.803.424.000	6.797.103.356	6.320.644	99,91
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	4.365.185.000	4.209.890.066	155.294.934	96,44
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4.377.393.000	4.372.404.580	4.988.420	99,89
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4.148.913.000	4.132.252.377	16.660.623	99,60
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	4.356.700.000	4.308.562.764	48.137.236	98,90
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	4.724.569.000	4.649.664.193	74.904.807	98,41

9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	4.308.585.000	4.277.550.317	31.034.683	99,28
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	4.020.049.000	4.014.003.168	6.045.832	99,85
11	Pengadilan Negeri Painan	4.478.131.000	4.289.778.344	188.352.656	95,79
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	4.499.753.000	4.452.765.082	46.987.918	98,96
13	Pengadilan Negeri Solok	4.260.302.000	4.196.880.108	63.421.892	98,51
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3.544.591.000	3.539.027.046	5.563.954	99,84
15	Pengadilan Negeri Muaro	4.009.580.000	3.851.717.599	157.862.401	96,06
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	4.365.185.000	4.209.890.066	155.294.934	96,44
	TOTAL	81.593.527.000	80.618.930.901	974.596.099	98,81

Tabel 2. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2023.

No	Satuan Kerja	Pagu 2023	Realisasi	Sisa	%Capaian
1	Pengadilan Negeri Padang	13.441.216.000	13.429.591.021	11.624.979	99,91
2	Pengadilan Negeri Pariaman	215.900.000	214.979.200	920.800	99,57
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	102.900.000	102.899.000	1.000	99,999
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	113.070.000	110.469.650	2.600.350	97,70
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	215.000.000	215.000.000	-	100,00
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	57.600.000	57.279.900	320.100	99,44
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	49.950.000	49.714.750	235.250	99,53
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	88.500.000	88.469.200	30.800	99,97
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	142.500.000	142.410.500	89.500	99,94

10	Pengadilan Negeri Batusangkar	88.500.000	88.500.000	-	100,000
11	Pengadilan Negeri Painan	106.000.000	81.680.014	24.319.986	77,06
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	140.900.000	139.291.000	1.609.000	98,86
13	Pengadilan Negeri Solok	47.610.000	46.954.150	655.850	98,62
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	57.000.000	56.813.000	187.000	99,67
15	Pengadilan Negeri Muaro	63.600.000	63.547.500	52.500	99,92
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	113.070.000	110.469.650	2.600.350	97,70
	TOTAL	14.930.246.000	14.887.598.885	42.647.115	99,71

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

*Tabel Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor
Wilayah Pengadilan Tinggi Padang*

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	PENGADILAN TINGGI PADANG			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	7	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang Utama	1	Buah	Baik
7	Ruang Sidang umum	-	Buah	Baik
8	Ruang Sidang Anak	-	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	2	Buah	Baik
12	Ruang Kepaniteraan PHI	-	Buah	Baik
13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	Buah	Baik
14	Ruang Panitera Pengganti	2	Buah	Baik
15	Ruang Jurusita	-	Buah	Baik

16	Ruang Kepegawaian dan Perencanaan	2	Buah	Baik
17	Ruang Umum dan Keuangan	2	Buah	Baik
18	Ruang Server	1	Buah	Baik
19	Ruang Panmud Pidana	-	Buah	Baik
20	Ruang Panmud Perdata	-	Buah	Baik
21	Ruang Panmud Hukum	-	Buah	Baik
22	Ruang Panmud PHI	-	Buah	Baik
23	Ruang Panmud Tipikor	-	Buah	Baik
24	Ruang Kasub Umum	-	Buah	Baik
25	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	-	Buah	Baik
26	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	-	Buah	Baik
27	Ruang Bendahara	-	Buah	Baik
28	Ruang Mediasi	-	Buah	Baik
29	Ruang Kaukus	-	Buah	Baik
30	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
31	Ruang Arsip	2	Buah	Baik
32	Ruang Jaksa	-	Buah	Baik
33	Ruang Polisi	-	Buah	Baik
34	Ruang Posbakum	-	Buah	Baik
35	Ruang Advokat/Pengacara	-	Buah	Baik
36	Ruang Tahanan	-	Buah	Baik
37	Ruang Penjaga Tahanan	-	Buah	Baik
38	Ruang Barang Bukti	-	Buah	Baik
39	Ruang Laktasi	-	Buah	Baik
40	Ruang Teleconference	1	Buah	Baik
41	Ruang Control Audio	-	Buah	Baik
42	Ruang ATK	1	Buah	Baik
43	Ruang M.E	-	Buah	Baik
44	Toilet	10	Buah	Baik
45	Toilet Difable	1	Buah	Baik
46	Mushola	1	Buah	Baik
47	Tempat Wudhuk	1	Buah	Baik
48	Ruang Penyimpanan	1	Buah	Baik
49	Aula	-	Buah	Baik
50	Ruang Tunggu PTSP	1	Buah	Baik
51	Ruang Tunggu Terbuka	1	Buah	Baik
52	Ruang Tunggu Anak	-	Buah	Baik
53	Ruang PTSP	1	Buah	Baik

54	Ruang Kasir	-	Buah	Baik
55	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
56	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1	Buah	Baik
57	Ruang Makan Hakim	-	Buah	Baik
58	Ruang Istirahat Ketua	-	Buah	Baik
59	Ruang Istirahat Wakil Ketua	-	Buah	Baik
60	Ruang Istirahat Security	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Gedung			
1	Lemari	57	Unit	Baik
2	Rak Besi	11	Unit	Baik
3	Brandkas	1	Unit	Baik
4	Mobile File	11	Unit	Baik
5	Tabung Pemadam Api	10	Unit	Baik
6	CCTV	1	Set	Baik
7	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
8	LCD Projector/Infocus	2	Set	Baik
9	Meja Kerja Kayu	82	Unit	Baik
10	Kursi	237	Unit	Baik
11	Meja Sidang	9	Unit	Baik
12	Meja Resepsionis	2	Unit	Baik
13	AC	63	Unit	Baik
14	AC Standing	2	Unit	Baik
15	Genset	1	Unit	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	PC Komputer	68 Unit	Unit	Baik
2	Laptop	32 Unit	Unit	Baik
3	Printer	27 Unit	Unit	Baik
4	Scanner	4 Unit	Unit	Baik
5	Microphone Table Stand	1 Set	Set	Baik
6	Sound System	2 Set	Set	Baik
7	Telephone (PABX)	21 Unit	Unit	Baik
8	Handy Talky (HT)	10 Unit	Unit	Baik
9	Kamera Digital	1 Unit	Unit	Baik
10	Kamera Conference	1 Unit	Unit	Baik
2	PENGADILAN NEGERI PADANG			
	Sarana Fasilitas Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik

3	Ruang Hakim	3	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang Utama	1	Buah	Baik
7	Ruang Sidang umum	6	Buah	Baik
8	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
12	Ruang Kepaniteraan PHI	1	Buah	Baik
13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	Buah	Baik
14	Ruang Panitera Pengganti	2	Buah	Baik
15	Ruang Jurusita	1	Buah	Baik
16	Ruang Kepegawaian, Ortala gabung dengan	1	Buah	Baik
17	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Buah	Baik
18	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
19	Ruang Server	1	Buah	Baik
20	Ruang Panmud Pidana	1	Buah	Baik
21	Ruang Panmud Perdata	1	Buah	Baik
22	Ruang Panmud Hukum	1	Buah	Baik
23	Ruang Panmud PHI	1	Buah	Baik
24	Ruang Panmud Tipikor	1	Buah	Baik
25	Ruang Kasub Umum	1	Buah	Baik
26	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	1	Buah	Baik
27	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Buah	Baik
28	Ruang Bendahara	1	Buah	Baik
29	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
30	Ruang Kaukus	1	Buah	Baik
31	Ruang Perpusakaan	3	Buah	Baik
32	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
33	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
34	Ruang Polisi	1	Buah	Baik
35	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
36	Ruang Advokat/ Pengacara	5	Buah	Baik
37	Ruang Tahanan	2	Buah	Baik
38	Ruang Penjaga Tahanan	1	Buah	Baik
39	Ruang Barang Bukti	1	Buah	Baik

40	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
41	Ruang Teleconference	1	Buah	Baik
42	Ruang Control Audio	1	Buah	Baik
43	Ruang ATK	2	Buah	Baik
44	Ruang M.E	28	Buah	Baik
45	Toilet	2	Buah	Baik
46	Toilet Difable	1	Buah	Baik
47	Mushola	1	Buah	Baik
48	Tempat Wudhuk	4	Buah	Baik
49	Ruang Penyimpanan	1	Buah	Baik
50	Aula	1	Buah	Baik
51	Ruang Tunggu PTSP	2	Buah	Baik
52	Ruang Tunggu Terbuka	1	Buah	Baik
53	Ruang Tunggu Anak	1	Buah	Baik
54	Ruang PTSP	1	Buah	Baik
55	Ruang Kasir	2	Buah	Baik
56	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
57	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1	Buah	Baik
58	Ruang Makan Hakim	1	Buah	Baik
59	Ruang Istirahat Ketua	1	Buah	Baik
60	Ruang Istirahat Wakil Ketua	1	Buah	Baik
61	Ruang Istirahat Security	-	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Kursi Roda	2	Unit	Baik
2	Termometer Governmen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	3	Unit	Baik
3	Loup	1	Unit	Baik
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	Unit	Baik
5	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	5	Unit	Baik
6	Mesin Penghitung Uang	1	Unit	Baik
7	Mesin Fotocopy Electronic	2	Unit	Baik
8	Lemari Besi/Metal	15	Unit	Baik
9	Lemari Kayu	144	Unit	Baik
10	Rak Besi	1	Unit	Baik
11	Rak Kayu	39	Unit	Baik
12	Filing Cabinet Besi	15	Unit	Baik

13	Filing Cabinet Kayu	4	Unit	Baik
14	Brandkas	5	Unit	Baik
15	Mobile File	4	Unit	Baik
16	CCTV - Camera Control Television System	3	Set	Baik
17	Papan Visual/Papan Nama	9	buah	Baik
18	White Board	20	Buah	Baik
19	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
20	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Baik
21	Panic Button System, Alarm Indicator	1	Unit	Baik
22	Mesin Antrian	1	Unit	Baik
23	Tongkat Pedel	16	Unit	Baik
24	Perkakas Kantor Lainnya	8	Unit	Baik
25	Alat Kantor Lainnya	6	Unit	Baik
26	Meja Kerja Kayu	183	Unit	Baik
27	Kursi Besi/Metal	565	Unit	Baik
28	Kursi Kayu	114	Unit	Baik
29	Sice	19	Unit	Baik
30	Bangku Panjang Besi/Metal	8	Unit	Baik
31	Bangku Panjang Kayu	71	Unit	Baik
32	Meja Rapat	50	Unit	Baik
33	Meja Komputer	13	Unit	Baik
34	Meja Telepon	1	Unit	Baik
35	Meja Resepsionis	2	Unit	Baik
36	Kasur/Spring Bed	3	Unit	Baik
37	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	Unit	Baik
38	Partisi	2	Unit	Baik
39	Nakas	3	Unit	Baik
40	Cubikal	18	Unit	Baik
41	Sofa	8	Unit	Baik
42	Jam Elektronik	17	Unit	Baik
43	A.C. Window	2	Unit	Baik
44	A.C. Split	38	Unit	Baik
45	Kipas Angin	27	Unit	Baik
46	Televisi	8	Unit	Baik
47	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Unit	Baik
48	Loudspeaker	10	Unit	Baik
49	Sound System	3	Set	Baik

50	Wireless	1	Set	Baik
51	Microphone	7	Set	Baik
52	Mic Conference	1	Set	Baik
53	Lambang Garuda Pancasila	4	buah	Baik
54	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	buah	Baik
55	Tiang Bendera	17	buah	Baik
56	Kaca Hias	5	buah	Baik
57	Dispenser	2	buah	Baik
58	Mimbar/Podium	2	buah	Baik
59	Palu Sidang	4	buah	Baik
60	Lambang Instansi	1	buah	Baik
61	Karpet	4	buah	Baik
62	Kabel Roll	1	buah	Baik
63	Bracket Standing Peralatan	1	buah	Baik
64	Audio Mixing Console	3	buah	Baik
65	Audio Visual	1	buah	Baik
66	Microphone/Wireless MIC	15	buah	Baik
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	15	buah	Baik
68	Head Set	1	buah	Baik
69	Camera Digital	1	buah	Baik
70	LCD Monitor	1	buah	Baik
71	Camera Conference	2	buah	Baik
72	Pesawat Telephone	22	buah	Baik
73	Handy Talky (HT)	10	buah	Baik
74	Facsimile	3	buah	Baik
75	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	3	buah	Baik
76	Network Monitoring System	1	buah	Baik
77	Switcher Combination	7	buah	Baik
78	Genset	1	buah	Baik
79	Internet	1	buah	Baik
80	Komputer Jaringan Lainnya	1	buah	Baik
81	P.C Unit	127	buah	Baik
82	Lap Top	45	buah	Baik
83	Monitor	4	buah	Baik
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	70	buah	Baik
85	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	buah	Baik
86	Server	4	buah	Baik
87	Router	2	buah	Baik

88	Hub	2	buah	Baik
89	Rak Server	1	buah	Baik
90	Kabel UTP	3	buah	Baik
91	Wireless IP Camera	2	buah	Baik
92	Kursi Roda	2	buah	Baik
93	Termometer Governen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	3	buah	Baik
94	Loup	1	buah	Baik
95	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	buah	Baik
96	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	5	buah	Baik
97	Mesin Penghitung Uang	1	buah	Baik
98	Mesin Fotocopy Electronic	2	buah	Baik
99	Lemari Besi/Metal	15	buah	Baik
3	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang Umum	3	Buah	Baik
7	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
8	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
12	Ruang Kepaniteraan	1	Buah	Baik
13	Ruang Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	Buah	Baik
14	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	Buah	Baik
15	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
16	Ruang Server	1	Buah	Baik
17	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
18	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
19	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
20	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
21	Ruang Polisi	1	Buah	Baik
22	Ruang Pengacara	2	Buah	Baik

23	Ruang Tahanan	-	Buah	Baik
24	Ruang Barang Bukti	1	Buah	Baik
25	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
26	Toilet Ketua	1	Buah	Baik
27	Toilet Wakil Ketua	2	Buah	Baik
28	Toilet Hakim	1	Buah	Baik
29	Toilet Panitera	1	Buah	Baik
30	Toilet Sekretaris	2	Buah	Baik
31	Toilet Pegawai	2	Buah	Baik
32	Toilet Umum	4	Buah	Baik
33	Toilet Tahanan		Buah	Baik
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran				
1	Videoscope With Side Band Adaptor	1	Set	Baik
2	Scanner (Universal Tester)	2	Unit	Baik
3	Neraca Percisi (Elektronik Vacum Me)	1	Unit	Baik
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	Unit	Baik
5	Mesin Fotocopy Electronic	1	Unit	Baik
6	Lemari Kayu	35	Unit	Baik
7	Filling Cabinet Besi	8	Unit	Baik
8	Barndkas	3	Unit	Baik
9	Tabung Pemadam Api	7	Unit	Baik
10	CCTV	10	Set	Baik
11	Papan Nama/Papan Visual	23	Buah	Baik
12	White Board	9	Buah	Baik
13	Mesin Absensi	2	Buah	Baik
14	Perkakas Kantor Lainnya	35	Unit	Baik
15	Meja Kerja Kayu	99	Unit	Baik
16	Kursi Besi/Metal	309	Unit	Baik
17	Kursi Kayu	33	Unit	Baik
18	Sice	9	Unit	Baik
19	Bangku Panjang Besi/Metal	4	Unit	Baik
20	Bangku Panjang Kayu	43	Unit	Baik
21	Meja Komputer	5	Unit	Baik
22	Meja Resepsionis	2	Unit	Baik
23	Partisi	2	Unit	Baik
24	Jam Elektronik	8	Unit	Baik
25	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik

26	AC Window	8	Unit	Baik
27	AC Split	17	Unit	Baik
28	Kipas Angin	5	Unit	Baik
29	Televisi	4	Unit	Baik
30	Amplifier	1	Unit	Baik
31	Loudspeaker	1	Unit	Baik
32	Sound System	4	Unit	Baik
33	Megaphone	1	Unit	Baik
34	Microphone	1	Unit	Baik
35	Microphone Table Stand	1	Unit	Baik
36	Mic Conference	5	Unit	Baik
37	Lambang Garuda Pancasila	4	Unit	Baik
38	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Unit	Baik
39	Tiang Bendera	6	Unit	Baik
40	Kaca Hias	4	Unit	Baik
41	Palu Sidang	4	Unit	Baik
42	Lambang Instansi	2	Unit	Baik
43	Vertical Blind	225	Unit	Baik
44	Intercom Unit	3	Unit	Baik
45	Uninterruptible Power Suply (UPS)	6	Unit	Baik
46	LCD Monitor	1	Unit	Baik
47	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
48	Facsimile	1	Unit	Baik
49	Genset	1	Unit	Baik
50	Internet	1	Unit	Baik
51	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
52	P.C. Unit	30	Unit	Baik
53	Lap Top	16	Unit	Baik
54	Note Book	2	Unit	Baik
55	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	Unit	Baik
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	Unit	Baik
58	Server	1	Unit	Baik
59	Router	1	Unit	Baik
60	Alat Tenis Meja	1	Unit	Baik
61	Monografi	13	Unit	Baik
62	Kios K	1	Unit	Baik

4	PENGADILAN NEGERI BUKITINGGI			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	2	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang Umum	3	Buah	Baik
7	Ruang Kepaniteraan	3	Buah	Baik
8	Ruang Kesekretariatan	3	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer	51	Unit	Baik
2	Laptop	18	Unit	Baik
3	Notebook	1	Unit	Baik
4	Server	3	Unit	Baik
5	Infokus	1	Unit	Baik
6	PABX	1	Unit	Baik
7	Mesin Fotocopy	1	Unit	Baik
8	AC Split	5	Unit	Baik
9	AC Window	5	Unit	Baik
10	Printer	39	Unit	Baik
11	Scanner	6	Unit	Baik
12	Facsimile	1	Unit	Baik
13	Genset	2	Unit	Baik
14	UPS	14	Unit	Baik
5	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang PTSP	1	Buah	Baik
2	Ruang Sidang Umum	2	Buah	Baik
3	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
4	Ruang Mediasi, Diversi, Kaukus	1	Buah	Baik
5	Ruang Tunggu Sidang	1	Buah	Baik
6	Ruang Tahanan	1	Buah	Baik
7	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
8	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
9	Ruang Ramah Anak dan Laktasi	1	Buah	Baik
10	Ruang Klinik Kesehatan	1	Buah	Baik

11	Toilet	11	Buah	Baik
12	Ruang Kerja	12	Buah	Baik
13	Ruang Pustaka	1	Buah	Baik
14	Ruang Dharmayukti Karini	1	Buah	Baik
15	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
16	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
17	Ruang Gudang	2	Buah	Baik
18	Mushola	1	Buah	Baik
19	Ruang Server	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Meja Kerja Kayu	44	Unit	Baik
2	Kursi	102	Unit	Baik
3	Internet	1	Unit	Baik
4	PC Unit	24	Unit	2 Unit Rusak Ringan
5	Laptop	20	Unit	3 Unit Rusak Ringan
6	Printer	20	Unit	Baik
7	Scanner	4	Unit	Baik
8	CCTV	4	Set	Baik
9	Server	2	Set	Baik
10	Dispenser	6	Buah	Baik
11	Audio Mixing Console	1	Set	Baik
12	Infocus	1	Set	Baik
13	UPS	2	Unit	Baik
14	LCD Monitor	1	Set	Baik
15	Camera Conference	1	Set	Baik
16	Televisi	2	Unit	Baik
17	AC Split	18	Unit	Baik
18	Kipas Angin	10	Unit	Baik
19	Microphone	6	Unit	Baik
20	Mesin Fotocopy (sewa)	1	Unit	Baik
21	Router	1	Unit	Baik
6	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	3	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik

5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
9	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
10	Ruang Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
11	Ruang Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	Buah	Baik
12	Ruang Sidang Cakra	1	Buah	Baik
13	Ruang Sidang Candra	1	Buah	Baik
14	Ruang Sidang Sari	1	Buah	Baik
15	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
16	Ruang Server	1	Buah	Baik
18	Ruang Tamu Terbuka	2	Buah	Baik
19	Ruang Tahanan	2	Buah	- Ruang Tahanan Pria
				- Ruang Tahanan Wanita
20	Ruang Tunggu Anak	1	Buah	Baik
21	Ruang Klinik	1	Buah	Baik
22	Ruang Menyusui (Laktasi)	1	Buah	Baik
23	Ruang Tunggu Jaksa, Peksus, dan Bapas	1	Buah	Baik
24	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
25	Ruang Tunggu Pengacara	1	Buah	Baik
26	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1	Buah	Baik
27	Ruang Kaukus	1	Buah	Baik
28	Ruang Arsip Kepaniteraan	1	Buah	Baik
29	Ruang Pustaka	1	Buah	Baik
30	Ruang Tunggu Hakim	1	Buah	Baik
32	Ruang Command Centre	1	Buah	Baik
34	Toilet	9	Buah	Baik
35	Mushalla	1	Buah	Baik
36	Kantin	1	Buah	Baik
37	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	Buah	Baik
38	Toilet difabel	2	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			

1	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
2	Transportable Generating Set	2	Unit	Baik
3	Lemari Besi/ Metal	21	Unit	Baik
4	Lemari Kayu	23	Unit	Baik
5	Filling Cabinet Besi	12	Unit	Baik
6	Brandkas	2	Unit	Baik
7	Roll Opek	3	Unit	Baik
8	CCTV	2 DVR	Set	Baik
9	CCTV	2	Set	Baik
10	Papan Visual/Papan Nama	2	Set	Baik
11	Mesin Absensi	1	Buah	Baik
12	Hand Metal Detector	1	Buah	Baik
13	Lcd Projector/ Infocus	1	Set	Baik
14	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
15	Meja Kerja Kayu	44	Unit	Baik
16	Kursi Besi/ Metal	119	Unit	Baik
17	Kursi Kayu	34	Unit	Baik
18	Sice	6	Unit	Baik
19	Bangku Panjang Kayu	9	Unit	Baik
20	Meja Komputer	4	Unit	Baik
21	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
22	Kasur/Spring Bed	3	Unit	Baik
23	Publik Astari (pembatas antrian)	1	Unit	Baik
24	Lemari Es	1	Unit	Baik
25	Lemari Es	2	Unit	Baik
26	A.C. Split	22	Unit	Baik
27	Kipas Angin	10	Unit	Baik
28	Televisi	4	Unit	Baik
29	Loud Speaker	1	Unit	Baik
30	Sound System	2	Unit	Baik
31	Stabilisator	1	Unit	Baik
32	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
33	Gordyin/kray	1	Unit	Baik
34	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
35	Tangki Air	2	Unit	Baik
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Unit	Baik
37	Camera Digital	1	Unit	Baik
38	Mesin Potong	1	Unit	Baik

39	Telephone PABX	1	Unit	Baik
40	Finger Printer Time abd Attendance Acces Control System	2	Unit	Baik
41	Internet	1	Unit	Baik
42	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
43	P.C Unit	21	Unit	Baik
44	Lap Top	11	Unit	Baik
45	Scanner Peralatan Mini Komputer	1	Unit	Baik
46	Printer Peralatan Personal Komputer	21	Unit	Baik
47	Scanner Peralatan Personal Komputer	1	Unit	Baik
48	Server	3	Unit	Baik
49	Router	1	Unit	Baik
50	Rak Server	1	Unit	Baik
51	Software Komputer	1	Unit	Baik
7	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	3	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Humas	0	Buah	Baik
7	Ruang Sidang Umum	2	Buah	Baik
8	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
12	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
13	Ruang Tamu Terbuka	1	Buah	Baik
14	Ruang Command Center	1	Buah	Baik
15	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
16	Ruang Sel Tahanan	2	Buah	Baik
17	Ruang Tunggu Anak	2	Buah	Baik
18	Ruang Klinik	1	Buah	Baik
19	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
20	Ruang Pengacara/Posyankum	1	Buah	Baik
21	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1	Buah	Baik

22	Ruang Laktasi/Menyusui	1	Buah	Baik
23	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Buah	Baik
24	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	Buah	Baik
25	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
26	Ruang Persediaan	1	Buah	Baik
27	Ruang Server	1	Buah	Baik
28	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
29	Toilet Ketua	1	Buah	Baik
30	Toilet Ketua	1	Buah	Baik
31	Toilet Hakim	2	Buah	Baik
32	Toilet Difabel	1	Buah	Baik
33	Toilet Pegawai	2	Buah	Baik
34	Toilet Pengunjung	2	Buah	Baik
35	Musholla	1	Buah	Baik
36	Toilet Musholla	2	Buah	Baik
37	Ruang Wudhu Musholla	2	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	X-Tal Detector	1	Unit	Rusak Berat
2	Mesin Ketik (11-13 inci)	1	Unit	Rusak Berat
3	Mesin Ketik (14-16 inci)	1	Unit	Rusak Berat
4	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
5	Lemari Besi Metal	18	Unit	Baik
6	Lemari Kayu	23	Unit	Baik
7	Rak Besi	5	Unit	Baik
8	Rak Kayu	3	Unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	4	Unit	Baik
10	Brandkas	3	Unit	Baik
11	Tabung Pemadam Api	3	Unit	Baik
12	CCTV	2	Set	Baik
13	Papan Visual/Papan Nama	12	Unit	Baik
14	Whiteboard	2	Unit	Baik
15	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
16	Hand Metal Detector	2	Unit	Rusak Berat
17	Infocus	1	Set	Baik
18	Meja Kayu	65	Unit	Baik
19	Kursi Besi/Metal	173	Unit	Baik
20	Kursi Kayu	23	Unit	Baik
21	Sice	5	Unit	Baik

22	Bangku Panjang Besi/Metal	30	Unit	Baik
23	Meja Rapat	4	Unit	Baik
24	Meja Komputer	16	Unit	Baik
25	Tempat Tidur Kayu	1	Unit	Baik
26	Meja Receptionis	3	Unit	Baik
27	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
28	Lemari Es	2	Unit	Baik
29	AC Split	17	Unit	Baik
30	Televisi	2	Unit	Baik
31	Sound System	2	Unit	Baik
32	Wireless	1	Unit	Baik
33	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit	Baik
34	Tiang Bendera	8	Unit	Baik
35	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
36	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
37	Gordyn/Kray	3	Unit	Baik
38	UPS	10	Unit	Baik
39	Camera Digital	1	Unit	Baik
40	Contact Printer	1	Unit	Baik
41	Pesawat Telepon	11	Unit	Baik
42	Faximile	2	Unit	Baik
43	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
44	PC Unit	48	Unit	Baik
45	Laptop	24	Unit	Baik
46	Komputer Unit Lainnya	1	Unit	Baik
47	Printer	31	Unit	Baik
48	Scanner	3	Unit	Baik
49	Server	2	Unit	Baik
50	Router	1	Unit	Baik
51	Rak Server	1	Unit	Baik
52	Genset	1	Unit	Baik
53	Alat Bantu Dengar dan Smarthphone	2	Unit	Baik
54	Komputer Jaringan lainnya	1	Unit	Baik
55	Load Speaker	4	Unit	Baik
56	Microphone	7	Unit	Baik
57	LCD Monitor	1	Set	Baik
58	Tripod Camera	1	Unit	Baik
59	Camera Video	2	Unit	Baik
60	Contact Printer	1	Unit	Baik
8	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG			

	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
7	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
10	Ruang PTIP	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	Buah	Baik
12	Ruang Dharmayukti Karini	1	Buah	Baik
13	Ruang Persediaan	1	Buah	Baik
14	Ruang Ajudan	1	Buah	Baik
15	Ruang Sidang	3	Buah	Baik
16	Ruang Tahanan	2	Buah	Baik
17	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
18	Ruang Lobby	1	Buah	Baik
19	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
20	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
21	Ruang Polisi	1	Buah	Baik
22	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
23	Ruang Server	1	Buah	Baik
24	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
25	Ruang Arsip	2	Buah	Baik
26	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
27	Ruang Barang Bukti	1		Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Pompa Air Pmk	3	Unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
2	Lemari Kayu	35	Unit	15 Baik, 20 Rusak Ringan
3	Rak Kayu	6	Unit	2 baik , 4 Rusak Ringan
4	Brandkas	3	Unit	2 Baik ,1 Rusak berat
5	Tabung Pemadam Api	4	Unit	4 Baik
6	Fire Alarm	1	Unit	1 Baik
7	CCTV	4	Set	4 Baik
8	Mesin Absensi	1	Unit	1 Baik

9	Lcd Projector/infocus	1	Set	1 Baik
10	Meja Kerja Kayu	65	Unit	42 Baik, 43 Rusak Ringan
11	Kursi Besi/metal	118	Unit	90 Baik, 28 Rusak Ringan
12	Kursi Kayu	37	Unit	29 Baik , 8 Rusak Ringan, 27 Rusak Berat
13	Sice	8	Unit	6 Baik, 2 rusak ringan
14	Bangku Panjang Kayu	11	Unit	11 Rusak Ringan
15	Meja Rapat	3	Unit	1 Baik , 2 Rusak Ringan
16	Meja Telepon	1	Unit	1 rusak ringan
17	Meja Resepsionis	3	Unit	3 Baik
18	Partisi	2	Unit	2 Rusak Ringan
19	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	1 Rusak ringan
20	Mesin Pemetong Rumput	1	Unit	1 rusak ringan
21	AC Split	20	Unit	18 Baik, 2 Rusak Ringan
22	Televisi	4	Unit	4 Baik
23	Loudspeaker	4	Unit	4 Baik
24	Sound System	2	Unit	2 Baik
25	Unit Power Supply	3	Unit	3 Baik
26	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit	2 Rusak Ringan
27	Tiang Bendera	2	Unit	2 Rusak Ringan
28	Tangga Aluminium	1	Unit	1 Baik
29	Palu Sidang	2	Unit	2 Rusak Ringan
30	Lambang Instansi	1	Unit	1 Baik
31	Audio Mixing Console	1	Unit	1 Baik
32	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	1 Baik
33	UPS	4	Unit	4 Baik
34	Camera Digital	1	Unit	1 Baik
35	Telephone (pabx)	1	Unit	1 Baik
36	Telephone Mobile	2	Unit	2 Baik
37	Facsimile	1	Unit	1 Baik
38	Internet	1	Unit	1 Baik
39	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	1 Baik
40	PC Unit	40	Unit	31 Baik, 9 Rusak Ringan
41	Lap Top	17	Unit	17 Baik

42	Printer	12	Unit	11 Baik , Rusak Ringan 1
43	Scanner	2	Unit	2 Baik
44	Server	3	Unit	3 Baik
45	Router	3	Unit	3 Baik
46	Wireless Access Point	1	Unit	1 Baik
47	Sumur Pemboran Air	1	Unit	1 rusak ringan
48	Monografi	461	Unit	461 Baik
49	Software Komputer	2	Unit	2 Baik
50	Camera Conference	1	Unit	1 Baik
51	Genset	1	Unit	1 rusak ringan
9	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	2	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang Umum	3	Buah	Baik
7	Ruang Kepaniteraan	3	Buah	Baik
8	Ruang Kesekretariatan	3	Buah	Baik
9	Ruang Mediasi/Diversi/Media Center	1	Buah	Baik
10	Ruang Jurusita	0	Buah	Baik
11	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
12	Ruang Jaksa dan Bapas	1	Buah	Baik
13	Ruang Tahanan	2	Buah	Baik
14	Perpustakaan	1	Buah	Baik
15	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
16	Gudang	2	Buah	Baik
17	Ruang tunggu anak	1	Buah	Baik
18	Klinik dan Laktasi	1	Buah	Baik
19	Toilet Ketua	1	Buah	Baik
20	Toilet Wakil Ketua	1	Buah	Baik
21	Toilet Hakim & Pegawai	2	Buah	Baik
22	Toilet Umum (Pengunjung)	3	Buah	Baik
23	Toilet Tahanan	2	Buah	Baik
24	Mushalla (Tempat Ibadah)	1	Buah	Baik
25	Kantin	1	Buah	Baik
26	Smoking Area Umum dan Pegawai	1	Buah	Baik
27	PTSP	1	Buah	Baik

28	Ruang Tamu Terbuka	1	Buah	Baik
29	Ruang Tunggu Pengunjung	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Lemari Kayu	20	Buah	Baik
2	Rak Besi	8	Buah	Baik
3	Transportabel Generating Set	1	Buah	Baik
4	Mesin Fotocopy Folio	1	Buah	Baik
5	Filling Kabinet Kayu	3	Buah	Baik
6	Brandkas	2	Buah	Baik
7	CCTV	1	Set	Kondisi baik ; terdiri dari 16 unit kamera
8	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
9	Hand Metal Detektor	3	Kondisi baik	Baik
10	LCD Projector/Infokus	1	Set	Baik
11	Focusing Screen/Layar LCD Proyektor	1	Set	Baik
12	Perkakas Kantor Lainnya	5	Set	Baik
13	Meja Kerja Kayu	53	Unit	- 49 kondisi baik - 4 kondisi rusak ringan
14	Kursi Besi Metal	110	Unit	Kondisi baik
15	Kursi Kayu	20	Unit	Kondisi baik
16	Sice	6	Unit	- 5 kondisi baik - 1 kondisi rusak ringan
17	Bangku Panjang Kayu	24	Unit	Baik
18	Meja Komputer	6	Unit	Baik
19	Meja Reseptionis	3	Unit	Baik
20	Jam elektronik	2	Unit	Baik
21	Lemari Es	1	Unit	Baik
22	Mesin Pemetong Rumput	1	Unit	Baik
23	A.C Split	19	Unit	Baik
24	Kipas Angin	3	Unit	Baik
25	Televisi	4	Unit	Baik
26	Amplifiere	1	Unit	Baik
27	Loudspeaker	7	Unit	Baik
28	Sound System	3	Unit	Baik
29	Microphone Table Stand	5	Unit	Baik
30	Alat hiasan	1	Unit	Baik
31	Lambang Garuda Pancasila	5	Unit	Baik

32	Gambar Presiden /Wakil Pres	2	Unit	Baik
33	Tiang Bendera	5	Unit	Baik
34	Kaca Hias	1	Unit	Baik
35	Palu sidang	2	Unit	Baik
36	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
37	Vertikal Blint	1	Unit	Baik
38	Audio Visual	1	Unit	Baik
39	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
40	Audio Mixing Console	1	Unit	Baik
41	UPS	5	Unit	Baik
42	Digital LED Running Text	1	Set	Baik
43	LCD Monitor	4	Set	Baik
44	Kamera Conference	5	Unit	Baik
45	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
46	Pesawat Telephone	13	Unit	Baik
47	Facsimile	1	Unit	Baik
48	Internet	1	Unit	Baik
49	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
50	PC Unit	39	Unit	Baik
51	Laptop	23	Unit	Baik
52	Printer	14	Unit	Baik
53	Scanner	4	Unit	Baik
54	Server	2	Unit	Baik
55	Router	1	Unit	Baik
56	Hub	1	Unit	Baik
57	Rak Server	1	Unit	Baik
58	Acces Point	9	Unit	Baik
59	Jaringan Transmisi Lainnya	1	Unit	Baik
60	Monografi	8404	Unit	Baik
10	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	2	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang	3	Buah	Baik
7	Ruang Panmud Pidana	1	Buah	Baik
8	Ruang Panmud Perdata	1	Buah	Baik
9	Ruang Panmud Hukum	1	Buah	Baik

10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
11	Ruang Kasubag Perencanaan ,IT dan Pelaporan	1	Buah	Baik
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
13	Ruang Klinik Kesehatan	1	Buah	Baik
14	Ruang Pos Pelayanan Hukum	1	Buah	Baik
15	Ruang Gasrased/ Dapur	1	Buah	Baik
16	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
17	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
18	Ruang Tunggu Anak	1	Buah	Baik
19	Ruang Ramah Anak / Laktasi	1	Buah	Baik
20	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
21	Ruang Penasehat Hukum	1	Buah	Baik
22	Ruang Bapas	1	Buah	Baik
23	Ruang Tahanan	1	Buah	Baik
24	Ruang Tahanan Anak	2	Buah	Baik
25	Ruang Mediasi / Diversi	1	Buah	Baik
26	Ruang Media center	1	Buah	Baik
27	Ruang Ziiting platz	2	Buah	Suliki dan Pangkalan
28	Ruang Toilet	19	Buah	14 Baik, Rusak Berat
29	Ruang Mushola	1	Buah	Baik
30	Ruang Genset	1	Buah	Baik
31	Ruang Penyimpanan	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27Inc)	5	Unit	Rusak Berat 5
2	Lemari kayu	42	Unit	29 Baik, Rusak Ringan 13
3	Rak kayu	4	Unit	Baik
4	Filing Cabinet besi	7	Unit	5 baik, 2 rusak ringan
5	Brankas	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Ringan
6	Peti uang /cashbox/Coin Box	3	Unit	1 Baik, 2 Rusak Ringan
7	Kardek Besi	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Ringan
8	Buffet	1	Unit	Baik
9	Locker	3	Unit	Baik
10	CCTV	5	Unit	Baik

11	Papan visual/ papan nama	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Ringan
12	White board	14	Unit	4 Baik , 6 Rusak Ringan, Rusak Berat 4
13	Mesin absen	2	Unit	Baik 1, Rusak Ringan 1
14	Hand Metal detector	1	Unit	Baik
15	Perkakas Kantor Lainnya	2	Unit	Baik
16	Meja kayu	97	Unit	62 Baik, 22 Rusak Ringan, 13 Rusak Berat
17	Kursi besi/metal	201	Unit	180 Berat, 21 Rusak Ringan
18	Kursi kayu	187	Unit	140 Baik, 47 Rusak Ringan
19	Sice	22	Unit	20 Baik, 1 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
20	Bangku Panjang besi/metal	12	Unit	Baik
21	Bangku panjang kayu	17	Unit	3 Baik , 7 Rusak Ringan, 7 Rusak Berat
22	Meja rapat	10	Unit	7 Baik, 2 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
23	Meja komputer	11	Unit	8 Baik, 3 Rusak Ringan
24	Meja telepon	1	Unit	Baik
25	Meja Resepsionis	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
26	Partisi	3	Unit	3 Baik
27	Meubelair lainnya	1	Unit	Baik
28	Jam elektronik	17	Unit	13 Baik, 4 Rusak Ringan
29	Mesin penghisap debu	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
30	Mesin potong rumput	1	Unit	Baik
31	Lemari es	2	Unit	Baik
32	Ac Split	19	Unit	Baik
33	Kipas angin	11	Unit	8 Baik , 3 Rusak Berat
34	Kompore gas	1	Unit	Baik
35	Rice cooker	1	Unit	Baik
36	Oven listrik	1	Unit	Baik

37	Televisi	3	Unit	2 baik, 1 rusak Berat
38	Loudspeaker	5	Unit	Baik
39	Sound System	3	Set	Baik
40	Microphone	7	Unit	Baik
41	Lambang Garuda Pancasila	3	Unit	RR=3
42	Tiang bendera	13	Unit	5 Baik, 8 Rusak Ringan
43	Pataka	5	Unit	B=5
44	Kaca hias	9	Unit	6 Baik, 2 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
45	Palu sidang	6	Unit	2 Baik, 3 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
46	Lambang instansi	1	Unit	Baik
47	Vertikal Blind	1	Unit	Baik
48	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
49	Alat Rumah Tangga lainnya	33	Unit	18 Baik, 15 rusak berat
50	Mixing Console	1	Unit	Baik
51	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	Unit	Baik
52	Camera Digital	1	Unit	Baik
53	LCD Monitor	1	Set	Baik
54	Camera Conference	3	Unit	Baik
55	Telepone (PABX)	1	Unit	Baik
56	Pesawat Telephone	15	Unit	Baik
57	Receiver STL/UHF	4	Unit	Rusak Berat
58	Lokal Area Network (LAN)	1	Unit	Rusak Berat
59	P.C unit	35	Unit	33 Baik , 2 Rusak Berat
60	Lap top	19	Unit	18 Baik, 1 Rusak Berat
61	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Rusak Berat
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	Unit	27 Baik, 4 Rusak Berat
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit	3 Baik, 1 Rusak Berat
64	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
65	Server	2	Unit	Baik
66	Router	1	Unit	Baik
67	Rak Server	1	Unit	Baik
68	Switch	4	Unit	Baik

69	Aid Hearing	1	Unit	Baik
70	Monografi	1.913	Unit	1.864 Baik, 49 Rusak Ringan
71	Buku lainnya	6	Unit	Baik
11	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruangan Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruangan Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruangan Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruangan Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruangan Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruangan Sidang Umum	1	Buah	Baik
7	Ruang Sidang Teleconference	1	Buah	Baik
8	Ruangan Sidang Anak	1	Buah	Baik
9	Ruangan Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruangan Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruangan Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
12	Ruangan Kesekretariatan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	Buah	Baik
13	Ruangan Kesekretariatan Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
14	Ruangan Kesekretariatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
15	Ruangan Server	1	Buah	Baik
16	Ruangan Mediasi	1	Buah	Baik
17	Ruangan Posbakum	1	Buah	Baik
18	Ruangan Ibu Menyusui dan Kesehatan	2	Buah	Baik
19	Ruangan Tunggu Anak	1	Buah	Baik
20	Ruangan Tahanan Pria	1	Buah	Baik
21	Ruangan Tahanan Wanita	1	Buah	Baik
22	Ruangan Jaksa	1	Buah	Baik
23	Ruangan Pengacara	1	Buah	Baik
24	Ruangan Tunggu Terbuka	1	Buah	Baik
25	Ruangan Kasir	1	Buah	Baik
26	Ruangan Panitera Pengganti	1	Buah	Baik
27	Ruangan Jurusita Pengganti	1	Buah	Baik
28	Ruangan Arsip	1	Buah	Baik

29	Ruangan Rapat	1	Buah	Baik
30	Pantri	1	Buah	Baik
31	WC	19	Buah	Baik
32	Pustaka	1	Buah	Baik
33	Ruangan Bermain Anak	1	Buah	Baik
34	Smoking Area	2	Buah	Baik
35	Gudang	3	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer	39	Unit	Baik
2	Laptop	40	Unit	Baik
3	Infokus	2	Unit	Baik
4	PABX/Pesawat Telephone	18	Unit	Baik
5	Mesin Ketik	11	Unit	Baik
6	Mesin Fotocopy	2	Unit	Baik
7	AC	56	Unit	Baik
8	Faximili	3	Unit	Baik
9	Genset	2	Unit	Baik
10	Printer	51	Unit	Baik
11	Lemari	51	Unit	Baik
12	Kursi	241	Unit	Baik
13	Meja komputer	14	Unit	Baik
14	Brangkas	3	Unit	Baik
15	Rak	6	Unit	Baik
16	Filing Cabinet	9	Unit	Baik
17	KiosK	1	Unit	Baik
12	PENGADILAN NEGERI PAINAN			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang I	1	Buah	Baik
7	Ruang Sidang II	1	Buah	Baik
8	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik

12	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	Buah	Baik
13	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
14	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
15	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
16	Ruang Arsip Hukum	1	Buah	Baik
17	Ruang Tunggu Anak	1	Buah	Baik
18	Ruang Konseling Anak	-	Buah	Baik
20	Ruang Mediasi/ Diversi	1	Buah	Baik
21	Ruang Tamu Terbuka	1	Buah	Baik
22	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
23	Ruang Server	1	Buah	Baik
24	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
25	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
26	Ruang Tunggu Pengunjung	1	Buah	Baik
27	Ruang Tahanan Pria	1	Buah	Baik
28	Ruang Tahanan Wanita	1	Buah	Baik
29	Ruang Mushalla	1	Buah	Baik
30	Toilet Ketua	1	Buah	Baik
31	Toilet Wakil Ketua	1	Buah	Baik
32	Toilet Disabilitas	1	Buah	Baik
33	Toilet Panitera	-	Buah	Baik
34	Toilet Pegawai	1	Buah	Baik
35	Toilet Pengunjung	3	Buah	Baik
36	Toilet Ruang Sidang Anak	4	Buah	Baik
37	Ruang Bapas	1	Buah	Baik
38	Ruang Peksos	1	Buah	Baik
39	Ruang Pelaku Anak	1	Buah	Baik
40	Ruang Poliklinik	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			Baik
3	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Unit	Baik
4	Lemari Besi/Metal	26	Unit	Baik
5	Lemari Kayu	34	Unit	Baik
6	Rak Besi	25	Unit	Baik
7	Rak Kayu	1	Unit	Baik
8	Filing Cabinet Besi	14	Unit	Baik
9	Brandkas	4	Unit	Baik
10	Mobile File	2	Unit	Baik

11	Lemari Display	1	Unit	Baik
12	Tabung Pemadam Api	5	Unit	Baik
13	CCTV - Camera Control Television System	4	Set	Baik
14	Papan Visual/Papan Nama	2	Unit	Baik
15	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
16	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
17	Hand Metal Detector	1	Unit	Baik
18	Perkakas Kantor Lainnya	9	Unit	Baik
19	Meja Kerja Kayu	80	Unit	Baik
20	Kursi Besi/Metal	159	Unit	Baik
21	Kursi Kayu	24	Unit	Baik
22	Sice	2	Unit	Baik
23	Bangku Panjang Besi/Metal	10	Unit	Baik
24	Bangku Panjang Kayu	29	Unit	Baik
25	Meja Rapat	3	Unit	Baik
26	Meja Ketik	3	Unit	Baik
27	Meja Telepon	1	Unit	Baik
28	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
29	Meubelair Lainnya	3	Unit	Baik
30	Jam Elektronik	18	Unit	Baik
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit	Baik
32	Lemari Es	3	Unit	Baik
33	A.C. Window	4	Unit	Baik
34	A.C. Split	30	Unit	Baik
35	Kipas Angin	11	Unit	Baik
36	Televisi	2	Unit	Baik
37	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	Unit	Baik
38	Loudspeaker	4	Unit	Baik
39	Sound System	1	Set	Baik
40	Microphone	7	Unit	Baik
41	Mic Conference	2	Unit	Baik
42	Kaca Hias	7	Unit	Baik
43	Dispenser	13	Unit	Baik
44	Palu Sidang	3	Unit	Baik
45	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
46	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
47	Audio Mixing Console	1	Unit	Baik

48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	16	Unit	Baik
49	Camera Digital	1	Unit	Baik
50	LCD Monitor	1	Unit	Baik
51	Camera Conference	1	Unit	Baik
52	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
53	Facsimile	2	Unit	Baik
54	Local Area Network (LAN)	1	Unit	Baik
55	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
56	P.C Unit	45	Unit	Baik
57	Lap Top	23	Unit	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Unit	Baik
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit	Baik
60	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Unit	Baik
61	Server	2	Unit	Baik
62	Router	1	Unit	Baik
63	Rak Server	1	Unit	Baik
13	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang I	1	Buah	Baik
7	Ruang Sidang II	1	Buah	Baik
8	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
12	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	Buah	Baik
13	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
14	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
15	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1	Buah	Baik

16	Ruang Arsip Hukum	1	Buah	Baik
17	Ruang Tunggu Anak	1	Buah	Baik
18	Ruang Konseling Anak	1	Buah	Baik
19	Ruang Mediasi/ Diversi	1	Buah	Baik
20	Ruang Tamu Terbuka	1	Buah	Baik
21	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
22	Ruang Server	1	Buah	Baik
23	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
24	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
25	Ruang Tunggu Pengunjung	1	Buah	Baik
26	Ruang Tahanan Pria	1	Buah	Baik
27	Ruang Tahanan Wanita	1	Buah	Baik
28	Ruang Mushalla	1	Buah	Baik
29	Toilet Ketua	1	Buah	Baik
30	Toilet Wakil Ketua	1	Buah	Baik
31	Toilet Disabilitas	1	Buah	Baik
32	Toilet Panitera	1	Buah	Baik
33	Toilet Pegawai	1	Buah	Baik
34	Toilet Pengunjung	1	Buah	Baik
35	Toilet Tunggu Anak	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
2	Lemari Kayu	32	Unit	Baik
3	Rak Besi	10	Unit	Baik
4	Filling Cabinet Besi	16	Unit	Baik
5	Brandkas	2	Unit	Baik
6	CCTV-Camera Control Television System	1	Unit	Baik
7	Papan Visual / Papan Nama	6	Unit	Baik
8	White Board	12	Unit	Baik
9	Peta	1	Unit	Baik
10	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
11	Meja Kerja Besi/Metal	17	Unit	Baik
12	Meja Kerja Kayu	38	Unit	Baik
13	Kursi Besi/Metal	44	Unit	Baik
14	Kursi Kayu	67	Unit	Baik
15	Sice	4	Unit	Baik
16	Bangku Panjang Kayu	27	Unit	Baik
17	Meja Rapat	19	Unit	Baik

18	Meja Komputer	8	Unit	Baik
19	Meja Resepsionis	2	Unit	Baik
20	Kursi Fiber Glas/Plastik	19	Unit	Baik
21	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
22	Lemari Es	1	Unit	Baik
23	A.C Split	26	Unit	Baik
24	Kipas Angin	6	Unit	Baik
25	Televisi	2	Unit	Baik
26	Sound System	1	Unit	Baik
27	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit	Baik
28	Tiang Bendera	8	Unit	Baik
29	Kaca Hias	1	Unit	Baik
30	Palu Sidang	2	Unit	Baik
31	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
32	Uninterruptible Power Suply (UPS)	7	Unit	Baik
33	Video Conference	1	Unit	Baik
34	LCD Monitor	1	Unit	Baik
35	Facsimile	1	Unit	Baik
36	Local Battery Telephone	1	Unit	Baik
37	Genset	1	Unit	Baik
38	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
39	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
40	P.C Unit	27	Unit	Baik
41	Lap Top	11	Unit	Baik
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Unit	Baik
43	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
44	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Unit	Baik
45	Server	2	Unit	Baik
46	Router	2	Unit	Baik
14	PENGADILAN NEGERI SOLOK			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik

5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang	2	Buah	Baik
7	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
8	Ruang Mediasi/Diversi	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
12	Ruang Subbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
13	Ruang Subbag. Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
14	Ruang Subbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Buah	Baik
15	Ruang Server	1	Buah	Baik
16	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
17	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
18	Ruang Arsip	1	Buah	Baik
19	Ruang Jaksa/BAPAS	1	Buah	Baik
20	Ruang Tahanan	2	Buah	Baik
21	Ruang Barang Bukti	1	Buah	Baik
22	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
23	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	Buah	Baik
24	Ruang Kasir	1	Buah	Baik
25	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1	Buah	Baik
26	Ruang Tunggu	1	Buah	Baik
27	Ruang Tamu Terbuka	1	Buah	Baik
28	Ruang Tunggu Anak Saksi/Korban	1	Buah	Baik
29	Ruang Kaukus	1	Buah	Baik
30	Ruang Dharmayukti Karini	1	Buah	Baik
31	Musholla	1	Buah	Baik
32	Pojok e-Court	1	Buah	Baik
33	Meja Informasi	1	Buah	Baik
34	Toilet	8	Buah	Baik
35	Toilet Difabel	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Pompa Air PMK	1	Unit	Baik

2	Mesin Fotocopy Folio	2	Unit	2 Rusak Berat.
3	Lemari Kayu	9	Unit	4 Rusak Berat.
4	Rak Besi	5	Unit	Baik
5	Brandkas	2	Unit	Baik
6	CCTV	19	Set	Baik
7	Hand Metal Detector	1	Unit	Baik
8	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
9	LCD Projector/Infocus	1	Set	1 Rusak Berat.
10	Meja Kerja Kayu	50	Unit	Baik
11	Kursi Besi/Metal	101	Unit	Baik
12	Kursi Kayu	17	Unit	Baik
13	Sice	1	Unit	Baik
14	Meja Rapat	2	Unit	Baik
15	Meja Komputer	4	Unit	Baik
16	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
17	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Unit	Baik
18	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit	Baik
19	Lemari Es	3	Unit	Baik
20	A.C Split	15	Unit	Baik
21	Treng Air/Tandon Air	1	Unit	Baik
22	Televisi	9	Unit	2 Rusak Berat.
23	Loudspeaker	4	Unit	Baik
24	Sound System	3	Set	Baik
25	Wireless	1	Unit	Baik
26	Microphone	7	Unit	Baik
27	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	Baik
28	Tiang Bendera	6	Unit	Baik
29	Palu Sidang	1	Unit	Baik
30	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
31	Vertikal Blind	3	Unit	Baik
32	Bingkai Foto	2	Unit	Baik
33	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
34	Audio Mixing Console	1	Unit	Baik
35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	Unit	Baik
36	Camera Digital	2	Unit	Baik
37	Video Conference	1	Set	Baik
38	LCD Monitor	2	Set	Baik
39	Camera Conference	1	Unit	Baik

40	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
41	Facsimile	2	Unit	1 Rusak Berat
42	Telepon Analog	8	Unit	Baik
43	Genset	1	Unit	Baik
44	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
45	P.C Unit	35	Unit	Baik
46	Lap Top	30	Unit	Baik
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Unit	5 Rusak Ringan.
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	Baik
49	Server	4	Unit	2 Rusak Berat
50	Router	1	Unit	Baik
51	Rak Server	2	Unit	Baik
52	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
53	Monografi	61	Unit	Baik
54	Buku Lainnya	1	Unit	Baik
15	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	Buah	Baik
6	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
7	Ruang Sidang Umum	3	Buah	Baik
8	Ruang Kepaniteraan	3	Buah	Baik
9	Ruang Kesekretariatan	3	Buah	Baik
10	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
11	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
12	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
13	Ruang Posyankum	1	Buah	Baik
14	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
15	Ruang Ramah Anak	1	Buah	Baik
16	Ruang Barang Bukti	1	Buah	Baik
17	Ruang Serbaguna	1	Buah	Baik
18	Ruang Tahanan	2	Buah	Baik
19	Mushalla dan Ruang Ginset	1	Buah	Baik
20	Dapur Bersih	1	Buah	Baik

21	Toilet Umum	4	Buah	Baik
22	Gudang	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inc)	24	Unit	Baik 4 Rusak berat 20
2	Mesin Hitung Manual	2	Unit	Rusak Berat
3	Mesin Hitung Elektrik/kalkulator	1	Unit	Rusak Berat
4	Mesin Stensil Manual folio	1	Unit	Rusak Berat
5	Mesin Fotocopy electronic	1	Unit	Rusak Berat
6	Lemari Besi	3	Unit	Baik
7	Lemari Kayu	81	Unit	68 Baik, 13 Rusak Berat,
8	Rak Besi	4	Unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	11	Unit	Baik
10	Brankas	4	Unit	Baik
11	Tabung Pemadam Api	16	Unit	15 Baik 1 Rusak Berat
12	Camera Control Television System	1	Unit	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
14	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
15	Papan Nama	12	Unit	Baik
16	Hand Metal Detektor	1	Unit	Baik
17	Lcd Projector	1	Unit	Baik
18	Focusing Screen	1	Unit	Baik
19	Papan Gambar	24	Unit	24 Baik
20	Perkakas kantor lainnya	8	Unit	8 Baik
21	Meja kerja kayu	87	Unit	Baik
22	Kursi Metal	136	Unit	Baik
23	Kursi kayu	22	Unit	Baik
24	Sice	18	Unit	12 Baik, 6 Rusak Berat
25	Bangku Panjang kayu	42	Unit	Baik
26	Meja Rapat	1	Unit	Baik
27	Meja Komputer	5	Unit	Baik
28	Meja Ketik	1	Unit	Rusak Berat
29	Meja Resepcionist	2	Unit	Baik
30	Kursi Fiberglas	53	Unit	Baik 52 dan Rusak Ringan 1
31	Partisi	1	Unit	Baik
32	Publik Astari	2	Unit	Baik

33	Jam Listrik	1	Unit	Rusak Berat 1
34	Jam elektronik	16	Unit	Baik 14, Rusak Berat 2
35	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Baik
36	Mesin Pemotong rumput	1	Unit	Baik
37	AC Split	32	Unit	Baik
38	Portable Air Conditioner	1	Unit	Baik
39	Kipas Angin	15	Unit	Baik 11 dan Rusak Berat 4
40	Alat Pendingin Lainnya	4	Unit	Baik
41	Tape Recorder	3	Set	Baik 1 dan Rusak Berat 3
42	Loudspeaker	4	Unit	Baik 3 dan Rusak Berat 1
43	Sound system	4	Set	Baik 3, Rusak Berat 1
44	Microphone	2	Unit	Rusak Berat
45	Microphone Table stand	7	Set	Baik 5, Rusak Berat 2
46	Tustel	2	Unit	Rusak Berat
47	Lambang Garuda Pancasila	5	Unit	Baik
48	Gambar Presiden/wakil	3	Unit	Baik
49	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
50	Kaca Hias	1	Unit	Baik
51	Palu Sidang	2	Unit	Baik
52	Lambang Instansi	1	Unit	Baik
53	Karpet	2	Unit	Baik
54	Gordyn	2	Unit	Baik
55	Audio Mixing Console	2	Unit	Baik
56	Audio Mixing Portable	1	Unit	Baik
57	Intercom Unit	8	Unit	Rusak Berat
58	Wireless Mic	3	Unit	Baik
59	Boom Stand	1	Unit	Baik
60	UPS	13	Unit	Baik
61	Lcd Monitor	3	Set	Baik
62	PABX	1	Unit	Baik
63	Pesawat Telepon	2	Unit	Baik
64	Faximile	1	Unit	Baik
65	Genset	2	Unit	Baik
66	Internet	1	Unit	Baik
67	PC Unit	30	Unit	Baik
68	Laptop	16	Unit	Baik
69	Note Book	2	Unit	Baik

70	Printer	22	Unit	Baik 14 Rusak Berat 8
71	Scaner	2	Unit	Baik
72	Viewer	1	Unit	Baik
73	Server	3	Unit	Baik
74	Router	2	Unit	Baik
75	Rak Server	1	Unit	Baik
76	Switch	1	Unit	Baik
77	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
78	Monitor	2	Unit	Baik
79	Printer (peralatan personal computer)	42	Unit	Baik 23 dan Rusak Berat 19
80	Peralatan rumah tangga lainnya	39	Unit	Baik
81	Server	2	Unit	Baik
82	Router	1	Unit	Baik
83	Switch	4	Unit	Baik
84	Monografi	6821	Unit	Baik
16	PENGADILAN NEGERI MUARO			
	Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	1	Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Buah	Baik
6	Ruang Sidang Umum	2	Buah	Baik
7	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Buah	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Buah	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Buah	Baik
11	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1	Buah	Baik
12	Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1	Buah	Baik
13	Ruang Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	Buah	Baik
14	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
15	Ruang Server	1	Buah	Baik
16	Ruang Tahanan	2	Buah	Baik
17	Ruang Laktasi	1	Buah	Baik
18	Ruang Arsip Perkara	3	Buah	Baik

19	Ruang Posbankum	1	Buah	Baik
20	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
21	Ruang Mediasi	1	Buah	Baik
22	Ruang Media Center	1	Buah	Baik
23	Toilet	5	Buah	Baik
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran				
Nama Peralatan dan Mesin				
1	Server	2	Unit	Baik
2	Personal Computer (PC)	38	Unit	Baik
3	Laptop/Notebook	21	Unit	Baik
4	Printer	14	Unit	Baik
5	Genset	2	Unit	Baik
6	Lemari (Besi/Kayu)	23	Unit	Baik
7	Kursi (Besi/Kayu/Fiber/Plastik/Bangku Panjang)	142	Unit	Baik
8	Si Ce	9 Set	Unit	Baik
9	Meja (Kerja/Rapat/Komputer/Besi/Kayu)	50	Unit	Baik
10	Brangkas	3	Unit	Baik
11	Rak (Besi/Kayu)	2	Unit	Baik
12	Filing Cabinet	7	Unit	Baik
13	Rak Server	2	Unit	Baik
14	Kios-K	1	Unit	Baik
15	Loudspeaker	4	Unit	Baik
16	Sound System	2	Unit	Baik
17	A.C. Split	27	Unit	Baik
18	CCTV	4	Unit	Baik
19	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Baik
20	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
21	Kipas Angin	6	Unit	Baik
22	Microphone	7	Unit	Baik
23	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	Unit	Baik
24	LCD Monitor	1	Unit	Baik
25	Camera Conferencee	1	Unit	Baik
26	Scanner Facsimile	1	Unit	Baik
27	Kursi Zeis	2	Unit	Baik

28	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
17	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG			
	Sarana Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah	Baik
3	Ruang Hakim	4	Buah	Baik
4	Ruang Sekrearis	1	Buah	Baik
5	Ruang Panitera	1	Buah	Baik
6	Ruang Sub Bagian	3	Buah	Baik
7	Ruang Penitera Muda	3	Buah	Baik
8	Ruang Sidang Utama	1	Buah	Baik
9	Ruang Sidang Pidana	1	Buah	Baik
10	Ruang Sidang Perdata	1	Buah	Baik
11	Ruang Sidang Anak	1	Buah	Baik
12	Ruang Panitera Pengganti	2	Buah	Baik
13	Ruang Jurusita	1	Buah	Baik
14	Ruang Kesekretariatan (ZI/RB/APM)	1	Buah	Baik
15	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
16	Ruang Command Center	1	Buah	Baik
17	Ruang Dharmayukti	1	Buah	Baik
18	Ruang Server	1	Buah	Baik
19	Ruang Tunggu + Selasar	1	Buah	Baik
20	Ruang PTSP	1	Buah	Baik
21	Ruang Arsip	2	Buah	Baik
22	Ruang Tahanan	1	Buah	Baik
23	Lobby Utama	1	Buah	Baik
24	Gudang	1	Buah	Baik
25	Ruang Posbakum	1	Buah	Baik
26	Bank	1	Buah	Baik
27	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
28	Ruang Barang Bukti	1	Buah	Baik
29	Ruang Kesehatan	1	Buah	Baik
30	Ruang Mediasi dan Kaukus	1	Buah	Baik
31	Ruang Tunggu Anak Laki Laki	1	Buah	Baik
32	Ruang Tunggu Anak Perempuan	1	Buah	Baik
33	Ruang Tunggu Sidang	1	Buah	Baik
34	Ruang Pengacara	1	Buah	Baik
35	Ruang Jaksa	1	Buah	Baik
36	Ruang Diversi	1	Buah	Baik

37	Ruang Bapas	1	Buah	Baik
38	Ruang Teleconference	1	Buah	Baik
39	Ruang Saksi Korban	1	Buah	Baik
40	Ruang Perpustakaan	1	Buah	Baik
41	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	Buah	Baik
	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		Buah	Baik
1	Lemari Besi/Metal	34	Unit	Baik
2	Lemari Kayu	5	Unit	Baik
3	Rak Besi	10	Unit	Baik
4	Mobile File	3	Unit	Baik
5	White Board	1	Unit	Baik
6	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
7	Meja Kerja Kayu	89	Unit	Baik
8	Kursi Besi/Metal	379	Unit	Baik
9	Kursi Kayu	21	Unit	Baik
10	Meja Rapat	1	Unit	Baik
11	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Baik
12	Meja Resepsionis	2	Unit	Baik
13	Sofa	17	Unit	Baik
14	Meubelair Lainnya (Meja Tamu	5	Unit	Baik
15	A.C Split	6	Unit	Baik
16	Loudspeaker	4	Unit	Baik
17	Microphone	7	Unit	Baik
18	Lambang Garuda	3	Unit	Baik
19	Tiang Bendera	4	Unit	Baik
20	Mimbar/Podium	1	Unit	Baik
21	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
22	Audio Mixing Console	1	Unit	Baik
23	UPS	5	Unit	Baik
24	LCD Monitor	1	Set	Baik
25	Camera Conference	1	Unit	Baik
26	PABX	1	Unit	Baik
27	P.C Unit	19	Unit	Baik
28	Lap Top	15	Unit	Baik
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	Baik
30	Server	2	Unit	Baik
31	Router	2	Unit	Baik
32	Wireless Access Point	2	Set	Baik

33	Switch	2	Unit	Baik
34	Lemari Besi/Metal	34	Unit	Baik
35	Lemari Kayu	5	Unit	Baik
36	Rak Besi	10	Unit	Baik
37	Mobile File	3	Unit	Baik
38	White Board	1	Unit	Baik
39	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
40	Meja Kerja Kayu	89	Unit	Baik
41	Kursi Besi/Metal	379	Unit	Baik
42	Kursi Kayu	21	Unit	Baik
43	Meja Rapat	1	Unit	Baik
44	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Baik
45	Meja Resepsionis	2	Unit	Baik
46	Sofa	17	Unit	Baik
47	Meubelair Lainnya (Meja Tamu	5	Set	Baik
48	A.C Split	6	Unit	Baik
49	Loudspeaker	4	Set	Baik
50	Microphone	7	Unit	Baik
51	Lambang Garuda	3	Unit	Baik
52	Tiang Bendera	4	Unit	Baik
53	Mimbar/Podium	1	Unit	Baik
54	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
55	Audio Mixing Consule	1	Unit	Baik
56	UPS	5	Unit	Baik
57	LCD Monitor	1	Unit	Baik
58	Camera Conference	1	Unit	Baik
59	PABX	1	Unit	Baik
60	P.C Unit	19	Unit	Baik
61	Lap Top	15	Unit	Baik
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	Baik
63	Server	2	Unit	Baik
64	Router	2	Unit	Baik
65	Wireless Access Point	2	Unit	Baik
66	Switch	2	Unit	Baik

2. Sarana/Prasarana Kantor

2.1. Rumah Dinas

No	PENGADILAN	KETUA	WAKIL KETUA	HAKIM	PANITERA	SEKRETARIS	KONDISI			JUMLAH
							BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	6	1	1	3	4	3	10
2	Pengadilan Negeri Padang	1	1	8	1	1	11	-	1	12
3	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	5	1	1	8	1	-	9
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	13	1	1	1	14	2	17
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	3	1	1	-	7	-	7
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	1	1	1	5	-	-	5
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	1	7	1	1	11	-	-	22
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	7	1	1	8	2	1	11
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	6	1	-	9	-	-	18
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	1	1	-	4	-	-	8
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	5	1	1	-	4	4	-	8
12	Pengadilan Negeri Painan	1	1	6	1	1	10	-	-	20
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	4	1	1	8	-	-	16
14	Pengadilan Negeri Solok	1	1	7	1	-	10	-	-	20
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	9	1	1	13	-	-	26
16	Pengadilan Negeri Muaro	1	1	3	1	1	6	-	1	13
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total		16	20	87	16	12	111	32	8	222

2.2. Kendaraan Dinas

No	Pengadilan	Kendaraan Roda 2				Kendaraan Roda 4			
		Kondisi			Jumlah	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Pengadilan Tinggi Padang	7	2	-	9	1	4	-	5
2	Pengadilan Negeri Padang	11	-	1	0	4	-	-	4
3	Pengadilan Negeri Pariaman	4	6	1	11	-	2	2	4
4	Pengadilan Negeri Bukittinggi	3	4	1	8	1	1	2	4
5	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	8	-	8	-	2	-	2
6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	4	-	4	-	4	-	4
7	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	6	-	-	6	2	-	-	2
8	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	7	1	8	2	1	-	3
9	Pengadilan Negeri Payakumbuh	4	-	-	4	3	-	-	3
10	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	9	-	-	9	3	-	-	3
11	Pengadilan Negeri Batusangkar	6	1	-	7	4	-	-	4
12	Pengadilan Negeri Painan	6	-	-	6	3	-	1	4
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	6	-	-	6	1	-	-	1
14	Pengadilan Negeri Solok	5	-	-	5	4	-	-	4
15	Pengadilan Negeri Sawahlunto	7	-	-	7	4	-	-	4
16	Pengadilan Negeri Muaro	10	-	-	10	4	-	-	4
17	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	2	-	-	2	3	1	-	4
Total		86	32	4	86	39	15	5	59

3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi sekarang ini berkembang dengan pesat. Pemanfaatan teknologi informasi sudah mencapai berbagai bidang kehidupan masyarakat. Teknologi informasi memudahkan para penggunanya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para pemakai informasi. Teknologi informasi memiliki banyak peranan dalam membantu dan memecahkan masalah, diantaranya membantu dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, mutu, kreativitas, dan problem solving (pemecahan masalah). Dengan dukungan teknologi informasi, kita dapat melakukan pemecahan masalah dengan cepat dan efektif, termasuk di dunia peradilan seperti Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat.

1. Implementasi e-Court di Pengadilan

Ecourt merupakan sebuah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 yaitu Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi ecourt merupakan sebuah sistem terpusat, artinya aplikasi tersebut berada dalam server Mahkamah Agung RI yang terintegrasi

dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga tidak perlu di instal di masing-masing server maupun website Pengadilan.

Persidangan secara elektronik atau e-court merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 4 ruang lingkup yaitu, e-filing (pengisian data pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar perkara), e-summons, (pemanggilan para pihak

melalui alamat domisili elektronik), e-litigasi (persidangan secara online). E-Court baru terlaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama, sementara untuk Pengadilan Tingkat Banding belum ada. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat telah menerapkan Aplikasi e-Court ini dalam hal pendaftaran, dan persidangan secara online. Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri yang memasukkan pendaftaran melalui e-court dapat dilihat pada tabel berikut:

**DAFTAR PERKARA PENGADILAN NEGERI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan	Total E-Litigasi	KETERANGAN
1	Pengadilan Negeri Padang	789	773	228	36	12	497	107	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	203	203	85	17	3	98	128	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	168	162	47	23	-	92	27	
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	72	72	33	3	0	36	72	
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	131	131	41	13	1	76	131	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	60	60	16	10	2	32	59	semua perkara E-Litigasi kecuali 1 perkara gugatan sederhana
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	34	34	8	7	1	18	34	

8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	124	124	23	24	7	70	124	
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	58	55	25	5	1	26	24	(2 Perkara manual ecourt gangguan)
10	Pengadilan Negeri Batusangkar	80	80	35	9	4	32	64	
11	Pengadilan Negeri Painan	96	96	50	28	0	18	23	
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	151	143	39	22	6	76	122	
13	Pengadilan Negeri Solok	108	108	29	7	1	72	101	
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto	16	16	6	0	0	10	4	
15	Pengadilan Negeri Muaro	44	44	12	21	0	11	44	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	52	52	12	22	-	18	15	

C. Implementasi SIPP di Pengadilan

Melalui dukungan teknologi informasi, Pengadilan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Padang menerapkan SIPP versi 4.1.1 dan satuan kerja dibawahnya yakni Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat, secara keseluruhan telah menerapkan SIPP versi 5.4.0 yang telah terintegrasi dengan SIPP Banding. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya. Jaringan yang digunakan di Pengadilan Tinggi Padang meliputi :

- 1) Jaringan Internet indihome dan cinox kapasitas 4 Mbps (2 line telepon) yang di-*sharing* untuk 2 lantai menggunakan WiFi.

Pada tahun 2023, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sudah diupdate ke versi 4.1.1. Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tahun 2023, Badan Peradilan Umum tidak melakukan rapat Komite Akreditasi Penjaminan Mutu. Namun dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tinggi Padang tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Untuk melakukan perubahan saat ini Pengadilan Tinggi Padang membulatkan tekad, dan memulai memetakan (*mapping*) potensi sumber daya, kekuatan, kelemahan dan resistensi. Selanjutnya beragam langkah dilakukan agar semua kelemahan dapat diatasi dengan kekuatan yang ada.

Langkah-langkah pembenahan telah dilakukan di Pengadilan Tinggi Padang, yaitu:

- Pembinaan/sosialisasi terus menerus. Pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*).
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi *Grand Design*

Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari KKN serta peningkatan pelayanan publik.

- Pembangunan Zona Integritas. Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara terbuka. Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan Pembangunan Pembangunan Zona Integritas tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik.
- Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna.
- Pembenahan Administrasi. Acuannya adalah Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari, tetapi umumnya tetap banyak yang terlupakan. Untuk pembenahan administrasi ini, Pengadilan Tinggi Padang mengandalkan aplikasi-aplikasi, baik yang

merupakan aplikasi resmi dari Mahkamah Agung, maupun aplikasi dari instansi eksternal.

- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan terhadap dunia peradilan, maka Mahkamah Agung sendiri telah memerintahkan seluruh jajaran peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program Mahkamah Agung R.I dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Pengadilan Tinggi Padang telah meresmikan keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan konsep baru pada Bulan September tahun 2022, yang diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyediakan pelayanan yang terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan. Pelayanan PTSP terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu: Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memberikan layanan prioritas kepada kaum rentan yang terdiri dari disabilitas, ibu hamil, lansia dan anak-anak. Pengadilan tinggi Padang menyediakan fasilitas berupa tempat parkir khusus disabilitas, ruang tunggu prioritas, kursi roda dan alat bantu jalan bagi disabilitas fisik, buku panduan dengan metode braile dan memberikan pelayanan dengan kartu tamu prioritas.

Sementara itu tentang PTSP ini telah diterapkan pula kepada seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Padang. Pada tahun 2023, ada 1 Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan penghargaan dalam penilaian lomba PTSP yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yaitu:

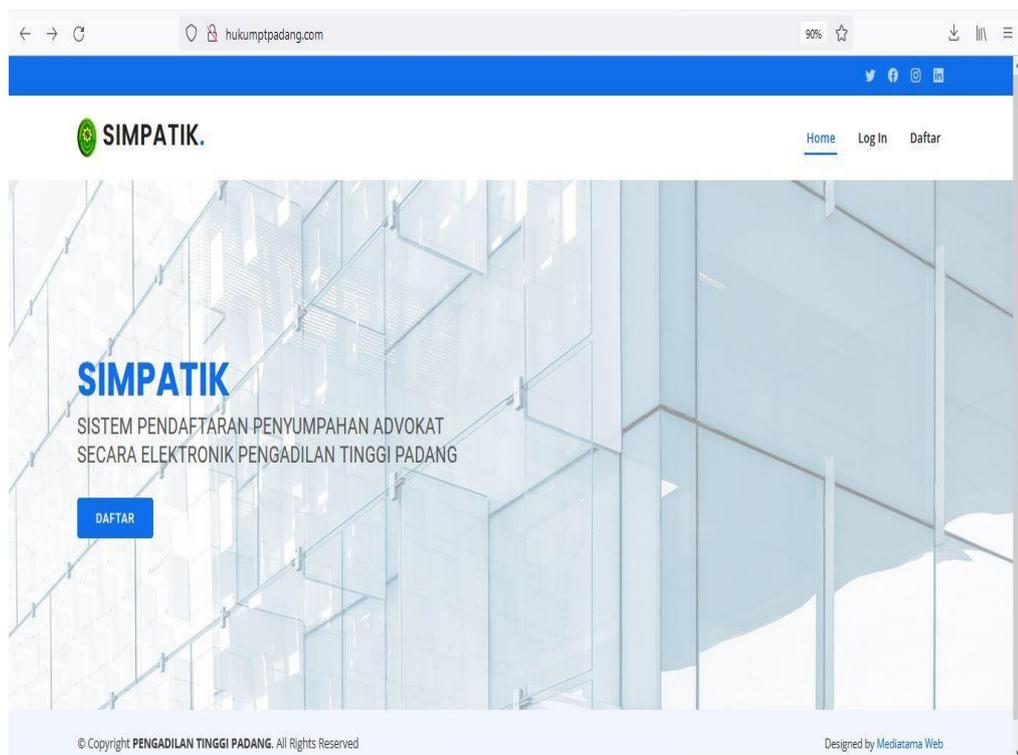
NO	Pengadilan Negeri	Peringkat	Kategori
1.	Pengadilan Negeri Padang	Harapan III	PTSP Terbaik se-Indonesia (Kategori Pengadilan Negeri Kelas 1A)

B. Inovasi Pelayanan Publik

Ada beberapa inovasi terkait pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2023 baik berupa aplikasi atau berupa program kegiatan yang tujuannya memudahkan masyarakat pencari keadilan dan instansi terkait untuk mendapatkan pelayanan terkait produk hukum dari Pengadilan Tinggi Padang. Berikut beberapa inovasi yang telah berjalan pada Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2023:

1. SIMPATIK

Simpatik merupakan kependekan dari Sistem Pendaftaran Penyempahan Advokat Secara Elektronik. Aplikasi ini dapat mempermudah pendaftaran advokat secara online dan segera mendapatkan jadwal untuk dilakukan



penyempahan.

**DATA PENYUMPAHAN ADVOKAT DI PENGADILAN TINGGI PADANG
TAHUN 2023**

NO	NAMA ORGANISASI	TANGGAL PENYUMPAHAN	JUMLAH PENYUMPAHAN	KET
1.	PERADIN	8 Mei 2023	9 Orang	
2.	PERADI	9 Mei 2023	71 Orang	
3.	APSI	31 Mei 2023	16 Orang	
4.	PPKHI	21 Juni 2023	9 Orang	
5.	DPN Indonesia (Dewan Pengacara Nasional Indonesia)	11 Oktober 2023	17 Orang	
6.	PPKHI	15 November 2023	11 Orang	
7.	PERADI	20 Desember 2023	63 Orang	
8.	PERADIN	20 Desember 2023	6 Orang	
JUMLAH			202 Orang	

2.KPT Menyapa

KPT Menyapa merupakan program yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Kegiatan dilakukan secara Daring melalui aplikasi *zoom meeting*, Ketua Pengadilan Tinggi Padang mengundang Pengadilan Negeri secara acak untuk bergabung dalam *zoom meeting*. Ketua Pengadilan Tinggi Padang memberikan

wadah kepada Pengadilan Negeri untuk menyampaikan permasalahan ataupun kendala yang dialami terkait tugas dan fungsi Pengadilan.

3. INOVASI DISABILITAS

Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pengadilan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berupa sarana dan prasarana serta pelayanan. Pengadilan Tinggi Padang telah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas. Diantaranya, parkir khusus bagi penyandang disabilitas, kursi roda dan alat bantu jalan bagi disabilitas fisik, alarm darurat, kartu tamu prioritas, ruang tunggu prioritas, alat bantu dengar, toilet disabilitas, buku panduan dengan huruf braille dan buku etika berperilaku bagi penyandang disabilitas. Berikut, beberapa gambar yang menunjukkan Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas

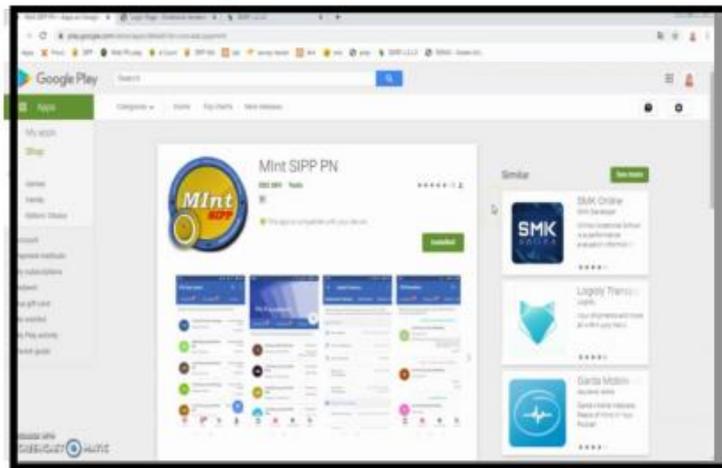


INOVASI PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG

1. Pengadilan Negeri Padang

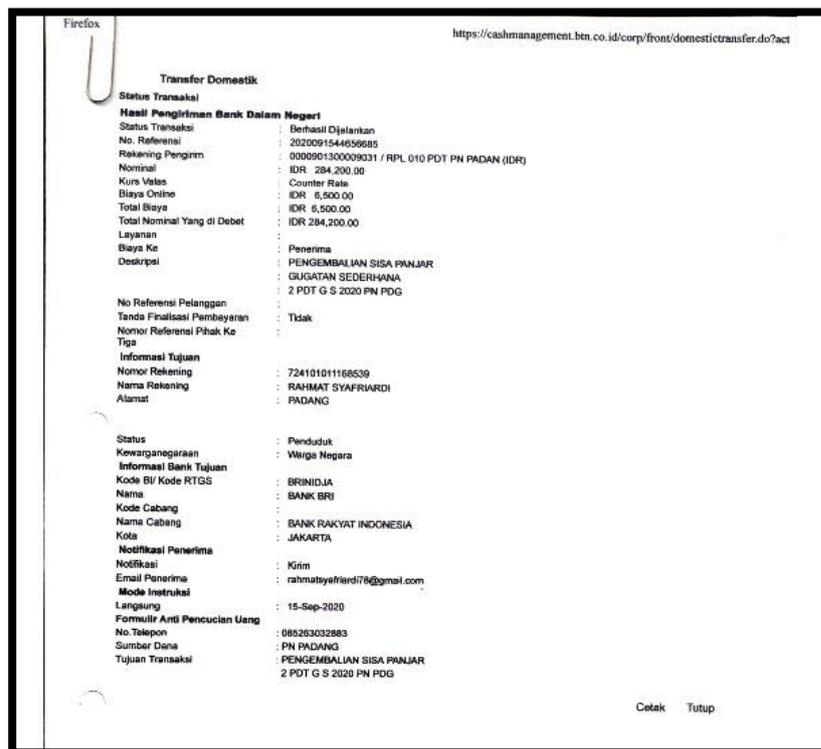
a. Aplikasi Mobile SIPP (MInt SIPP dan MExt SIPP)

Pengadilan Negeri Padang menyediakan layanan akses ke SIPP melalui aplikasi Mint SIPP untuk aparatur PN Padang dan Mext SIPP untuk masyarakat pencari keadilan. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat dapat memantau perkembangan perkara di Pengadilan Negeri Padang melalui perangkat ponsel android mereka.



b. Pengembalian Sisa Panjar Otomatis

Salah satu inovasi layanan lain dari Pengadilan Negeri Padang adalah melaksanakan pengembalian sisa panjar otomatis ke rekening pihak pencari keadilan pada hari perkara diputus. Sistem ini diberikan khusus untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court dengan mengisikan nomor rekening tujuan untuk pengembalian sisa panjar. Dengan adanya sistem ini, pihak pencari keadilan tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan uang sisa panjar perkara mereka.



Gambar Contoh Bukti Transfer Otomatis Sisa Panjar Perkara

c. One Day Service Perkara Perdata Permohonan

Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan one day service pada perkara Perdata Permohonan dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Dimana si pemohon dapat memperoleh salinan penetapan pada hari yang sama dengan hari sidang atau hari penetapan dibacakan. Untuk pendaftaran permohonan Ketua Pengadilan juga telah mewajibkan pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi ecourt sehingga tercipta prinsip peradilan yang cepat, transparan dan biaya ringan. Pendaftaran permohonan dilakukan dengan didampingi oleh petugas yang telah ditunjuk di meja ecourt. Dalam menyelesaikan perkara, minutas, dan publish, majelis telah menunjukkan kinerja yang cepat demi terwujudnya program ini.

d. Rekaman Suara Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sehubungan dengan penerapan Zona Integritas dan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Padang, maka setiap satu jam sekali diputar rekaman suara pengumuman penerapan SMAP di semua ruangan gedung Pengadilan Negeri Padang yang dapat didengar oleh semua aparat peradilan dan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut diberitahukan bahwa semua layanan Pengadilan Negeri Padang bebas suap, pungutan liar, dan gratifikasi.

e. Rekaman Suara Himbauan Protokol Kesehatan

Sehubungan dengan adanya program dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus covid 19 di Sumatera Barat, untuk itu Pengadilan Negeri Padang menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5R. Maka setiap satu jam sekali diputar rekaman suara pengumuman himbauan protokol kesehatan di semua ruangan gedung Pengadilan Negeri Padang yang dapat didengar oleh semua aparatur peradilan dan masyarakat.

f. Pembacaan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Sidang Pertama

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah pembacaan penerapan SMAP dihadapan para pihak yang berperkara pada sidang pertama oleh majelis hakim. Pembacaan penerapan SMAP ini juga ikut dituliskan pada berita acara sidang oleh Panitera Pengganti.

Sehubungan telah dicanangkan Program Zona Integritas (ZI) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, untuk itu para pihak diharap dapat membantu program tersebut, dengan tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, baik sebelum, pada saat dan sesudah proses perkara.

DIBACA OLEH MAJELIS/HAKIM
PADA SAAT SIDANG AKAN DIMULAI

SEBELUM PERSIDANGAN SAYA MULAI, PERLU SAYA SAMPAIKAN KEPADA PENGGUGAT/PEMOHON, TERGUGAT/TERMOHON, TERDAKWA-PENUNTUT UMUM, PENASEHAT HUKUM, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG SIDANG, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI PADANG UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN SELURUH WARGA PENGADILAN NEGERI PADANG TIDAK AKAN MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURUSITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PADANG MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KE:

1. KPK : 085 585 755 75
2. BAWAS MARI : (021) 255 783 00
3. KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG : (0751) 23495
4. KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG : 081 365 984 338

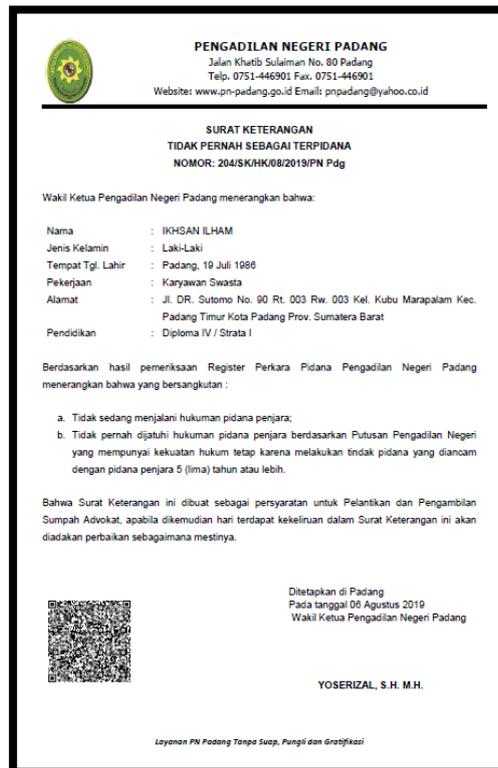
ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG

YOSERIZAL, S.H., M.H.
NIP. 19670913 196212 1001

Gambar 10. Kalimat Penerapan SMAP

- g. Penulisan Bebas Pungli dan Gratifikasi Pada Semua Produk PN Padang
- Inovasi lain yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah penulisan bebas pungli dan gratifikasi pada semua Produk Pengadilan Negeri Padang, seperti surat keterangan, perjanjian kerjasama, surat perintah kerja, dan lain-lain.



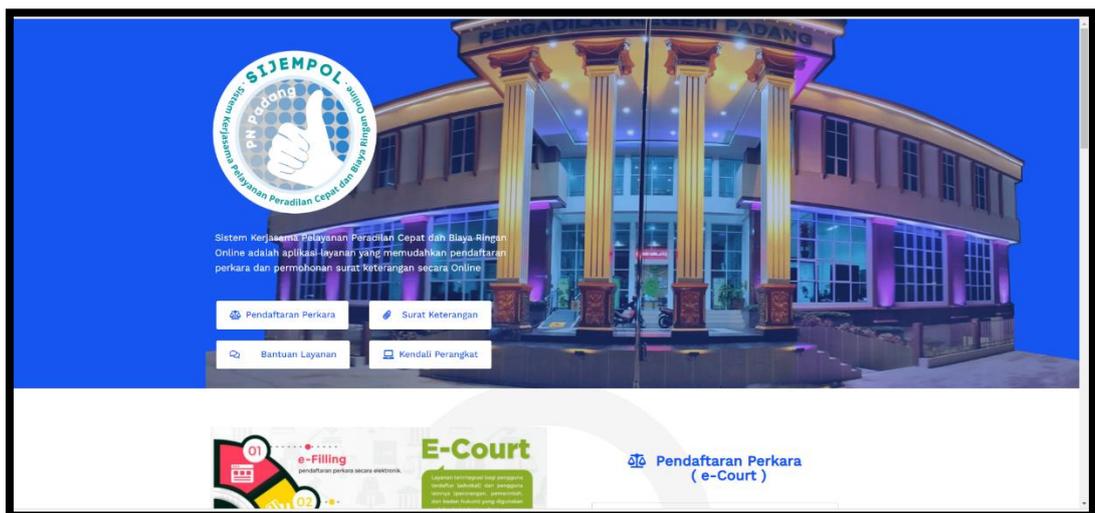
Gambar 11. Penulisan Bebas Pungli Dan Gratifikasi

h. Aplikasi Sistem Pelayanan PTSP Jarak Jauh (SIPATUAH)

Dalam aplikasi Sipatuah, merupakan media elektronik untuk memudahkan dan mempercepat dalam memberikan pelayanan secara online. Layanan yang tersedia diantaranya permohonan salinan atau petikan putusan, permohonan fotocopy salinan putusan, permohonan legalisir fotocopy turunan putusan, permohonan penelitian, riset, atau magang, serta layanan terima surat online. Masyarakat cukup mengajukan permohonan secara dan datang ke PTSP PN Padang untuk mengambil produk layanan online.

i. Aplikasi Sistem Kerjasama Pelayanan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan Online (SIJEMPOL)

Sijempol merupakan layanan yang memudahkan pendaftaran perkara dan permohonan surat keterangan secara online. Sistem ini juga menyediakan bantuan layanan berupa layanan zoom meeting agar masyarakat terhubung dan tatap muka dengan petugas Pengadilan Negeri Padang. Kendali perangkat juga dilengkapi pada sistem ini yang berguna sebagai layanan pengontrolan jarak jauh computer pengguna sijempol oleh petugas Pengadilan Negeri Padang.



Gambar 13. Tampilan Sijempol

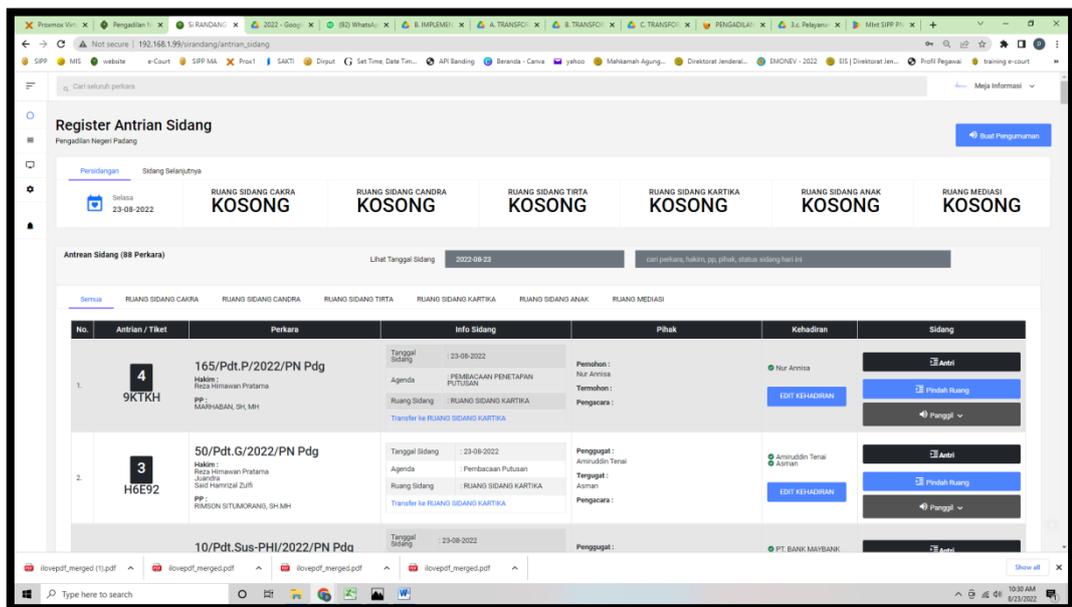
j. Sistem Informasi Register Antrian Sidang (SIRANDANG)

Sirandang merupakan system antrian sidang yang dapat membantu para pihak memantau alur antrian untuk perkara mereka. Sirandang juga dapat memberikan pesan suara apabila para pihak telah lengkap dan sidang dapat dimulai.

k. Rekaman Audio Intruksi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung

Sehubungan dengan intruksi tersebut, Krpada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengunduh audio intruksi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan memutar audio intruksi tersebut pada setiap satuan kerja masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu. Sebelum audio diputar agar diawali dengan kata pengantar yang telah ditentukan.

2. Pengadilan Negeri Pariaman



a. Aplikasi SIPEDATI

Sistem Pelayanan Dalam Bingkai Teknologi Informasi/Aplikasi SIPEDATI merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum agar dapat mengakses informasi perkara, jadwal sidang, biaya perkara, mengetahui biaya perkara, sisa panjar. Sedangkan untuk pegawai, aplikasi SIPEDATI dapat membantu pekerjaan pegawai khususnya Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti yang mana setiap pukul 08.00 pagi secara otomatis memberikan informasi melalui Whatsaap group mengenai jadwal sidang.

b. Aplikasi *e-Voice*

Aplikasi *e-Voice* adalah aplikasi untuk mengeluarkan suara elektronik seperti suara untuk panggilan rapat, panggilan apel, panggilan sidang, audio anti gratifikasi dan lain sebagainya.

3. Pengadilan Negeri Bukittinggi

a. PTSP Online Pengadilan Negeri Bukittinggi

PTSP Online Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah sebuah inovasi dimana informasi seputar layanan di PTSP Pengadilan Bukittinggi dikumpulkan dalam satu wadah sehingga dapat diperoleh dengan lebih mudah oleh masyarakat pencari keadilan. PTSP Online juga memiliki fitur zoom bersama petugas PTSP sehingga informasi yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada para petugas PTSP.

b. E-Pelisan

E-Pelisan (Elektronik Permohonan Salinan Putusan) merupakan layanan digitalisasi Formulir Permohonan Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Berbasis Google Form Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB. Melalui layanan ini para pencari keadilan dapat mengajukan permohonan salinan putusan berkekuatan hukum tetap secara online. Layanan ini dapat diakses melalui halaman depan PN Bukittinggi.

c. E-Berpadu

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta

efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
- Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- Penangguhan Penahanan
- Permohonan Pembantaran Penahanan
- Permohonan Penetapan Diversi
- Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah mengimpelentasikan layanan ini mulai tahun 2022. Pengadilan Negeri Bukittinggi juga sudah membuat video tutorial layanan E-Berpadu yang tersedia pada platform PN Bukittinggi.

d. Posbakum Online

Posbakum online merupakan sebuah layanan yang memungkinkan pencari keadilan khususnya kelompok rentan, untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum pada posbakum yang berada di PN Bukittinggi secara

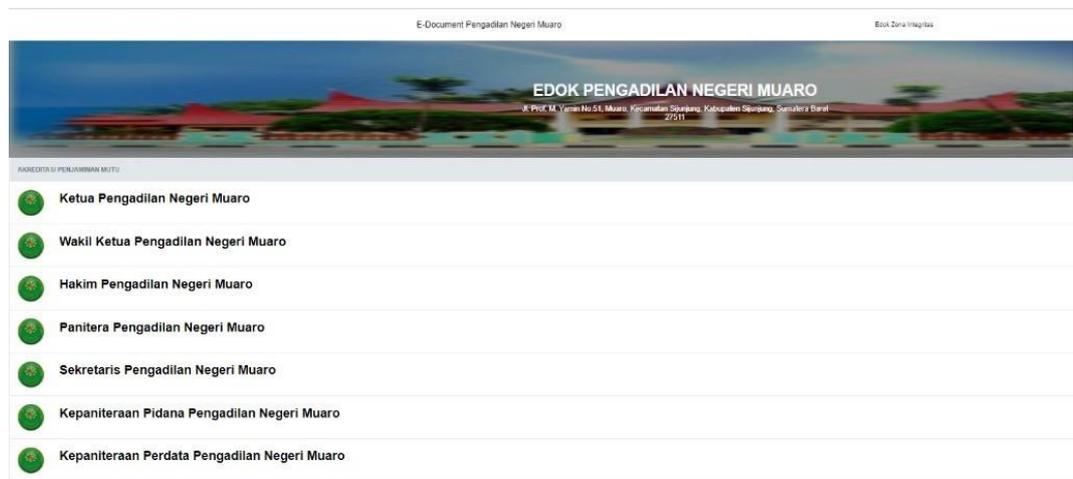
daring atau online tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan. Aplikasi ini dapat digunakan dimanapun baik melalui perangkat komputer maupun seluler pengguna layanan.

4. Pengadilan Negeri Muaro

a. Aplikasi Sentrik (Aplikasi Sistem Antrian Pada Meja PTSP secara Elektronik)



b. Aplikasi Si Edo (Sistem Informasi E-Dokumen)





c. Aplikasi KDSlip

Nomor Arsip	Ruang Arsip	Petugas Arsip	Keterangan	Tanggal Pinjam
4	Sara	Ruang 2	Alia	02 September 2021
3	sara	3	stri	22 September 2021
2	sara	1	uci	

5. Pengadilan Negeri Pasaman Barat

- a. Aplikasi WhatsApp Auto Respon yang diberi nama SIDINI (Sistem Informasi

Aplikasi WhatsApp Auto Respon yang diberi nama SIDINI (Sistem Informasi Pengadilan Negeri) Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II, adalah aplikasi Autorespon (Penjawab Otomatis) Chat di Sosial media untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang informasi perkara dan informasi lain khususnya di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, juga untuk internal Pengadilan Negeri Pasaman Barat, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsapp 0811 6698 272.

- b. Ksatrio Sirancak

Aplikasi Kstario Sirancak adalah singkatan dari kerjasama pelayanan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi (Eraterang, E-Court, SIAK). Kerjasama tersebut adalah kerjasama yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- c. Aplikasi Survei IPAK dan IKM Berbasis Web

Aplikasi Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis Web. Kedua aplikasi survei ini diletakan di website Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga masyarakat yang ingin memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat langsung memberikan penilaiannya melalui

gadget masing-masing tanpa harus mengantri untuk menggunakan aplikasi yang telah di instal di komputer yang disediakan. Aplikasi ini tidak hanya mengurangi antrian di lobi gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat tetapi juga memangkas waktu penggunaan dan penghitungan hasil dari survey tersebut sehingga menyebabkan survei lebih efektif dan efisien. Karena hasil yang diperoleh dari survei lebih cepat karena aplikasi IPAK dan IKM ini telah berbasis web, pimpinan juga lebih cepat mengambil kebijakan terkait pelayanan yang diberikan.

d. Website Ramah Difabel

Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga melakukan inovasi dengan membuat Website Ramah Difabel. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pencari keadilan yang memiliki kekurangan juga dapat mencari informasi yang mereka butuhkan di Website Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanpa harus datang langsung bertanya ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hal ini juga menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

e. Pojok Pengadilan

Pojok Pengadilan merupakan program inovasi pelayanan yang dirancang sebagai perpanjangan tangan, dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang mana Pojok Pengadilan ini ditempatkan di kantor Wali Nagari atau Kantor Camat yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga dapat memberikan akses yang lebih mudah dan murah kepada

masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dalam memperoleh informasi maupun pelayanan, hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.

6. Pengadilan Negeri Padang Panjang

a. Aplikasi SiMonev APM (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu)

Aplikasi SiMonev APM (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu) adalah Aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk memantau/ memonitor, mengevaluasi dan mendokumentasikan dokumen, bukti dan data pendukung Pelaksanaan dan Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Aplikasi SiMonev APM berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor. 69/DJU/SK/OT01.3/2/2020 Tentang Pemberlakuan Checklist Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

b. SiBola adalah Sistem Informasi Brosur Layanan

Yaitu sebuah layanan yang menyediakan brosur elektronik tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang meliputi pelayanan Pelayanan pidana, perdata, hukum, e-Court, e-raterang, Gugatan Sederhana, Mediasi, Posbakum, SiSari dan Alur Pelayanan Disabilitas. Dengan

SiBola ini diharapkan dapat memberikan akses kemudahan informasi untuk masyarakat pencari layanan tentang pelayanan yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang. SiBola sendiri telah diberlakukan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor W3.U10/97/KOT/SK/V/2022 tentang Pemberlakuan Aplikasi SiBola Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan telah dipublikasikan baik melalui website resmi Pengadilan Negeri Padang Panjang, facebook, ataupun instagram.



c. Si-Salut (Sistem Informasi Permintaan Salinan Putusan)

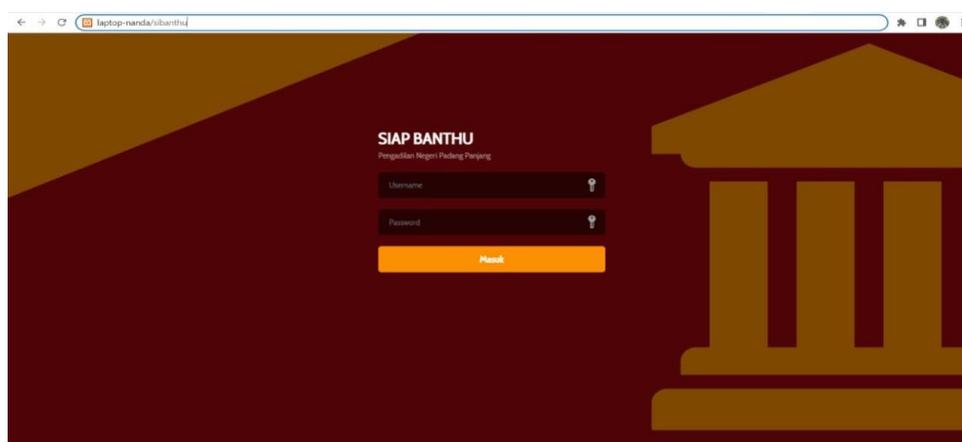
Layanan permintaan salinan putusan ini merupakan sebuah inovasi dari Pengadilan Negeri Padang Panjang yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, dengan layanan ini masyarakat pencari keadilan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan permohonan permintaan salinan putusan, cukup dengan mengisi formulir elektronik yang telah tersedia. Masyarakat

pencari keadilan hanya datang ke pengadilan negeri ketika salinan putusan telah siap untuk diserahkan.



d. Siap Banthu (Sistem Informasi Bantuan Hukum)

Inovasi berupa aplikasi yang dinamakan dengan Siap Banthu ini merupakan layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan ganti nama dan mengajukan permohonan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya pemohon pada saat datang ke Pengadilan Negeri Padang Panjang cukup mengisi permohonan ganti nama dan permohonan bantuan hukum menggunakan aplikasi SiapBanthu menggunakan komputer yang telah tersedia, sehingga pemohon tidak perlu lagi melakukan pengisian permohonan secara manual.



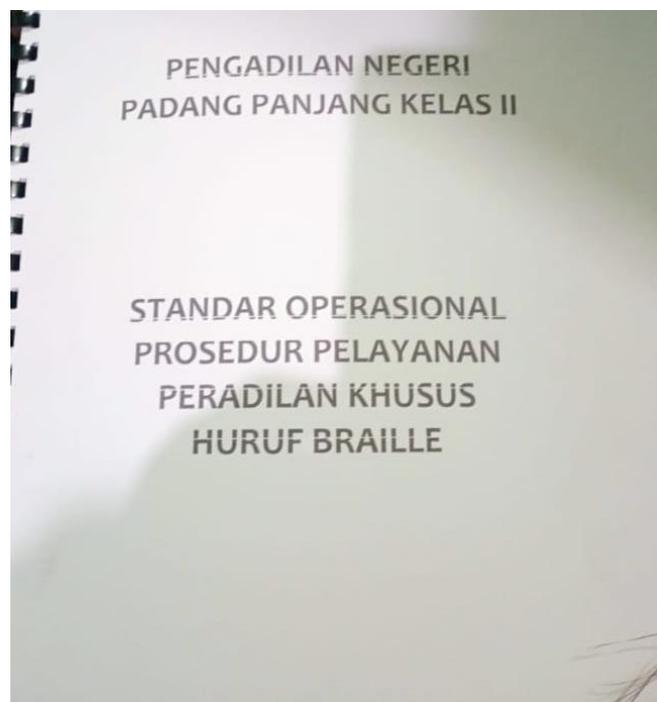
e. Form Pelayanan Digital Dan Video Persyaratan Ganti Nama

Layanan ini merupakan inovasi yang memudahkan kelompok disabilitas dalam mencari informasi tentang persyaratan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya pemohon dapat mengetahui mengenai persyaratan permohonan ganti nama cukup dengan mengakses website dan media sosial yang ada pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Selain itu pemohon dapat mengunduh form pernyataan dan form permohonan ganti nama yang telah disediakan pada Website Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang nantinya memudahkan pemohon untuk dapat mengisi langsung form permohonan dan form pernyataan tersebut di mana pun dan kapan pun sehingga pada saat pengajuan permohonan semua persyaratan telah terpenuhi oleh Pemohon.



f. Buku Standar Operasional Prosedur Pelayanan Menggunakan Huruf Braille

Inovasi ini merupakan sarana untuk memudahkan kelompok disabilitas khususnya penyandang tuna netra dalam membaca dan mengetahui standar operasional prosedur pelayan yang ada pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya penyandang tuna netra dapat mengetahui seluruh layanan yang ada seperti layanan Perdata, Pidana, dan Hukum menggunakan buku SOP yang telah dilengkapi huruf Braille.



- g. Form Pelayanan Digital Dan Video Tutorial Tata Cara Pelayanan Dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum

Inovasi ini merupakan sarana yang memudahkan masyarakat pencari keadilan yang akan mengakses layanan bantuan hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya masyarakat yang ingin mengetahui persyaratan dan tata cara pelayanan pada posbakum cukup

dengan melihat video tutorial pelayanan dan tata cara persyaratan posbakum yang pada website Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Selain itu masyarakat juga bisa mengunduh formulir pelayanan posbakum pada webiste Pengadilan Negeri Padang Panjang.



h. Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pengadilan Negeri Padang Panjang

Inovasi ini merupakan sarana yang memudahkan masyarakat pencari keadilan mendapatkan layanan guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Dengan aplikasi berbasis web ini masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan diantaranya Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan,

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja, Informasi Laporan Akses Informasi, dan Informasi Lainnya.



7. Pengadilan Negeri Payakumbuh

a. Aplikasi SI JANIAH

Aplikasi yang menampilkan berbagai informasi terkait persyaratan layanan yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh termasuk Penelusuran Informasi Perkara, yang dapat diakses oleh Masyarakat Pencari Keadilan dimanapun dan kapanpun.

b. E-Lobuah

E-Lobuah atau Elektronik Layanan Online PN Payakumbuh merupakan inovasi berupa whatsapp Virtual Assistant yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi

langsung dari petugas PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh.

c. SI DILAN PINTAR

Inovasi kerja sama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk membantu Masyarakat Kota Payakumbuh dalam melakukan perubahan akta kelahiran yang disebabkan karena perubahan nama atau perbaikan elemen data (tanggal lahir, nama orangtua) yang memerlukan salinan putusan dan penetapan pengadilan.

d. PERHATIAN SI DILAN

Inovasi kerja sama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Payakumbuh dalam rangka percepatan penerbitan akta kematian yang membutuhkan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Penetapan Kematian bagi Seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

e. Pengadilan Mengajar

Merupakan upaya Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perihal pengetahuan hukum serta menginternalisasi nilai-nilai integritas sejak dini kepada mahasiswa yang dilakukan oleh Hakim, Panitera dan Pelaksana Teknis lainnya yang bertujuan

untuk menggaungkan wajah baru dari Pengadilan yang bersih, berintegritas dan melayani kepada masyarakat melalui mahasiswa dengan memberikan contoh langsung dan konkret sehingga paradigma masyarakat terhadap pengadilan dapat berubah menjadi lebih baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembimbingan mahasiswa magang melalui pemberian materi, diskusi terbuka dan praktik peradilan semu, bekerja sama dengan beberapa Universitas.

f. Pojok Posbakum

Merupakan penyediaan akses yang cepat antara pengguna layanan dengan Posbakum terkait konsultasi draft permohonan dengan menggunakan system barcode.

8. Pengadilan Negeri Sawahlunto

a. Inovasi Pertama

Aplikasi SIDONA (Aplikasi Dokumen Zona Integritas) bertujuan untuk mempermudah pengumpulan laporan bulanan pengembangan kompetensi pegawai yang akuntabel dan dokumen berupa SK, notulen rapat, SOP dan PKP untuk semua pegawai yang bermanfaat dalam pengumpulan dokumen zona integritas maupun kepentingan lainnya.

b. Inovasi Kedua

Aplikasi Mint SIPP untuk aparatur Pengadilan Negeri Sawahlunto dan Mext SIPP untuk masyarakat pencari keadilan. Aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi

data perkara, informasi putusan dan akses kedalam aplikasi eksternal Mahkamah Agung seperti akses aplikasi ecourt, akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.

c. Inovasi Ketiga

Website ini disediakan untuk mempermudah petugas MPP dan Para Pencari Keadilan yang datang ke MPP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang terletak di Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto. Website ini menyediakan berupa Info TIL_ANG dan telah dilink ke website PN Sawahlunto, e-Berpadu, Tilang, Eraterang, e-Court, dan SIPP, Dengan tersedianya website ini, masyarakat lebih cepat dalam menerima layanan dan lebih mudah dalam mengakses layanan yang disediakan oleh Pengadilan.

d. Inovasi Keempat

Aplikasi ini di buat untuk pengawasan internal. Pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat menyampaikan keluhan layanan PTSP pada kios-k. Aplikasi ini bersifat lokal, sehingga hanya pengunjung yang datang langsung yang dapat menyampaikan keluhannya. Keluhan akan diterima langsung oleh ketua, lalu bisa didisposisi ke panitera atau sekretaris untuk ditindak lanjuti.

e. Inovasi Kelima

Aplikasi SAVIA-OK merupakan inovasi berupa whatsapp Virtual Assistant untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu untuk

mendapatkan informasi layanan Prodeo serta layanan hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sawahlunto.

f. Inovasi Keenam

Pembayaran biaya perkara melalui mesin EDC (Elektronik Data Capture). Selama ini setiap pembayaran biaya perkara selalu dilakukan dengan penyetoran langsung ke bank terdekat, cara tersebut dipandang tidak efektif dan efisien terutama dari segi waktu. Para pihak atau kuasanya harus berkendara setidaknya sejauh 5 km untuk menuju bank terdekat, setelah sampai di bank para pihak atau kuasanya pun harus antri sekian lama bahkan bisa berjam-jam untuk bisa melakukan transaksi. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan transaksi keuangan perkara, sehingga lebih hemat waktu dan tenaga, proses mejadi lebih cepat.

9. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

- a. Aplikasi Panggilan Sidang beserta perangkat Audio untuk menunjang aplikasi Panggilan Sidang
- b. Social feed adalah fasilitas social media yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mempermudah penyampaian informasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II pelayanan publik yang terdapat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Social media yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah Facebook, Instagram dan Youtube.

c. Portal Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

d. Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Adalah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan dan himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur pengadilan dan masyarakat) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.

e. Aplikasi Simpel (Sistem Informasi Pelayanan)

f. Layanan Disabilitas , E-court, dan Meja Inzage

Sebelumnya layanan disabilitas, E-court, dan Meja Inzage mempunyai meja masing masing yang terpisah dengan Layanan PTSP namun setelah Meja PTSP yang terbaru disatukan agar lebih memudahkan dan memberi kenyamanan terhadap penerima manfaat layanan.

10. Pengadilan Negeri Batusangkar

a. MInt SIPP (Monitoring Internal - Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi Mint SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk tenaga teknis dan bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri, terkhusus lagi untuk Hakim, Panitera dan Jurusita serta tenaga non teknis pengadilan yang mempunyai hak akses pada aplikasi SIPP lokal pengadilan. Layaknya aplikasi MIS, Aplikasi Mint SIPP ini bisa digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi data aplikasi SIPP, aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang dan notifikasi jadwal sidang, info

antrian sidang, info perkara tilang, info dan notifikasi perkara minutas, notifikasi penahanan, statistik perkara pengadilan, statistik perkara hakim, panitera pengganti dan jurusita, data kinerja pengadilan, data penyelesaian perkara, info dan notifikasi penetapan, info dan notifikasi putusan, data delegasi, info relas jurusita, info perkara hakim dan panitera, data arsip, data statistik dan antrian direktori putusan, info panjar perkara, rincian data perkara, menyediakan rangkuman jadwal sidang untuk perkara yang belum putus serta detail informasi perkara, serta akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi e-court, akses aplikasi siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.

b. Mext SIPP (Monitoring External - Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi MExt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk para pihak yang sedang berperkara, untuk jaksa, pengacara dan masyarakat umum. Aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi data perkara, informasi putusan dan akses kedalam aplikasi external Mahkamah Agung seperti akses aplikasi ecourt, akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.

11. Pengadilan Negeri Solok

a. Brosur Elektronik

Merupakan alternatif brosur yang disediakan Pengadilan Negeri Solok dan mengurangi penggunaan kertas (paperless). Dampak langsung bagi layanan dengan adanya inovasi adalah pengguna layanan pengadilan dapat mengetahui jenis-jenis layanan Pengadilan Negeri Solok tanpa harus datang cukup dengan mengakses situs web Pengadilan Negeri Solok.

b. Kartu Prioritas

Untuk pengguna layanan yang dilayani melewati waktu yang ditetapkan SOP. Kartu ini merupakan kompensasi untuk pengguna layanan. Sehingga pada pelayanan berikutnya pengguna layanan menjadi prioritas untuk dilayani.

c. E-DEPE (Delivery Penetapan)

Merupakan aplikasi pengiriman penetapan tentang perubahan nama/akta kelahiran, akta kematian, dan akta cerai setelah penetapan dibacakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok pada hari yang sama. Inovasi ini dilatarbelakangi agar masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan lebih cepat. Masyarakat tidak perlu mengurus ke Disdukcapil karena dokumen langsung diproses dan dokumen elektronik dapat diunduh melalui tautan yang dikirimkan melalui SMS ke telepon genggam yang bersangkutan.

12. Pengadilan Negeri Painan

a. Website dan Media Sosial Resmi

Informasi mengenai layanan dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Painan dapat mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak, papan pengumuman, website Resmi dan media social. Dimana media social resmi Pengadilan Negeri Painan telah terhubung langsung dengan Whastapp Pengadilan Negeri Painan.

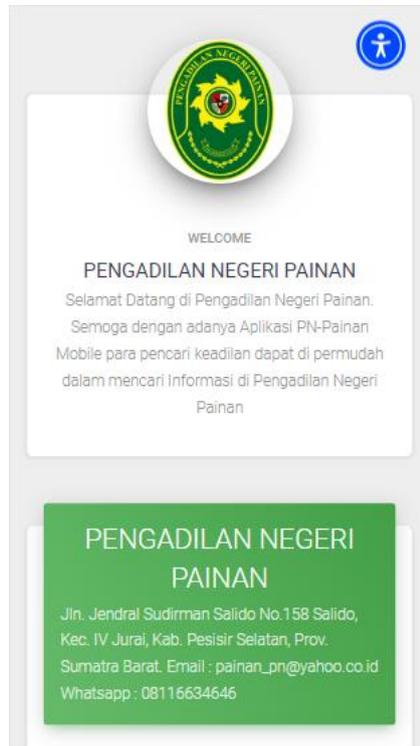
b. Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi Antrian PTSP adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk para masyarakat penerima layanan mendapatkan nomor urut antrian berdasarkan layanan yang akan dituju. Nomor antrian diterima oleh masyarakat melalui meja layanan penerima tamu, sehingga penerima layanan akan tertib mendapatkan panggilan sesuai dengan nomor antriannya.

c. Aplikasi Audio Anti Gratifikasi

Aplikasi Audio Anti Gratifikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengingatkan seluruh Pegawai dan Pengunjung Sidang Pengadilan Negeri Painan untuk tidak melakukan Gratifikasi, baik didalam lingkungan pengadilan ataupun diluar lingkungan pengadilan.

d. PN Painan Mobile



e. Sidang Online Menggunakan Teleconference



13. Pengadilan Negeri Lubuk Basung

a. Aplikasi E-Tilang

Aplikasi ini ditujukan untuk Pelanggar Lalu-Lintas. Dengan e-Tilang ini, Pelanggar dengan mudah dapat mengetahui besaran Denda Tilang yang telah diputus oleh Hakim.

b. Aplikasi Panggilan Sidang

Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk panggilan sidang bagi para pihak yang berperkara.

c. Aplikasi antrian PTSP

Aplikasi yang memudahkan Pengunjung PTSP untuk mendapatkan layanan Prima.

d. Aplikasi Posbakum Online

Aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah mendapatkan konsultasi hukum secara online.

14. Pengadilan Negeri Tanjung Pati

a. Aplikasi Dashboard Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Aplikasi dashboard ini terdapat menu atau shorcut untuk mengakses jadwal sidang dan aplikasi-aplikasi lainnya yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

b. Aplikasi Pojok Inovasi Terpadu

Pojok Inovasi Terpadu Pengadilan Negeri Tanjung Pati merupakan inovasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai upaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Beberapa inovasi yang dapat diakses antara lain PTSP, POSBAKUM Online dan Sarilamak. Aplikasi pojok inovasi terpadu dapat diakses dengan alamat url <https://point.pn-tanjungpati.go.id/>

c. Aplikasi PTSP online

Aplikasi PTSP online merupakan inovasi dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi/bertanya atau melihat brosur tentang pelayanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Aplikasi ini dapat diakses dari aplikasi pojok inovasi terpadu (point) atau langsung ke url <https://point.pn-tanjungpati.go.id/ptsp>.

d. Pelayanan PTSP Mini

Selain pelayanan PTSP yang berada di gedung kantor utama, pelayanan PTSP juga diterapkan pada gedung ruang sidang zitting plaats Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berada di kecamatan Suliki. Pelayanan yang ada pada PTSP mini tidak ada bedanya dengan pelayanan PTSP pada gedung kantor, semua nya sama dalam hal pelayanan, mulai dari surat masuk, permohonan surat keterangan, penerimaan berkas perkara dan penerimaan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan PTSP. Pelayanan PTSP mini yang

bertempat di Suliki diadakan 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dari jam 9.00 – 13.00 WIB.

e. Pelayanan SARILAMAK

SARILAMAK adalah singkatan dari Sarana Transportasi Disabilitas Mencari Keadilan. Layanan SARILAMAK merupakan inovasi pelayanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Layanan SARILAMAK dapat digunakan penyandang disabilitas dimana Penyandang disabilitas nanti dijemput ke Kantor Kecamatan dan diantarkan kembali untuk mendapatkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Layanan SARILAMAK dapat digunakan oleh pencari keadilan secara Gratis di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Jarak maksimal 45 KM dari kantor Pengadilan, yaitu Kecamatan Bukit Barisan, Guguak, Gunung Omeh, Harau, Mungka, Pangkalan Koto Baru, dan Suliki.

15. Pengadilan Negeri Koto Baru

a. Simantu (Sistem Manajemen Tugas)

Simantu (sistem manajemen tugas) merupakan inovasi Pengadilan Negeri Koto Baru yang bertujuan untuk manajemen tugas fungsi pada masing-masing unit kerja yang ada di Pengadilan Negeri Koto Baru. Dengan adanya sistem ini memudahkan pimpinan untuk monitoring serta kontrol setiap masing bagian, sehingga menunjang dalam pelaksanaan APM (Akreditasi Penjaminan Mutu).

b. Antrian PTSP

Antrian PTSP bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pengunjung. Selain itu antrian PTSP juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya antri dan tertib. Setelah mendapatkan pelayanan dari pihak Pengadilan Negeri Koto Baru, pengunjung diarahkan untuk mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari pengunjung.

c. Lanprio (Layanan Prioritas)

Lanprio (Layanan Prioritas) merupakan sebuah inovasi dalam hal pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas dan juga kelompok rentan. Inovasi ini memudahkan bagi para masyarakat dalam hal menjangkau layanan pengadilan, seperti informasi produk pengadilan, konsultasi hingga *booking* pelayanan PTSP yang terintegrasi dengan whatsapp dan juga zoom sehingga memudahkan dalam hal fleksibilitas.

d. Pelana (Pendaftaran Layanan non Advokat)

Pelana (Pendaftaran Layanan non Advokat) merupakan inovasi Pengadilan Negeri Koto Baru untuk membantu para masyarakat pencari keadilan mengakses e-court non advokat secara online. Sehingga memudahkan dalam hal pendaftaran akun e-court bagi para pihak.

e. Panggilan Sidang

Pangsid (panggilan sidang) merupakan sebuah inovasi yang memudahkan jalannya persidangan dimana Aplikasi ini membuat panggilan bagi para pihak, jaksa penuntut umum, panitera pengganti maupun majelis hakim untuk memulai agenda persidangan pada Ruang Sidang Tertentu tanpa bantuan operator untuk memanggil para pihak yang berperkara.

f. Media Sosial Resmi Pengadilan Negeri Koto Baru

Untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam memberikan informasi terkini baik mengenai peradilan maupun hal selain peradilan. Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki akun media sosial resmi. Terdapat tiga jenis media sosial resmi yang dimiliki Pengadilan Negeri Koto Baru. Pertama, akun resmi media social Facebook yang dapat diakses melalui @PN.KotoBaru. Kedua, akun resmi media sosial Instagram yang dapat diakses melalui @pn_kotobaru. Ketiga, akun resmi media sosial Twitter yang dapat diakses pada akun @pn_kotobaru. Dan juga kanal youtube pengadilan negeri koto baru Dengan adanya akun media sosial resmi tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat demi meningkatkan pelayanan publik.

g. CCTV

Sebagai sarana pendukung keamanan lingkungan kantor untuk meminimalisir resiko telah dipasang CCTV pada beberapa titik. Dan juga

kamera CCTV pada meja inzage yang dapat merekam suara sehingga tetap menjaga integritas dari Pengadilan.

h. Video Conference

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tatacara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah melaksanakan sidang secara Elektronik Dimana Hakim bersidang dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Koto Baru yang dilengkapi dengan fasilitas untuk sidang secara Elektronik seperti kamera, mic meja, mixer, projector, screen untuk zoom serta audio. Dengan menggunakan aplikasi ini para partisipan (Hakim, Jaksa, Tahanan,

Saksi, maupun Pengacara) tidak bertatap muka secara langsung melainkan persidangan dilakukan dengan aplikasi meeting online yakni menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

i. MExt SIPP

Aplikasi MExt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk para pihak yang sedang berperkara, untuk jaksa, pengacara dan masyarakat umum. Aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi data perkara, informasi putusan dan akses kedalam aplikasi external Mahkamah Agung seperti akses aplikasi ecourt, akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi Siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.

Bagian Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru tergerak untuk membuat inovasi aplikasi berbasis pada Smartphone Android, yang penggunaannya bekerja berdampingan dengan aplikasi SIPP, yakni aplikasi yang dinamakan dengan MExt SIPP. Berikut screenshot MeXT SIPP tampilan halaman muka pada Handphone Android:

j. Buku Braille Layanan PTSP

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada lampiran A Pasal 13 menyebutkan bahwa Pengadilan wajib

menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas berdasarkan kondisi penyandang disabilitas, salah satu kondisi tersebut yaitu penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan perlu disediakan salah satu sarannya yaitu “Media Informasi Cetak Braille”.

Pengadilan Negeri Koto Baru berusaha mewujudkan badan peradilan yang humanis bagi para penyandang disabilitas, sehingga menyediakan sebuah produk baru yaitu “Buku Katalog Braille” bagi para penyandang tuna netra. Dalam buku ini dipaparkan informasi sebagai berikut.

- Jenis-jenis meja layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Alur pengajuan gugatan sederhana
- Alur pengajuan permohonan perkara perdata
- Alur permohonan surat keterangan, dan
- Alur pengajuan surat izin besuk.

16. Pengadilan Negeri Pulau Punjung

a. Aplikasi Dashboard Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Aplikasi dashboard ini menampilkan rasio penanganan perkara yang berasal dari proses penanganan perkara di SIPP. Inovasi ini memudahkan hakim dan panitera pengganti dalam melakukan kontrol terhadap proses perkara yang sedang dalam persidangan. Selain itu pada tampilan dashboard juga terdapat menu atau shortcut untuk mengakses jadwal sidang dan aplikasi-aplikasi lainnya yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu cara dalam menjaga terlaksananya tujuan dan fungsi pokok organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi Pengadilan Tinggi Padang terhadap kinerja Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya baik dalam bidang Yustisial maupun Non Yustisial. Pengawasan yang dilakukan berpedoman pada asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Melalui pengawasan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan pengawasan baik dalam bidang teknis maupun bidang administrasi melalui metode berikut ;

1. Metode Pengawasan

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI (*voorpost*), Ketua Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan menggunakan Metode Pengawasan yang dilakukan antara lain :

- a. Inspeksi secara rutin dan mendadak hal ini dilakukan terhadap administrasi keuangan maupun administrasi perkara.
- b. Meminta laporan secara periodik (berkala) terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan melalui Hakim Pengawas Daerah yang meliputi bidang Teknis Yustisial yaitu bidang Kepaniteraan dan Kejurusitaan serta keuangan

perkara, selain itu juga Hakim Pengawas Bidang Juga bertugas melakukan pengawasan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Umum dan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- c. Laporan khusus diminta jika ada masalah tertentu yang perlu penyelesaian segera atau mendapatkan hal-hal yang baru dan perlu pemecahan.

2. Pengawasan Secara Berkala

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, maka dapat diberikan penilaian khusus kepada Hakim, Panitera dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pengadilan Tinggi Padang setiap tahunnya melalui penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Hal ini dilakukan tiap-tiap akhir tahun. Terkhusus untuk hakim, penilaian dilakukan di dalam dinas maupun di luar kedinasan hal ini untuk menjaga dan meningkatkan citra hakim di mata publik.

2.1. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang

bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *Preventif* dan *Represif*, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu. Pengawasan secara internal pada Pengadilan Tinggi Padang secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi:

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga menunjuk Hakim pengawas bidang dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional. apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.

4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti melalui Panitera mengenai penanganan perkara yang dilakukan sesuai dengan SOP.
5. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing. Untuk pengawasan dan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang telah dilakukan secara periodik oleh Pengadilan Tinggi Padang selama tahun 2023.

**REKAP HASIL PENGAWASAN SEMESTER II PENGADILAN NEGERI
SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	NAMA SATKER	TANGGAL LHP	LHP	TANGGAL TLHP	TLHP	KET.
1.	PN PADANG	20/11/2023 s.d 21/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan setiap jenis SOP kepaniteraan 2. Ditemukan dalam SIPP Panitera Pengganti belum menginput jadwal penundaan sidang perkara perdata dan pidana, serta perkara perdata gugatan sederhana yang belum diinput nilai sengketanya 3. Ditemukan dalam SIPP upaya hukum banding perkara perdata yang belum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang. 4. Pengisian pada SIPP belum sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya. Panitera Muda Pidana dan Perdata belum melakukan monev ditindaklanjuti. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilaksanakan monev 2. Jadwal sudah diinput pada SIPP 3. Sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen terkait temuan 4. Sudah dilakukan monev tindak lanjut pada pengisian SIPP 	
2.	PN PARIAMAN	26/10/2023 s.d 27/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan dalam SIPP perkara yang belum upload berita acara persidangan. 2. Pada saat dilakukan uji petik terhadap 10 berkas perkara di 	8/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan konsolidasi anatar bagian yang terkait untuk menindak temuan tersebut dan menjadi catatan kedepan untuk lebih teliti dan 	

			<p>kepaniteraan, maka ditemukan berkas perkara yang belum ada tanggal penandatanganan court calender</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ditemukan dalam SIPP perkara yang sudah putus belum minutasi melebihi ketentuan 7 hari minutasi untuk perkara pidana dan 14 hari untuk perkara perdata. 4. Dalam SIPP masih ditemukan perkara yang belum upload relaas panggilan sidang pertama 5. Belum dilaksanakan review atau monev terhadap pelaksanaan setiap SOP kepaniteraan 6. Masih ada kendaraan dinas yang masih belum dibalik nama atas Mahkamah Agung. 7. Rapat berjenjang belum melibatkan HakimPengawas. 8. Masih terdapat BMN yang belum dilakukan penetapan status penggunaan BMN 		<p>sudah dilakukan upload berita acara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan perbaikan pemberian tanda tangan pada court calender 3. Telah dilakukan minutasi terhadap perkara pidana dan perdata tersebut. 4. Sudah dilakukan upload relaas panggilan sidang pertama pada SIPP. 5. Sudah dilaksanakannya monev terhadap pelaksanaan SOP Kepaniteraan. 6. Sudah dilakukan pengurusan balik nama sedang di poses. 7. Rapat berjenjang sudah melibatkan dan diawasi Hakim Pengawas. 8. BMN suda dalam proses pengajuan PSP dan sudah dibuatkan surat permohonan. 	
3.	PN PAINAN	23/10/2023 s.d 24/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi mengenai restitusi kompensasi kepada korban tindak pidana sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2022 belum 	06/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan sosialisasi restitusi kompensasi di Pengadilan Negeri Painan 2. Sudah dilakukan sosialisasi 	

			<p>dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum dilakukan sosialisasi tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga. 3. Laporan hasil pengawasan bidang masih berupa laporan pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 4. Ditemukan pada SIPAPU perkara yang belum uploade relaas panggilan sidang pertama. 5. Terdapat perjalanan dinas dalam kota yang dibayarkan uang transportasi kepada pegawai yang telah diberi fasilitas kendaraan dinas. 6. Terdapat pembayaran konsumsi untuk pelantikan yang melebihi standar biaya masukan (SBM) 		<p>mengenai keberatan pihak ketiga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sudah disiapkan buku kunjungan untuk hakim pengawasan bidang 4. Sudah dilakukan upload relaas panggilan sidang pertama. 5. Sudah dibuatkan berita acara pengeluaran anggaran transportasi. 6. Sudah dibuatkan berita acara pengeluaran anggaran konsumsi dan pelantikan. 	
4.	PN SOLOK	16/10/2023 s.d 17/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat dilakukan uji petik terhadap 10 berkas perkara di kepaniteraan, maka ditemukan berkas perkara yang belum ada tanggal penandatanganan court calender 2. Beberapa monev checklist penilaian kinerja yang 	26/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Court Calender sudah dilakukan tanda tangan dan tanggal pada berkas perkara. 2. Melaksanakan sosialisasi SK Dirjen Badilum Nomor 1784/DJU/SR.OTO.3/4/2022 tentang pembaruan checklist Akreditasi Penjamin Mutu 	

			<p>dikeluarkan Badilum belum dilaksanakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum dilaksanakan review atau monev terhadap pelaksanaan setiap SOP kepaniteraan. 4. Seluruh data disetiap tahapan yang harus diisi di SIPP belum terisi 100%. 5. Nilai LKjIP SAKIP masih berada di bawah minimal A. 6. Rapat berjenjang kesekretariatan belum melibatkan Hakim Pengawas Bidang 		<p>Dirjen Badilum Tahun 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sudah dilakasankan review monev. 4. Sudah di upload putusan tersebut dalam SIPP. 5. Melakukan monev LKjIP 6. Sudah melibatkan Hakim Pengawas Bidang. 	
5.	PN KOTO BARU	19/10/2023 s.d 20/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi resiko yang teridentifikasi pada registrasi register masih bersifat umum dan belum spesifik sesuai dengan resiko yang mungkin terjadi di PN Kotobaru. 2. Rapat berjenjang kesekretariatan belum didampingi oleh Hakim Pengawas. 3. Beberapa berita acara sidang perkara pada SIPP belum ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. 4. Register Induk perkara 	27/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diperbarui dengan lebih spesifik 2. Rapat berjenjang kesekretariatan sudah didampingi Hakim Pengawas. 3. Beberapa berita acara sidang sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. 4. Telah diberitahukan kepada kejaksaan negeri untuk mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan. 5. Sisa panjar biaya perkara telah dikembalikan secara bertahap 	

			<p>pidana pada kolom 23 terkait berita acara pelaksanaan putusan, banyak yang belum diisi.</p> <p>5. Sisa panjar biaya perkara masih banyak yang belum dikembalikan kepada penggugat.</p> <p>6. Buku jurnal keuangan perkara K1A1 masih banyak yang belum diisi.</p>		<p>melalui surat pemberitahuan kepada para pihak/kuasanya.</p> <p>6. Buku jurnal keuangan perkara telah diisi sampai dengan perkara terakhir.</p>
6.	PN PADANG PANJANG	06/11/2023 s.d 07/11/2023	<p>1. Masih ditemukan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak oleh Kasir kepada Bendahara Penerima pada perkara perdata melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu pemungutan biaya redaksi Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN Pdp seharusnya disetorkan ke Bendahara Penerima pada tanggal 7 September 2023</p> <p>2. Belum diadakannya sosialisasi ke pihak eksternal (kejaksaan, advokat dan kepolisian) tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di</p>	16/11/2023	<p>1. Kasir telah menyetorkan PNBPNP redaksi nomor perkara 3/Pdt.G/2023/PN Pdp kepada bendahara penerima tanggal 06 Nopember 2023.</p> <p>2. sosialisasi ke pihak eksternal (kejaksaan, advokat dan kepolisian) tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan Kembali telah dilaksanakan.</p> <p>3. Telah melaksanakan monev checklis penilaian kinerja.</p> <p>4. telah dicantumkan tanggal penandatanganan court calendar.</p> <p>5. Telah menyampaikan surat kepada JPU agar Berita Acara</p>

			<p>Mahkamah Agung secara elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Beberapa monev checklist penilaian kinerja yang dikeluarkan Badilum belum dilaksanakan oleh satker. 4. Pada saat dilakukan uji petik terhadap 10 berkas perkara di kepaniteraan muda hukum ditemukan adanya berkas perkara perdata yang belum ada tanggal penandatanganan court calendar. 5. Register Induk Perkara Pidana Kolom 23 tentang Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pidana oleh JPU masih ada yang kosong. 6. Ditemukan didalam SIPP, perkara yang belum upload Berita Acara Persidangan. 7. Terdapat keterlambatan pembayaran pajak 2 (dua) unit kendaraan roda empat. 8. Terdapat kesalahan pembebanan mata anggaran dalam pengeluaran anggaran pada DIPA 03, yang seharusnya dibebankan untuk pembayaran penjilidan akan 		<p>Eksekusi Terdakwa dikirim ke Pengadilan Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Berita acara persidangan telah diupload oleh Panitera Pengganti ke SIPP tepat waktu. 7. Telah membuat jadwal pembayaran pajak kendaraan dinas. 8. Kedepannya pengelola anggaran akan lebih teliti dalam melakukan pembayaran dan untuk kesalahan tersebut dalam proses ralat SPM. 	
--	--	--	---	--	---	--

			tetapi dibebankan pada mata anggaran untuk komsumsi terdakwa.			
7.	PN BATUSANGKAR	12/10/2023 s.d 13/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan Sosialisasi Kebijakan Restorative Justice (RJ) terbaru secara berkala. 2. Belum membuat laporan hasil penerapan RJ kepada Ketua Pengadilan Tinggi setiap sebulan sekali. 3. Laporan Permohonan izin peggeledahan dan izin Penyitaan pada aplikasi E-Berpadu tidak sama dengan kondisi sebenarnya, contoh permohonan izin Peggeledahan bulan Agustus 2023 ada 5 buah tetapi dalam laporan aplikasi hanya ada 1 buah, izin penyitaan ada 14 buah tetapi dalam aplikasi hanya ada 2 buah. 4. Laporan permohonan eksekusi kepada KPT belum dilakukan setiap 6 bulan sekali. 5. Pada saat dilakukan uji petik di Kepaniteraan Muda Hukum ditemukan adanya berkas perkara perdata yang belum ada tanggal penandatanganan 	27/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan Sosialisasi Kebijakan Restorative Justice (RJ) terbaru secara berkala. 2. Laporan hasil penerapan RJ sudah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setiap bulan sekali. 3. Satgas SIPP sudah berkonsultasi atau koordinasi dengan satgas Pengadilan Tinggi. 4. Laporan permohonan eksekusi kepada KPT sudah dilakukan setiap 6 bulan sekali. 5. Berkas perkara perdata sudah ada tanggal dan penandatanganan court calendar. 6. Sudah diupload Berita Acara persidangan. 7. Sudah dilakukan monev Checklist Penilaian Kinerja. 8. Agar Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang supaya memerintahkan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan untuk mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Buku-buku 	

			<p>court calendar.</p> <p>6. Ditemukan didalam SIPP, perkara yang belum upload Berita Acara persidangan.</p> <p>7. Beberapa monev Checklist Penilaian Kinerja yang dikeluarkan Badilum belum dilaksanakan oleh satker.</p> <p>8. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang belum mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk Aset tetap lainnya berupa buku-buku pustaka sebanyak 7.324 buah.</p> <p>9. Ketua dan Panitera belum melakukan monev terhadap ketetapan publikasi putusan (jumlah putusan yang dipublikasikan, anonimisasi putusan);</p>		<p>Pustaka tersebut.</p> <p>9. Ketua dan Panitera sudah melakukan Monev.</p>	
8.	PN BUKITTINGGI	23/10/2023 s.d 24/10/2023	<p>1. Ditemukan dalam SIPP perkara yang belum upload relas panggilan sidang pertama.</p> <p>2. Beberapa monev Checklist Penilaian Kinerja yang dikeluarkan Badilum belum dilaksanakan oleh satker.</p> <p>3. Penyetoran PNBPN oleh kasir kepada Bendahara penerima</p>	06/11/2023	<p>1. Juru sita sudah lebih disiplin dalam membuat dan me uploade berita acara persidangan.</p> <p>2. Pimpinan Satker sudah melaksanakan sosialisasi SK Dirjen badilum Nomor 1784/DJU/SR.OTO.3/4/2022 tentang pembaruan checklist</p>	

			<p>pada perkara perdata melebihi waktu yang ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum dilaksanakan review atau monev terhadap pelaksanaan setiap SOP kepaniteraan. 5. Ditemukan dalam SIPP perkara yang sudah putus belum minutasasi melebihi ketentuan 7 hari minutasasi untuk perkara pidana dan 14 hari untuk perkara perdata 6. Seluruh data pada tahapan eksekusi pada SIPP belum terisi 100% 7. LkjIP Tahun 2022 sudah dibuat, namun belum dilakukan monev. 		<p>Akreditasi Penjamin Mutu Dirjen Badilum Tahun 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan satker melakukan sosialisasi PP Nomor 5 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019. 4. Sudah dilaksanakan monev SOP Kepaniteraan. 5. Majelis Hakim sudah lebih disiplin dalam menyelesaikan dan mengupload putusan. 6. Sudah mengupload berita acara sidang 1 (satu) hari sebelum hari sidang berikutnya. 7. Hasil LKjIP sudah di monev. 	
9.	PN LUBUK BASUNG	16/11/2023 s.d 17/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panmud Perdata tidak melakukan rapat berjenjang secara berkala. 2. SK biaya panjar perkara yang diletakkan di PTSP terlalu kecil, sehingga sulit diketahui publik. 3. Register induk perkara perdata pada kolom banding belum diisi. 4. Terdapat buku jurnal perkara yang tidak ditutup pada tanggal putusan perkara. 	28/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panmud Perdata sudah melakukan rapat berjenjang. 2. Sudah diletakkan ditempat yang bisa dibaca dan diketahui publik. 3. Register perkara perdata pada kolom banding sudah diisi. 4. Jurnal sudah ditutup dan panjar sudah dikembalikan. 5. RKA-KL sudah diupload pada website. 6. Inovasi Posbakum pada Pengadilan Negeri Lubuk 	

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Beberapa fitur di website tidak di update, seperti RKAKL. 6. Inovasi pada Pengadilan Lubuk Basung belum ditampilkan di website. 7. Ringkasan pada daftar aset dan inventaris belum ada. 		<p>Basung sudah ditampilkan pada website.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sudah ada ringkasan asset dan inventaris. 	
10.	PN PAYAKUMBUH	09/11/2023 s.d 10/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya monev terhadap rapat 21 Agustus 2023 tentang pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. 2. Belum adanya sosialisasi secara berkala terhadap PERMA Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2022. 3. Pelaksanaan monev PERMA Nomor 6 Tahun 2022 hanya dilakukan oleh Panitera muda, seharusnya dilakukan oleh pimpinan satker. 4. Belum adanya monev dan tindak lanjut dari LHP, buku pengawasan bidang dan notulen rapat. 5. KPN hanya melakukan monitoring 2 kali dalam setahun, yang seharusnya 4 kali. 6. Objek pemeriksaan setempat belum menyebutkan siapa 	24/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilaksanakan monev atas rapat pengawasan dan pembinaan. 2. Sudah dilakukan sosialisasi secara berkala terhadap PERMA Nomor 1,2 dan 3 Tahun 2022. 3. Sudah dilaksanakan monev secara berkala. 4. Sudah dilakukan monev dari LHP, buku pengawasan bidang dan notulen rapat. 5. Akan dilaksanakan monitoring administrasi 4 kali setahun untuk kedepannya. 6. Sudah dilakukan perbaikan, dan kedepannya akan lebih teliti. 7. Website Pengadilan Negeri Payakumbuh sudah sesuai SK Dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM02.3/5/2021 	

			<p>yang menguasai objek.</p> <p>7. Website Pengadilan Negeri Payakumbuh belum sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM02.3/5/2021.</p>		
11.	PN MUARO	02/11/2023 s.d 03/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan monev terkait pengawasan dan pembinaan atasan langsung. 2. Belum lebgkapnya data dukung monev PERMA Nomor 7 Tahun 2022. 3. Sosialisasi Restorative Justice (RJ) belum dilaksanakan dengan baik. 4. Belum dilakukannya setiap bulan monev pengiriman berkas perkara. 5. Terdapat perkara perdata yang sudah diputus, namun buku jurnal belum ditutup 6. Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Muaro belum menerapkan presensi online atau SIKEP dan belum melaksanakan monev absensi. 7. Izin keluar kantor tidak sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2016. 	17/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suda dilakukan monev pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung. 2. Sudah dilengkapi data dukung PERMA Nomor 7 Tahun 2022. 3. Sudah dilaksanakan sosialisasi RJ 4. Sudah dilakukan monev pengiriman berkas perkara. 5. Buku jurnal perkara perdata sudah ditutup. 6. Hakim dan ASN akan melaksanakan absensi online dan monev absensi. 7. Sudah disesuaikan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2016.

12.	PN SAWAHLUNTO	13/11/2023 s.d 14/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perkara yang belum upload relaas sidang pertama yang belum di SIPP yaitu perkara nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl. 2. Terdapat berita acara yang belum di upload pada SIPP. 3. Berita acara pidana pelaksanaan putusan belum ditulis pada register induk perkara pidana. 4. Monev SOP Kepaniteraan beluk dilaksanakan. 5. Tanggal pengiriman surat agar diinput di aplikasi PTSP. 6. Revisi RKAKL 2003 terkait pemeliharaan gedung agar disesuaikan dengan yang ada di aplikasi E-Sadewa/KIB/SIMAN dan aplikasi Sakti. Begitu juga dengan anggaran pemeliharaan halaman harus sesuai SBM. 	21/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah di upload di SIPP. 2. Berita acara sudah di upload pada SIPP. 3. Berita acara sudah ditulis di register induk. 4. Monev SOP Kepaniteraan sudah dilaksanakan. 5. Tanggal pengiriman surat sudah diinput di aplikasi PTSP. 6. Revisi RKAKL 2023 sudah disesuaikan dengan aplikasi terkait. 	
13.	PN TANJUNG PATI	13/11/2023 s.d 14/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara pidana Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjp, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjp, Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tjp yang unggah ke dalam SIPP belum ditandatangani oleh Hakim 	23/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah kembali berita acara yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim kedalam SIPP terhadap perkara pidana terkait. 2. Memperbaiki isi putusan Anominisasi Nomor 5/Pid.Sus- 	

			<p>dan Panitera Pengganti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Uji Petik Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp tidak semua isi putusan di Anominisasi (dakwaan). 3. Pada Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tjp di dalam Register Induk perkara pada putusan banding tidak dituliskan tanggal penerimaan berkas dari Pengadilan Tinggi Padang. 4. Buku register Pengaduan tidak ditutup setiap bulannya. 5. Ada pengaduan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tetapi belum dimasukkan pada register pengaduan. 6. Labelisasi pada BMN di masing-masing ruangan sudah ditempel namun belum keseluruhan. 		<p>Anak/2023/PN Tjp yang belum di anominisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan pengisian tanggal penerimaan berkas dari Pengadilan Tinggi Padang. 4. Petugas melakukan penutupan register pengaduan setiap akhir bulan. 5. Petugas melakukan penutupan register pengaduan setiap akhir bulan. 6. Telah dilakukan labelisasi BMN di setiap ruangan. 	
14.	PN LUBUK SIKAPING	03/10/2023 s.d 04/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat berjenjang di Kepaniteraan belum melibatkan Hakim Pengawas. 2. Terdapat keterlambatan minutasikan perkara perdata. 3. Belum diinputnya kwitansi pada aplikasi E- Bima. 4. Belum dilaksanakannya Diklat 	25/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan rapat berjenjang melibatkan Hakim Pengawas. 2. Sudah dilakukan minutasikan tepat waktu. 3. Sudah dilakukan penginputan kwitansi pada aplikasi E-Bima. 4. Sudah dijadwalkan Diklat 	

			Ditempat Kerja 5. Rapat berjenjang Kesekretariatan belum melibatkan HakimPengawas.		Ditempat Kerja. 5. Sudah melibatkan Hakim Pengawas.
15.	PN PASAMAN BARAT	12/10/2023 s.d 13/10/2023	1. Terdapat pada register beberapa perkara pidana yang kolom pelaksanaan putusan belum diisi tanggal pelaksanaan putusan. 2. Pembayaran untuk kudapan/anack melebihi Standar Biaya Masukan (SBM). 3. Masih terdapat pengeluaran anggaran untuk biaya fotocopy. 4. Belum dibuatnya buku kas umum dan buku bnatu lainnya.	19/10/2023	1. Sudah diisi tanggal pelaksanaan putusan. 2. Sudah ditindaklanjuti melalui surat keterangan pengeluaran anggaran snack. 3. Sudah dibutakan berita acara kerusakan mesin fotocopy. 4. Sudah dibuat buku kas umum dan buku bantu lainnya.
16.	PN PULAU PUNJUNG	02/10/2023 s.d 02/10/2023	1. Terdapat checklis perkara yang sudah inkracht belum diisi lengkap. 2. Belum semua putusan perkara pidana yang sudah inkracht ada berita acara eksekusi dari kejaksaan. 3. Putusan anonimasi belum dibuat sesuai dengan SK KMA Nomor 2/144/2022, yaitu pengaburan masih menggunakan tanda (x) yang seharusnya menuliskan	17/10/2023	1. Sudah ditindaklanjuti dengan diisi lengkap 2. Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi berita cara 3. Sudah ditindaklanjuti agar sesuai dengan SK KMA 2/144/2022 4. Majelis Hakim dan Panitera sudah berkoordinasi untuk pengecekan berkas fisik. 5. Sudah disesuaikan dengan format dari Bawas. 6. Sudah dilakukan input kwitansi

			<p>dengan sebutan terdakwa atau anak.</p> <p>4. Ada ketidaksesuaian berkas fisik dengan data pada aplikasi SIPP.</p> <p>5. Format LHP hasil pengawasan bidang belum sesuai dengan format dari bawah.</p> <p>6. Belum diinputnya kwitansi pada aplikasi E-Bima.</p> <p>7. Daftar barang ruangan belum dilakukan update pada aplikasi SIMAN.</p>		<p>pada E-Bima</p> <p>7. Sudah dilakukan update pada aplikasi SIMAN.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

B. EVALUASI

Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan pengawasan dalam bentuk penilaian terhadap kinerja instansi semua Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Padang melakukan evaluasi melalui dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dokumen SAKIP terdiri dari IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian dilakukan reviu setiap tahunnya. Setelah ditetapkan IKU, kemudian program kerja setiap instansi direncanakan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) untuk masa kerja selama 5 tahun yang juga dilakukan reviu setelahnya. Untuk mencapai tujuan instansi yang tepat sasaran, maka perlu dibuat sebuah perencanaan kinerja yaitu RKT (Rencana Kinerja Tahunan). RKT yang telah disetujui oleh pimpinan instansi, kemudian dituangkan dalam PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan). Kemudian untuk mengukur dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, maka perlunya dilakukan pelaporan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang membuat laporan evaluasi kinerja instansi dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021, dengan metode sesuai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di

Bawahnya. Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi kinerja terhadap Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya sebagai berikut ;

REKAPITULASI HASIL EVALUASI SAKIP SATKER

No.	Pengadilan Negeri (PN)	NILAI PER KOMPONEN					Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Nilai (%)	
1.	PN Bukittinggi	24,6	24	12,3	16,75	77,65	BB
2.	PN Pasaman Barat	24	23,4	11,25	15	73,65	BB
3.	PN Pariaman	21	21,9	11,55	17,5	71,95	BB
4.	PN Muaro	21,6	21,6	10,8	17,5	71,50	BB
5.	PN Padang Panjang	21,6	21	11,25	17,5	71,35	BB
6.	PN Kotobaru	21	22,5	10,5	17	71	BB
7.	PN Lubuk Sikaping	21	21,9	10,5	17,5	70,90	BB
8.	PN Padang	19,2	21,9	12	17,5	70,60	BB
9.	PN Painan	21,6	21	10,05	17,5	70,15	BB
10.	PN Lubuk Basung	21	21	10,05	17,5	70	B
11.	PN Sawahlunto	21,6	20,4	10,5	17	69,50	B
12.	PN Tanjung Pati	21	20,4	10,5	17,5	69,40	B
13.	PN Payakumbuh	21	21	10,2	17	69,20	B
14.	PN Solok	21	19,5	10,5	17,5	68,50	B
15.	PN Batusangka	19,5	21	9,75	17,5	67,75	B
16.	PN Pulau Punjung	19,5	21	10,5	16,3	67,25	B

Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk:

- a. Perlu diadakan pelatihan tentang tata cara evaluasi kepada Pengadilan Tingkat Banding agar penilaian kinerja lebih optimal;
- b. Pelatihan pembuatan SAKIP agar melibatkan bagian teknis Kepaniteraan, sehingga tercipta keselarasan dalam pembuatan laporan;
- c. Perlu diberikan penghargaan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bagi nilai SAKIP-nya yang tertinggi, seperti penambahan anggaran perjalanan dinas sehinggamenimbulkan motivasi lebih untuk membuat laporan yang terbaik;

- d. Perlu adanya anggaran di Pengadilan Tinggi Padang untuk melakukan bimbingan teknis kepada Pengadilan Negeri Se Wilayah Pengadilan Tinggi Padang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja.

1) KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Padang berjalan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2023 dapat diselesaikan. Hal ini tertuang SIPP dalam penanganan perkara.
2. Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebanyak 2 kali untuk masing-masing Pengadilan Negeri yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Terkait objek pengawasan telah sesuai dengan pedoman pengawasan Mahkamah Agung RI. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini telah memberikan hasil yang lebih positif hal ini terbukti dengan peningkatan sumber daya dan efektifitas pelaksanaan tugas.
3. Pengelolaan keuangan DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada.
4. Pengelolaan administrasi peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.

2. Saran

1. Untuk percepatan proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan juga didukung oleh dana yang tersedia dalam DIPA.
2. Untuk peningkatan terlaksananya administrasi kesekretariatan yang maksimal diperlukan personil yang cukup berimbang dengan beban kerja.
3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang terutama dalam hal keterbukaan informasi
4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Padang.